

**Analisis Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Kelompok Petani Kecil (KPK)
Mengenai Pengenalan Gabungan KPK dan Persepsi Dinamika dan Kerjasama
Gabungan KPK Dalam Program Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil
(P4K)**

**(Studi Kasus di KPK Sidodadi dan Kenanga di Kecamatan Kromengan
Kabupaten Malang)**

Oleh

Erhason Wafa

0001040309-45



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS PERTANIAN

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN

Februari, 2008

**Analisis Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Kelompok Petani Kecil (KPK)
Mengenai Pengenalan Gabungan KPK dan Persepsi Dinamika dan Kerjasama
Gabungan KPK Dalam Program Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil
(P4K)**

**(Studi Kasus di KPK Sidodadi dan Kenanga di Kecamatan Kromengan
Kabupaten Malang)**

Oleh
Erhason Wafa
0001040309-45

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian
Strata Satu (S1)**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS PERTANIAN

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN

Februari, 2008

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Kelompok Petani Kecil (KPK) Mengenai Pengenalan Gabungan KPK dan Persepsi Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK Dalam Program Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K) (Studi Kasus di KPK Sidodadi dan Kenanga di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang)

Nama Mahasiswa : ERHASON Wafa

NIM : 0001040309-45

Jurusan : Sosial Ekonomi Pertanian

Program Studi : Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian

Menyetujui : Dosen Pembimbing



MENGETAHUI

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS
NIP.130 518 966

Ir. Edi Dwi Cahyono, M.Agr.Sc
NIP. 131 586 565

Tanggal Persetujuan:



**Analisis Standar Kompetensi Kerja (SKK) Gabungan Kelompok Petani Nelayan
Kecil (KPK) pada Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K)
(Studi Kasus di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang)**

SEMINAR HASIL

Diajukan kepada
Universitas Brawijaya Malang
untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan
Program Sarjana Pertanian

Oleh
Erhason Wafa
NIM 0001040309-45



**PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi: Analisis Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Kelompok Petani Kecil (KPK) Mengenai Pengenalan Gabungan KPK dan Persepsi Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK Dalam Program Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K) (Studi Kasus di KPK Sidodadi dan Kenanga di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang)

Nama Mahasiswa : ERHASON WAFAN

NIM : 0001040309-45

Jurusan : Sosial Ekonomi Pertanian

Program Studi : Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian

Menyetujui : Dosen Pembimbing

Utama,

Pendamping,

Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS
NIP.130 518 966

Ir. Edi Dwi Cahyono, M.Agr.Sc
NIP. 131 586 565

Mengetahui,

Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian

Dr. Ir. Joko Koestiono, MS
NIP.130 936 227

Tanggal Persetujuan:

LEMBAR PENGESAHAN

Mengesahkan,

MAJELIS PENGUJI

Penguji I,

Penguji II,

Mangku Purnomo, SP,M.Si
NIP.132 315 133

Dr.Ir. Kliwon Hidayat, MS
NIP. 130 873 498

Penguji III,

Penguji IV,

Prof.Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS
NIP.130 518 966

Ir. Edi Dwi Cahyono, M.Agr.Sc
NIP. 131 586 565

Tanggal Pengesahan:



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Erhason Wafa
NIM : 0001040309-45
Jur/Prog. Studi : Sosial Ekonomi Pertanian/PKP
Fakultas : Pertanian

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Malang, Valentine 2008

Yang membuat pernyataan

Erhason Wafa

RINGKASAN SKRIPSI

**Analisis Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Kelompok Petani Kecil (KPK)
Mengenai Pengenalan Gabungan KPK dan Persepsi Dinamika dan Kerjasama
Gabungan KPK Dalam Program Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil
(P4K)
(Studi Kasus di KPK Sidodadi dan Kenanga di Kecamatan Kromengan
Kabupaten Malang)**

Oleh

Erhason Wafa

0001040309-45



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS PERTANIAN

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN

Februari, 2008

RINGKASAN SKRIPSI

**Analisis Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Kelompok Petani Kecil (KPK)
Mengenai Pengenalan Gabungan KPK dan Persepsi Dinamika dan Kerjasama
Gabungan KPK Dalam Program Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil
(P4K)
(Studi Kasus di KPK Sidodadi dan Kenanga di Kecamatan Kromengan
Kabupaten Malang)**

Oleh

Erhason Wafa

0001040309-45

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian
Strata Satu (S1)**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS PERTANIAN

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

PROGRAM STUDI PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN

Februari, 2008

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pertanian yang dilakukan oleh bangsa kita telah mencapai babak transisi antara modernitas pedesaan dan tradisionalisme dengan banyaknya permasalahan di semua aspek kehidupannya. Seluruh kesenjangan dan ketidakberpihakan pemerintah semakin menjauhkan pembangunan pertanian dari kemakmuran. Yang dilahirkan ternyata pengangguran, menurunnya kualitas sumberdaya serta kelemahan daya saing petani (Hanani et al, 2003).

Pembangunan merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan rakyat dan golongan dalam masyarakat. Saat pelaksanaan pembangunan beranjak masuk milenium baru, masalah krisis moneter yang berkembang menjadi menjadi krisis ekonomi kemudian diikuti krisis sosial politik juga melanda Indonesia. Krisis yang terjadi sejak pertengahan 1997 hingga saat ini intinya adalah krisis kepercayaan. Kondisi krisis ini terjadi sebagai akibat dari masalah mendasar yang kronis dan masalah khusus yang terjadi akhir-akhir ini.

Pembangunan pertanian di masa datang tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun dihadapkan pula pada tantangan untuk menghadapi perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi yakni tuntutan otonomi daerah dan pemberdayaan petani. Disamping itu dihadapkan pada tantangan untuk mengantisipasi perubahan tatanan dunia yang mengarah pada globalisasi dunia. Oleh karena itu pembangunan pertanian tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi namun juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga tantangan tersebut menjadi sebuah kerja keras apabila menginginkan pertanian kita dapat menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi motor penggerak pembangunan.

Jawaban dari berbagai kelemahan pembangunan pertanian yang selama ini dilakukan maka pemerintah pada kurun waktu 2001-2004 menetapkan visi

pembangunan pertanian yakni terwujudnya masyarakat yang sejahtera khususnya petani melalui pembangunan sistem agribisnis dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistik. Pengenalan sistem agribisnis didasari pada berbagai kelemahan sistem parsial yang dahulu digunakan. Panca usaha tani merupakan contoh keparsialan pendekatan pembangunan pertanian di negara kita. Ketimpangan subsisten pertanian dengan pendekatan agribisnis ini diharapkan tidak terjadi. Sehingga diperlukan sebuah model pembangunan dengan pendekatan yang lebih multidimensional.

Pembangunan sendiri berisi tentang perubahan dan pertumbuhan. Perubahan merupakan perubahan sosial/SDM sementara pertumbuhan merupakan peningkatan tingkat ekonomi masyarakat. Todaro (2004) mengemukakan bahwa:

'development is multidimensional process involving the reorganizations and reorientation of entire economic and social system. In addition to improvement of income and output it typically involves, radical, change in institutional, social and administrative, structures as well as in popular attitudes and, in many cases, even customs and beliefs'.

(Pembangunan adalah proses multidimensional yang menyertakan reorientasi dan reorganisasi dari keseluruhan ekonomi dan sistem sosial. Sebagai tambahan terhadap peningkatan pendapatan dan pengeluaran tersebut secara khas melibatkan, radikal, perubahan di (dalam) kelembagaan, sosial dan administratif, struktur seperti halnya sikap populer dan, dalam banyak kasus, bahkan kebiasaan dan kepercayaan).

Pembangunan merupakan konsep yang tersusun dan terencana secara sistematis, yang bertujuan untuk menciptakan suasana dan sistem baru. Sistem itulah yang kemudian akan memberikan kondisi bagi berkembangnya tata nilai dalam kehidupan masyarakat.

Masalah mendasar pembangunan yang ditandai oleh tantangan internal dan eksternal yaitu kesenjangan antar daerah, antar sektor ekonomi, dan kesenjangan antar manusia atau golongan. Sedangkan masalah khusus ditandai oleh bencana alam yang mengganggu musim tanam dan panen yang datang bersamaan dengan krisis moneter. Krisis moneter ditandai dengan melemahnya nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing terutama Dollar Amerika Serikat. Sementara itu krisis ekonomi ditandai dengan menurunnya produktifitas kinerja ekonomi. Krisis moneter secara langsung dapat menyebabkan krisis ekonomi, karena harga barang kebutuhan naik sedangkan

pendapatan masyarakat cenderung menurun, hal inilah yang menyebabkan daya beli masyarakat rendah.

Sesungguhnya masalah mendasar pembangunan merupakan masalah kronis yang telah ada sejak PELITA I. Tantangan internal kesenjangan tersebut memunculkan berbagai masalah seperti, pengangguran, kemiskinan, ketertinggalan bagi sekelompok masyarakat yang kondisinya sangat rentan dengan dampak krisis.

Kelompok masyarakat miskin yang rentan krisis merupakan dampak dari kesenjangan antar golongan yang terjadi karena tidak semua pelaku ekonomi dapat berperan serta aktif dalam proses pembangunan dan tidak setiap penduduk dapat menikmati peningkatan pendapatan dari hasil pembangunan. Mereka adalah pelaku ekonomi tertinggal yang tidak mempunyai akses ke sumber daya ekonomi terutama modal, sumber daya alam, teknologi, kesehatan, dan pendidikan.

Suyono (2003) mengemukakan bahwa upaya pembangunan bertahap dan berkelanjutan di masa lalu telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari sekitar 60 % pada awal tahun 1970-an menjadi sekitar 11 % pada akhir tahun 1996. Pada tahun 1990-an penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin makin lambat. Pada awal krisis tahun 1997-1998 jumlah dan persentase penduduk miskin itu meningkat kembali. Menurut BPS pada tahun 1998 jumlah penduduk miskin sempat melonjak menjadi 49,5 juta atau 24 % dengan intervensi yang gegap gempita oleh berbagai kalangan jumlah itu menurun kembali pada tahun 2000 menjadi 33,2 juta atau 16,07 %.

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara yang sedang berkembang. Salah satu hal yang menyebabkan karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk mengakses sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang rendah sehingga produktifitasnya yang dihasilkannya juga rendah. Produktifitas yang rendah menyebabkan penghasilan yang rendah dan akhirnya terjadi kemiskinan kembali.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa secara umum kehidupan para petani memang sangat miskin dan rentan terhadap gejolak sekecil apapun yang menimpa mereka (Noertjahyo, 2005: 13). Pengamatan R.H. Tawney tentang petani China hampir setengah abad yang lalu rasanya masih pas untuk

menggambarkan tingkat kehidupan dan nasib petani kita. Seperti yang dikutip Scott (1981: 1), R.H. Tawney menggambarkan:

"....Ada daerah-daerah di mana posisi penduduk pedesaan ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup untuk menenggelamkannya..."

Keterkungkungan petani dalam lembah kemiskinan bukanlah kisah baru yang didramatisir secara spekulatif, namun sebagai realitas kehidupan (Noertjahyo, 2005: 14). Pelukisan gambaran nasib petani di atas sangat cocok dengan fakta yang ada, karena sebagian besar petani di negara kita sebenarnya termasuk kelompok buruh tani dan petani gurem (*peasants*, not *farmers*).

Soekartawi (1996) berpendapat bahwa seseorang dikatakan miskin kalau kebutuhan dasar tentang material, mental spiritual, dan sosialnya belum tercukupi. Ciri-cirinya ialah bila ia mempunyai keterbatasan penghasilan, pemikiran, keterampilan, pendidikan, penghayatan kesusilaan, hubungan sosial dalam lingkungan sekitarnya dan hubungan sosial dalam masyarakat yang lebih sosial.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Soekanto (1990) bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Menurut Mubyarto (1994) masih banyak jumlah orang miskin di Indonesia diduga disebabkan oleh karena adanya beberapa faktor yaitu faktor obyektif dan faktor subyektif. Faktor obyektif penyebab kemiskinan adalah hal-hal yang secara nyata (obyektif) mengakibatkan munculnya kemiskinan yaitu:

1. Sempitnya lahan pertanian.
2. Berlangsungnya sistem penguasaan tanah yang kurang berimbang.
3. Kurang memadainya pengetahuan dan keterampilan baik dalam tingkat maupun jenisnya.
4. Lingkungan sosial budaya yang mengakibatkan kurang tingginya hasrat untuk lebih maju dalam kehidupan duniawi.
5. Tidak atau kurang adanya alternatif mata pencaharian selain yang dijalani.
6. Sulitnya sistem perkreditan yang sesuai dengan pola mata pencaharian rakyat pedesaan.

7. Kuatnya kedudukan monopoli dan monopsoni yang dihadapi oleh para petani dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan.
8. Tempat pemukiman yang terisolasi.
9. Adanya pejabat-pejabat dan petugas-petugas pemerintah yang kurang menyadari akan fungsinya sebagai pelayan rakyat.

Sedangkan faktor subyektif kemiskinan adalah adanya kelompok yang demi kepentingan pribadi berbuat hal-hal yang berdampak memiskinkan atau minimal menghalang-halangi rakyat yang bersangkutan untuk maju, misalnya penggusuran tanah rakyat yang luasnya pas-pasan, penggusuran pedagang kecil, pencaplokan oleh pengusaha besar terhadap perusahaan rakyat yang merupakan sumber mata pencaharian bagi rakyat yang bersangkutan.

Mubyarto (1994) mengatakan bahwa upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai macam program pembangunan. Kita sering mendengar program-program yang ditujukan bagi petani atau warga desa seperti KIK, KCK, Supra Insus, KUK, P4K dan KUD.

Berkaitan dengan program pemerintah tersebut, salah satunya adalah P4K kepanjangan dari Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil. Tujuan proyek P4K adalah mengembangkan sistem partisipatif dan berkelanjutan untuk membantu keluarga miskin di pedesaan sehingga mereka mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Sistem partisipatif dan berkelanjutan tersebut dimaksudkan untuk memberlakukan suatu mekanisme yang mantap, mapan, dan langgeng bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui penumbuhkembangan kelompok-kelompok swadaya yang berasal dari rumah tangga miskin dan penumbuhkembangan usaha-usaha mikro yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga.

Program ini diselenggarakan oleh Departemen Pertanian sejak PELITA III (sekitar tahun 1979/1980). Melalui proyek P4K ini petani dan nelayan kecil yang hidup dibawah garis kemiskinan diberdayakan, agar pada saatnya nanti bisa keluar dari garis kemiskinan. Selain itu proyek P4K ini berusaha membantu petani nelayan kecil (PNK) sehingga mereka mampu menolong diri dan keluarga mereka sendiri. P4K membantu petani nelayan kecil tanpa menciptakan ketergantungan mereka kepada P4K atau pihak lain. Mereka meyakini bahwa pada saatnya PNK

dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri, sanggup mengambil keputusan sendiri tentang segala hal yang menyangkut kehidupan mereka. Salah satu peran sukses program P4K dalam memberdayakan ekonomi rakyat adalah seperti apa yang terjadi di Pacitan yang digambarkan oleh Mubyarto (2005: 95) sebagai berikut:

One succesful activity in Pacitan was the Development of Ekonomi Rakyat through the P4K (Credit program for the small farmers and fishermen) that provided micro credit through BRI. The total credit allocated to 822 KPK (small groups of farmers and fishermen) has reached Rp. 2.3 billion. A provincial evaluation put Pacitan at the fourth place with only 0.4 percent non performing loan. The P4K project assisted by IFAD (International Fund for Agricultural Development) and the ADB has been reported as one of the most succesful in the country's agricultural and rural development.

(Salah satu aktifitas yang sukses di Pacitan dalam pembangunan ekonomi rakyat melalui P4K (Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil) yang menyediakan kredit melalui BRI. Jumlah kredit dialokasikan kepada 822 KPK (Kelompok Petani-Nelayan Kecil) telah mencapai 2,3 milyar. Sebuah evaluasi provinsi menempatkan Pacitan pada tempat ke-4 dengan hanya 0,4 persen pinjaman tanpa agunan. Proyek P4K ditugaskan oleh IFAD (Pendanaan Internasional untuk Pembangunan Pertanian) dan ADB (Bank Pembangunan Asia) telah melaporkan sebagai salah satu dari yang tersukses dari pembangunan pertanian dan pedesaan di negara ini).

Upaya untuk dapat mencapai kemandirian sesuai harapan P4K seperti itu diperlukan proses pemberdayaan yang berkesinambungan, tahap demi tahap, sesuai perkembangan mental, kematangan berfikir, dan kepercayaan diri para petani nelayan kecil. Mereka didorong untuk belajar dan bekerjasama membangun usaha melalui kegiatan kelompok yang disebut kelompok petani nelayan kecil (KPK). Di dalam kegiatan kelompok itulah dikembangkan keterampilan, pelatihan, termasuk pelayanan keuangan mikro, guna mengubah struktur perekonomiannya ke arah yang lebih berimbang dan berkelanjutan. Proses pemberdayaan ini sejak awal menjamin peran serta aktif mereka sebagai pelaku utama perubahan atas diri mereka.

Hal penting yang berhubungan dengan pemberdayaan PNK adalah adanya tenaga penyuluh. Peran penyuluh diharapkan dapat berkontribusi dalam menunjang keberhasilan program ini, dengan berperan sebagai fasilitator pembangunan masyarakat. Peran penyuluh sebagai pendamping bagi KPK

diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian bagi KPK binaan P4K. Tenaga penyuluh dapat berasal dari wilayah lokal setempat (dari tokoh masyarakat dan dinas pertanian) dan dapat berasal dari luar wilayah (dari LSM dan perguruan tinggi) sepanjang memenuhi kriteria penyuluh.

Para petani pada umumnya banyak yang beranggapan bahwa peran seorang penyuluh kurang penting karena selama tidak ada bukti yang nyata tentang keberadaan seorang penyuluh. Selain itu para petani jika ada penyuluh mereka beranggapan negatif terlebih dahulu dengan mengira penyuluh adalah petugas penarik pajak. Hal ini lah yang selama ini tertanam dalam pikiran para petani terlebih para petani yang kolot.

Menurut Soedarmanto (2003) penyelenggaraan penyuluhan dalam pembangunan pertanian, yang bergerak dengan cepat menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan diakibatkan oleh adanya perubahan lingkungan sosial ekonomi nasional maupun global yang dinamis, antara lain dalam bentuk:

1. Perubahan orientasi pembangunan pertanian ke arah penerapan pendekatan agribisnis.
2. Meningkatnya peranan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Pelaksanaan desentralisasi yang mengarah kepada pelaksanaan otonomi daerah tingkat II.

Melalui program P4K ini diharapkan anggapan petani tentang petugas penyuluhan pertanian sebagai salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku petani dapat berubah dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif adalah tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat dalam membantu masyarakat miskin, artinya pelaksanaan program P4K ada pengaruh timbal balik antara petani dan penyuluh pertanian. Hal ini berkaitan dengan upaya mewujudkan kemandirian KPK.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk membentuk sebuah gabungan KPK diperlukan persyaratan salah satunya adalah mengetahui seberapa baik pengetahuan anggota KPK tentang pengenalan gabungan KPK dan mengetahui persepsinya tentang Dinamika dan Kerjasama gabungan KPK. Karena peneliti melihat fenomena di lapangan ada

beberapa KPK yang memiliki usaha yang sejenis akan tetapi belum membentuk gabungan KPK, karena dengan terbentuknya gabungan KPK akan memudahkan untuk mendapatkan akses yang lebih besar apabila memerlukan bantuan baik dari pemerintah maupun swasta.

Indikator kemajuan suatu KPK tidak hanya ditunjukkan dengan kemandirian dalam hal material akan tetapi juga dalam hal imaterial yakni kemandirian dan kemampuan membentuk gabungan kelompok untuk mengatasi masalah secara bersama-sama, sehingga diperlukan pembinaan berkelanjutan dan partisipatif untuk menumbuhkembangkan KPK-KPK menjadi Gabungan KPK atau bahkan menjadi koperasi. Proses ini tentu saja perlu pendampingan secara partisipatif oleh penyuluh pertanian dengan paradigma baru dalam penyuluhan pertanian.

Berdasarkan fenomena awal di lapangan di atas. Diantara masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sehubungan dalam program P4K di lapangan, peneliti mengidentifikasi masalah Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Pengenalan gabungan KPK dan persepsinya tentang Dinamika dan Kerjasama gabungan KPK merupakan masalah urgen dan krusial yang harus diketahui.

SKK adalah kompetensi-kompetensi kerja yang dituntut oleh suatu jabatan yang ada di dalam suatu unit kerja suatu organisasi (KPK misalnya), sedangkan AKK adalah kompetensi yang dicapai berbanding dengan SKK (Standard Kompetensi Kerja). Diskrepansi Kompetensi Kerja (DKK) adalah selisih antara SKK dengan AKK.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Aktual Kompetensi Kerja (AKK) tentang Pengenalan Gabungan KPK yang dicapai KPK Kenanga dan Sidodadi di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang?
2. Bagaimanakah Persepsi yang dicapai KPK Kenanga dan Sidodadi tentang Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hasil akhir yang ingin dicapai dalam penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Aktual Kompetensi Kerja (AKK) tentang Pengenalan Gabungan KPK yang dicapai KPK Kenanga dan Sidodadi di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui Persepsi yang dicapai KPK Kenanga dan Sidodadi tentang Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini memiliki arti penting dan mengandung beberapa kegunaan bagi penulis sendiri baik secara teoritis maupun secara praksis. Secara praksis penelitian ini memiliki arti dan manfaat baik secara personal, institusional, serta bagi perkembangan sains dan dinamika pemberdayaan masyarakat. Paling tidak hasil akhir dari penelitian ini berupa kemampuan untuk senantiasa berfikir analitis-kritis-empiris berdasarkan logika-hipotetika-verifikatif, serta tanggap terhadap perubahan yang terjadi sehingga mampu menyeimbangkan *discrepancy* antara *das Sein* (kenyataan) dan *das Sollen* (harapan) adalah sebuah *conditio sinequanon* (hal yang mendesak) yang harus dicapai mahasiswa yang merupakan bagian integral dari *civitas academica* Universitas Brawijaya.

1.5.1 Secara teoritis penelitian ini untuk:

- a. Mengimplementasikan teori-teori pembangunan pertanian umumnya dan pemberdayaan masyarakat khususnya yang telah didapatkan selama kuliah di kampus Universitas Brawijaya.
- b. Mengembangkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan terutama mengenai arsitektur desain pemberdayaan masyarakat yang aplikatif dan relevan sesuai dengan kondisi serta masalah di masyarakat.
- c. Menggabungkan teori-teori pemberdayaan masyarakat yang didapatkan selama kuliah dengan realitas di lapangan sehingga diharapkan menghasilkan paradigma/wacana baru dalam bidang pertanian.

1.5.2 Secara praktis penelitian ini berguna untuk:

1.5.2.1 Personal

- a. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
- b. Mempersiapkan diri sebagai calon penyuluh yang profesional dalam bidang pertanian, sehingga dapat memperluas cakrawala pengetahuan pribadi penulis sebagai bekal terjun di masyarakat dan dunia pertanian.

1.5.2.2 Institusional

- a. Bagi pemerintah, sebagai salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi terkait dalam pembuatan kebijakan khususnya dalam peningkatan sumber daya manusia kelompok petani nelayan kecil (KPK).
- b. Bagi kantor BIPP, secara tidak langsung dapat berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan PPL dalam hal pengabilan tindakan yang tepat demi kemajuan KPK binaan proyek P4K.
- c. Bagi ketua KPK, bisa menambahkan standar kompetensinya sehingga ia bisa dianggap kompeten dalam memberikan pelatihan/instruksi kepada para anggotanya.
- d. Bagi KPK Gabungan, bisa memberikan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan anggota kelompok tani, dengan demikian agar lebih memberikan motivasi kepada para anggota KPK untuk meningkatkan SKK Gabungan KPK.

1.5.2.3 Perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika masyarakat

- a. Sebagai sumbangan penulis terhadap gejala perkembangan dan dinamika ilmu pengetahuan khususnya kajian tentang salah satu model pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia (SDM).
- b. Bagi mahasiswa, sebagai sumber informasi sekaligus bahan referensi kepustakaan bagi segenap mahasiswa khususnya jurusan sosial ekonomi pertanian dalam mempelajari salah satu bentuk model pemberdayaan masyarakat di pedesaan.
- c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pijakan awal meneliti tentang model-model pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM) petani di pedesaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai KPK dan P4K pernah dilakukan oleh Reni Udji Setiyowati (2006) dengan judul "*Hubungan Peran Penyuluh Pertanian dengan Kemandirian Kelompok Petani Kecil (KPK) dalam Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K)*" *Studi Kasus di Desa Bacem dan Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar*, dengan hasil ada kecenderungan hubungan yang positif antara PPL dengan kemandirian KPK, jika dalam menjalankan perannya PPL tidak menghadapi kendala, baik yang bersumber dari PPL sendiri maupun dari internal KPK dampingannya. Hubungan positif tampak pada tingkat kemandirian KPK wanita, karena pertemuan kelompok dilakukan pada siang hari, sehingga PPL dapat menjalankan perannya dengan baik. Hubungan antara peran PPL dengan kemandirian KPK pria dan KPK campuran kurang tampak, karena: (1) pada siang hari anggota KPK pria dan campuran sibuk mencari nafkah dan pertemuan dilakukan pada malam hari, sehingga PPL menghadapi kendala dalam menjalankan perannya secara optimal, (2) kondisi internal KPK seperti lemahnya kepemimpinan ketua KPK. Selain itu ada kecenderungan hubungan antara jenis KPK dengan tingkat kemandiriannya. Tingkat kemandirian KPK wanita tergolong paling tinggi (total skor 93), kemudian diikuti oleh tingkat kemandirian KPK pria yang tergolong sedang (total skor 57). Sedangkan KPK campuran memiliki tingkat kemandirian yang rendah (total skor 50).

Penelitian serupa tentang Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K) juga pernah diteliti oleh Yuanita Dwi Kurniasari (2007) dengan Judul "*Analisis Tingkat Kemampuan Ekonomi Anggota Kelompok Petani Nelayan Kecil*

(KPK) pada Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K)": Studi Kasus di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dengan hasil bahwa ketidakmampuan petani dalam pengembalian kredit P4K dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan responden dan tidak dinamisnya kelompok dalam proses pemberdayaan, sedangkan bagi kelompok petani lain yang mampu mengembalikan kredit dipengaruhi oleh keberadaan kelompok yang dinamis dengan macam usaha sampingannya. Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya tunggakan kredit P4K adalah intensitas dan frekuensi pembinaan pendampingan yang sangat kurang, lemahnya penerapan proses pemberdayaan dengan pola dan metode P4K, rendahnya pendapatan petani akibat tidak memiliki diversifikasi usaha dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya kredit P4K adalah regulasi pinjaman yang terkesan memberatkan masyarakat terutama berkenaan singkatnya waktu pengembalian, paket manajemen pemberdayaan P4K yang tidak sesuai dengan analisis studi kelayakan usaha dan seleksi penetapan kelompok sasaran.

Pada penelitian ini, penulis tidak mengarahkan pada masalah kemampuan pengembalian kredit petani pada program P4K maupun hubungan terhadap kemandirian KPK, akan tetapi lebih memfokuskan pada Sumber Daya Manusia (SDM) nya, yakni Standar Kompetensi Kerjanya untuk menunjang program P4K, namun kajian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu tersebut akan menjadi pijakan awal untuk meneliti Standard Kompetensi Kerja (SKK) yang merupakan tolok ukur kinerja gabungan kelompok petani-nelayan kecil (KPK) dalam menunjang kemajuan program peningkatan pendapatan petani nelayan kecil (P4K).

Sepengetahuan penulis kajian tentang Standard Kompetensi Kerja (SKK) dalam hubungannya terhadap KPK/P4K belum pernah diteliti, sehingga belum diketahui seberapa baik Standard Kompetensi Kerja SKK terhadap kinerja gabungan dalam program P4K. Bila hal ini diteliti, hasilnya diharapkan bermanfaat untuk mengetahui seberapa baik kinerja anggota Gabungan Kelompok Petani dan Nelayan Kecil pada Program P4K.

Berdasarkan pertimbangan di atas, penulis akan melakukan kajian dengan judul "*Analisis Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Kelompok Petani Kecil (KPK)*

Mengenai Pengenalan Gabungan KPK dan Persepsi Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK Dalam Program (P4K) ".

2.2 Penyuluhan Partisipatif Sebagai Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian

2.2.1 Latar Belakang

Penyuluhan pertanian telah memainkan peran penting dalam peningkatan produksi pertanian di Indonesia selama 1970-an sampai tahun 1980-an. BIMAS misalnya mencapai kesuksesannya dengan revolusi hijau yaitu sebuah program irigasi persawahan. Praktek yang digunakan pada penyuluhan pertanian pada waktu itu adalah sistem latihan dan kunjungan yang berdasarkan pada model alih teknologi (*Transfer of Technology*). Sistem latih kunjung (LAKU) ini terbukti sukses dalam mencapai tujuan jangka pendek dari pemerintah yang terpusat.

Namun begitu, sistem tersebut didasarkan pada prinsip menetes ke bawah (*trickle down*), dalam praksisnya mengalami kegagalan. Kelemahan sistem ini terungkap selama tahun 1980-an dimana areal yang cocok untuk produksi padi mulai berkurang. Banyak langkah yang ditempuh, namun tidak menjadikan suatu proses yang berkelanjutan. Teknologi yang dikembangkan oleh pusat-pusat penelitian diberikan kepada kontak tani andalan melalui penyuluhan pertanian dengan asumsi bahwa petani lain akan mengambil alih teknologi tersebut ketika mereka melihat bukti keberhasilannya. Namun banyak dari teknologi baru tersebut tidak sesuai dengan kondisi lokal, khususnya pada petani-petani yang miskin sumber daya. Ketika diadopsi oleh kontak tani, proses *trickle down* ini tidak berfungsi dan kesenjangan dengan petani yang miskin sumber daya malah semakin tinggi.

Masyarakat lokal tidak memiliki pengaruh atau kontrol terhadap program penelitian atau penyuluhan, dan teknologi yang tidak tepat sering dipromosikan oleh badan-badan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian juga tidak mengakomodasi kebutuhan petani, dan tidak dapat mengantisipasi keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia, secara agroekologis, sosial ekonomi, dan budaya. Penyuluhan pertanian juga tidak memperhatikan pengetahuan lokal masyarakat dan tidak merangsang masyarakat untuk menjadi inovatif dan kreatif.

Selain ketidaksesuaiannya, penyuluhan pertanian dulunya menjadi alat pendukung paket pemasukan pertanian yang dijalankan oleh pemerintah.

Penyuluhan pertanian selama ini berdasarkan proyek dan bukan aktifitas rutin atau pelayanan. Berdasarkan keadaan di atas, kebutuhan terhadap pendekatan pelayanan yang secara spesifik lokasi, berpusat pada masyarakat, dan partisipatif mulai muncul.

Pada awal tahun 1990-an pemerintah Indonesia mulai berfokus pada pemberian pelayanan penyuluhan pertanian yang terdesentralisasi untuk lebih memenuhi kebutuhan petani dan mengakomodasikan perbedaan-perbedaan di daerah. Sebuah laporan Bank Dunia pada tahun 1995 mengidentifikasi kelemahan-kelemahan penyuluhan pertanian di Indonesia. Antara lain kurangnya partisipasi masyarakat, kesalahan penempatan pada fokus penyuluhan, mekanisme dan metodologi penyuluhan yang *top down* serta kurangnya koordinasi antara sub sektor.

Hal ini menghasilkan SK baru pada tahun 1996 (SK No.54 tahun 1996, 301/Kpts/LP.120/4/96) yang mentransfer aktifitas penyuluhan pertanian dari empat dinas yang berhubungan dengan pertanian (peternakan, perikanan, pertanian, dan perkebunan) ke badan lain yang baru dibentuk yaitu Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) pada tingkat kabupaten. Surat keputusan tersebut menjelaskan penyuluhan pertanian sebagai sebuah bentuk pendidikan non formal untuk petani dan keluarganya dalam mengembangkan dinamika dan kapasitasnya dalam rangka peningkatan taraf hidup mereka dan peran mereka sebagai pelaku dan pengontrol pembangunan pertanian.

Definisi ini mengimplikasikan adanya sebuah perubahan besar pada fokus, metodologi dan peran penyuluhan pertanian. Namun tuntunan dan dukungan praktis terhadap BIPP tidak diberikan, maka kebanyakan dari penyuluhan pertanian bekerja kembali seperti semula.

Pendekatan partisipatif pada penyuluhan pertanian telah dikembangkan dan dilaksanakan oleh banyak LSM sejak tahun 1980-an, walaupun pelaksanaannya hanya terbatas pada skala kecil. Namun pendekatan baru tersebut terbukti sukses dan beberapa program pemerintah mulai mengadopsinya selama tahun 1990-an. Proyek yang didukung FAO "*Integrated Pest Management Farmer Field Schools Project*" misalnya mencapai kesuksesan dalam upayanya untuk mengurangi penggunaan pestisida dan untuk meningkatkan kesejahteraan

petani. Pengetahuan dan pengalaman petani merupakan tiang utama pendekatan proyek tersebut.

Berdasarkan UU No.22 dan UU No.25 tahun 1999 tentang desentralisasi di Indonesia, Departemen Pertanian dalam Paradigma Penyuluhan Pertanian Abad ke-21 (1999) mencita-citakan penyuluhan pertanian yang berfokus ada pemberdayaan masyarakat pedesaan dari pada alih teknologi. Penyuluhan pertanian partisipatif adalah ciri dari desentralisasi dan dapat memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan dan dalam sistem perencanaan *bottom up*.

Empat tiang utama dari paradigma tersebut adalah:

1. Reorientasi Penyuluhan Pertanian: dari orientasi *top down* ke sistem perencanaan *bottom up*; dari orientasi target komoditas ke orientasi menyeluruh dan spesifik lokasi, serta dari petani sebagai obyek ke petani sebagai subyek pembangunan pertanian.
2. Reposisi penyuluh: dari perannya sebagai saluran teknologi baru ke fungsi sebagai fasilitator proses partisipatif dan sebagai konsultan pada tingkat masyarakat.
3. Reorganisasi Balai Penyuluhan Pertanian: ke arah otonomi, profesional dan berorientasi klien.
4. Revitalisasi Kepemimpinan Petani: untuk meningkatkan peran petani sebagai ahli dan profesional, serta untuk meningkatkan kapasitas petani untuk mengembangkan kerjasama strategis dengan instansi yang terkait dan sektor swasta. Juga untuk meningkatkan kapasitas petani sebagai manajer proses pembelajaran dan penyuluhan.

Pada tanggal 11 Juni 2005 Pemerintah mencanangkan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK). Revitalisasi pertanian pada awalnya adalah sebuah kesadaran, yakni kesadaran mengenai pentingnya pertanian bagi kehidupan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kesadaran bahwa Indonesia justru akan menjadi negara besar jika mampu mendayagunakan pertaniannya.

Revitalisasi pertanian memiliki tiga pilar pengertian. pertama, pengertian revitalisasi pertanian sebagai kesadaran akan pentingnya pertanian bagi kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia; kedua, revitalisasi pertanian sebagai bentuk rumusan

harapan masa depan akan kondisi pertanian; serta ketiga, pengertian revitalisasi sebagai kebijakan dan strategi besar melakukan "revitalisasi" itu sendiri.

Revitalisasi pertanian merupakan kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting (re-vital-isasi) pertanian, perikanan dan kehutanan secara proporsional dan kontekstual. Secara proporsional pertanian memiliki arti penting dalam posisinya dengan bidang dan sektor lain dilihat dari perannya bagi kesejahteraan dan berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Arti penting secara proporsional tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadikan bidang dan sektor lain menjadi lebih tidak penting, tetapi justru menekankan keterkaitan, saling ketergantungan, dan sinergi. Arti penting juga dilihat secara kontekstual sesuai perkembangan masyarakat. Pertanian tidak dipentingkan melulu karena pertimbangan masa lalu, tetapi karena pemahaman atas kondisi saat ini dan antisipasi masa depan dalam masyarakat yang mengglobal, semakin modern, dan menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Revitalisasi pertanian juga diartikan sebagai usaha, proses, dan kebijakan untuk menyegarkan kembali daya-hidup pertanian, memberdayakan kemampuannya, membangun daya saingnya, meningkatkan kinerjanya, serta menyejahterakan pelakunya, terutama petani, nelayan, dan petani-hutan; sebagai bagian dari usaha untuk menyejahterakan seluruh rakyat. Dengan pemahaman di atas, revitalisasi pertanian adalah strategi dan alat untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi pada saat yang sama juga merupakan tujuan yang harus di capai (*a mean and an end of its own*) setidaknya sebagai tujuan antara yang harus dapat diwujudkan (Krisnamurthi, 2006: 4-7).

Untuk itu, hal yang pertama dibutuhkan dalam revitalisasi keberdayaan dan kinerja pertanian adalah keyakinan bahwa Indonesia dapat menjadi negara maju, modern, sejahtera, dan terhormat dengan pertanian sebagai salah satu basis perekonomiannya. Langkah kedua, membangun paradigma pembangunan pertanian yang mantap dan berwibawa. Departemen Pertanian telah mengawali pemahaman kesisteman (sistem agribisnis) dan rakyat sebagai pelaku utama (bisnis) dalam peningkatan keberdayaan pertanian, sebagai paradigma pembangunan pertanian tahun 1990-an. Pada awal abad ke-21 ini, paradigma tersebut perlu dikuatkan kembali dengan menegaskan bahwa dalam sistem dan

peran rakyat sebagai pelaku utama tersebut memiliki tiga fokus utama pembangunan pertanian, yaitu keberdayaan petani, daya saing produk, dan kelestarian lingkungan.

Keberdayaan petani harus dapat dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan internal petani sekaligus juga membuka akses kesempatan yang lebih baik bagi petani untuk mendapatkan dukungan sumber daya produktif maupun untuk mengembangkan usaha yang lebih menyejahterakan. Penyuluhan dan pendidikan pertanian menjadi agenda operasional yang sangat penting, sehingga diperlukan paradigma baru dalam penyuluhan pertanian (Krisnamurthi, 2006: 27).

2.2.2 Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian

Paradigma baru penyuluhan pertanian merupakan tolok ukur bagi proses perkembangan reformasi dan merupakan syarat dari sebuah tuntutan pembaharuan pembangunan pertanian. Rumusan paradigma baru dari penyuluhan pertanian menjadi lebih penting dan sekaligus mengisyaratkan bahwa dalam perkembangan reformasi berikutnya sangat diperlukan kerangka pikir baru dari penyuluhan pertanian yakni mutu pola pemberdayaan masyarakat yang betul-betul reformis, demokratis, partisipatif, desentralisasi, transparan, akuntabel dan sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

Oleh karena itu, maka seluruh sub sistem yang saling berinteraksi dalam proses penyuluhan tersebut perlu diorientasikan kepada hakekat penyuluhan pertanian yang sesuai dengan tuntutan masyarakat tani.

1. *Sub-Sistem penyuluh sebagai Individu Profesional.*

Masyarakat tani sekarang makin kritis cara berfikirnya, semakin peka terhadap berbagai *issue* yang berkembang dan karena pengaruh media komunikasi yang semakin terbuka, maka tuntutan terhadap perkembangan teknologi semakin cepat. (bahwa dalam hukumnya, petani lebih pintar dari penyuluhnya). Oleh karena itu, maka ke depan masyarakat tani lebih mengharapkan adanya para penyuluh pertanian yang tidak hanya punya keahlian di bidang penyuluhan saja, tetapi juga punya keahlian dalam salah satu bidang tertentu. Jadi ke depan kita banyak memerlukan Penyuluh Pertanian Ahli, yang punya kemampuan dalam

melayani petani dengan sebaik-baiknya dan melindungi petani dalam memperjuangkan hak-haknya.

2. *Sub-Sistem Masyarakat Tani*

Tuntutan dan tantangan masyarakat tani ke depan akan lebih terbuka, petani akan lebih menuntut hak-haknya, seperti hak atas tanah, hak atas air, hak atas kebebasan menanam, hak atas benih, hak atas pupuk, hak atas modal bahkan hak atas berorganisasi. Oleh karena itu perlu ada sosialisasi yang lebih transparan kepada mereka sehubungan dengan hak-hak petani tersebut. Demikian juga dengan kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah perlu lebih mempertimbangkan hak-hak petani tersebut dan perlu ada kompromi yang lebih berorientasi kepada kepentingan petani seandainya ada program-program pemerintah yang bersinggungan dengan kepentingan petani.

3. *Sub-Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian*

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian ke depan akan berdampak dengan hak-haknya petani, oleh karena itu maka pemahaman-pemahaman terhadap peran penyuluh sebagai fasilitator, etika penyuluhan, asas netralitas dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus menjadi perhatian dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat tani kepada para penyuluh. Penyuluh tidak lagi berperan sebagai “agent” untuk kepentingan suatu lembaga atau golongan tetapi betul-betul merupakan “agent” yang berperan untuk melayani dan memberdayakan petani. Oleh karena itu perlu adanya suatu undang-undang penyuluhan pertanian yang mampu melindungi hak-haknya petani dan juga mampu melindungi para penyuluh dan lembaganya sebagai individu yang profesional (seperti halnya dokter, hakim, guru dan lain-lain) dan lembaganya yang perlu dihormati.

4. *Sub-Sistem Kelembagaan*

Sub-sistem kelembagaan petani yang dirancang ke depan merupakan kelembagaan petani yang tidak semata-mata berorientasi kepada produksi dan perkembangan dinamika sosialnya, tetapi juga punya kemampuan dalam mengelola aspek ekonomi. Hal ini perlu dipersiapkan dalam rangka menghadapi AFTA 2003 dan pasar bebas 2010, oleh karena itu peningkatan kemampuan

kelembagaan ekonomi menjadi prioritas dalam meningkatkan kompetensi para Penyuluh Pertanian.

Demikian juga dengan kelembagaan penyuluhnya, di mana pun penyuluh pertanian itu berada, kelembagaan tersebut berorientasi kepada upaya-upaya pengembangan aspek ekonomi masyarakat tani.

5.Sub-Sistem pendukung lainnya (Kebijakan Pemerintah)

Perlu adanya suatu kajian yang lebih konprehensif dan lebih mendalam terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini ada, misalnya; kebijakan tentang organisasi petani, kebijakan tentang permodalan, kebijakan tentang pajak dan lain sebagainya, apalagi dalam rangka otonomi daerah, sehingga yang berikutnya betul-betul dapat memberikan iklim yang kondusif bagi perkembangan dinamika sosial dan dinamika ekonomi masyarakat tani.

Paradigma baru yang dimaksud disini adalah implementasi terhadap kerangka pikir penyuluhan pertanian yang lebih banyak menyikapi tuntutan perkembangan di masa datang yang lebih humanistik, yang bertumpu pada keyakinan bahwa masyarakat mempunyai modal sosial dan berkemampuan untuk mendayagunakan modal tersebut sebagai dasar yang kokoh bagi efektifitas dan kelanjutan pembangunan pertanian.

2.2.3 Fokus Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian

Pertama, penyuluh pertanian masa lalu cenderung menempatkan posisi penyuluh (Pemerintah) sebagai instruktur dan pembina yang tidak lentur. Pada masa selanjutnya posisi ini jelas tidak relevan dan telah menyimpang dari filosofi penyuluhan sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat. Paradigma baru penyuluhan pertanian harus memposisikan penyuluh (Pemerintah) sebagai fasilitator yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar bebas memilih apa yang menjadi prioritas kebutuhannya. Disinilah letak pentingnya penyuluhan pertanian yang berwawasan debirokratisasi dan hal ini akan tercermin dari sikap dan peran individu para penyuluh serta kelembagaan penyuluhan itu sendiri, apakah berada pada posisi yang memberikan peluang untuk itu atau belum.

Kedua, masih ada kesan yang melekat bahwa yang dimaksud dengan partisipasi aktif adalah keterlibatan secara aktif dari masyarakat untuk

menyukseskan kepentingan pemerintah. Paradigma baru mengisyaratkan penafsiran partisipasi aktif lebih diorientasikan sejauh mana pemerintah dapat memahami keinginan-keinginan atau kebutuhan masyarakat tani. Ada beberapa alasan mengapa penyuluh (pemerintah) harus berpartisipasi kepada petani, antara lain:

- Mereka (petani) memiliki informasi yang sangat penting untuk merencanakan program di wilayahnya, baik informasi teknis maupun struktur sosial masyarakat mereka.
- Mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja sama dalam program pembangunan pertanian dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.
- Masyarakat yang demokratis secara umum menerima bahwa rakyat yang terlibat berhak berpartisipasi dalam keputusan mengenai tujuan yang ingin mereka capai.

Penyuluhan pertanian yang partisipatif adalah yang berhasil menciptakan kerjasama yang harmonis dari seluruh lapisan masyarakat dan juga dari semua pihak yang terlibat.

Peranan penyuluh pertanian tidak hanya melakukan alih teknologi dari peneliti ke petani tetapi lebih dipandang sebagai proses membantu petani untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara menolong mereka mengembangkan wawasan mengenai konsekuensi dari masing-masing pilihan itu. Petani mempunyai harapan agar para penyuluh mampu membantu memecahkan permasalahan usaha taninya, tetapi para penyuluh pun juga mengharapkan peran mereka untuk menyukseskan program-program sekalipun merugikan petani. Dengan demikian posisi penyuluh berada di tengah-tengah dan akan mengalami kesulitan jika terjadi pertentangan antara kedua kelompok ini. Beberapa studi menunjukkan bahwa penyuluh di negara maju lebih memperhatikan pendapat petani daripada atasannya, karena mereka bekerja dengan petani setiap harinya. Mereka bisa menyenangkan atasannya maupun petani tetapi jika memungkinkan maka keinginan petanilah yang memperoleh prioritas (*Van den Band dan Hawkins, 1999*).

Ketiga, penyuluh harus demokratis dan transparan (transparansi) bentuk kebijakan dan keterbukaan harus betul-betul diprioritaskan. Transparansi ini

bukan hanya berlaku antara para penyuluh dengan warga binaannya melainkan antara pihak-pihak terkait bahkan dapat diperluas ke luar agar umpan balik dan respon yang lebih variatif dan universal. Prinsip demokratis yang ideal adalah dari, oleh dan untuk masyarakat. Prinsip ini idealnya dilaksanakan mulai dari persiapan/perencanaan sampai pada tahap pengembangannya. Dewasa ini prinsip demokratis dan keterbukaan baru berfungsi pada tahap persiapan saja, yakni ketika identifikasi dan sosialisasi, sedangkan tahap selanjutnya masih ada dominasi sepihak.

Keempat, adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas yang dimaksud disini adalah bahwa pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian betul-betul manfaatnya harus dapat dirasakan oleh kedua belah pihak (Pemerintah dan Petani). Prinsip akuntabilitas ini relevan dengan tantangan yang dihadapi dewasa ini dimana ukuran keberhasilan suatu program/proyek yang melibatkan para penyuluh pertanian cenderung didominasi oleh pihak tertentu yang merasa lebih berperan dan lebih berhak. Keputusan diambil secara sepihak dan pihak-pihak lain yang terlibat dianggap sebagai obyek saja. Keputusan seperti ini jelas menandakan adanya kondisi yang rapuh akuntabilitasnya dan rendah keberhasilannya karena tidak mendapatkan dukungan dan pengikut dari berbagai pihak yang terkait.

Kelima, desentralisasi. Praktek desentralisasi ini relevan sekali dalam proses pembelajaran demokrasi yang berkaitan dengan kewenangan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan mengimplementasikan program-program pembangunan pertanian. Akan tetapi untuk menghindari timbulnya masalah pelaksanaan di masyarakat, maka perlu ada kontrol dalam bentuk kombinasi antara partisipasi dan inisiatif dari masyarakat sendiri.

Keenam, menyangkut privatisasi yaitu memberikan peluang kepada organisasi non-pemerintah atau sektor swasta. Pemerintah disini harus dikaitkan juga dengan visi pemberdayaan atau memberdayakan masyarakat dalam arti luas. Tenaga penyuluh pertanian jumlahnya sangat terbatas, hal ini disebabkan karena pemerintah tidak lagi merekrut tenaga penyuluh, banyak tenaga penyuluh yang sudah pensiun atau dipromosikan ke jabatan tertentu. Oleh karena itu perlu dikembangkan penyuluh swakarsa, yaitu penyuluh yang non-PNS yang berasal dari masyarakat. Ada beberapa pertimbangan yang menguntungkan antara lain:

- Neraca keuangan pemerintah yang semakin sulit untuk membiayai jasa layanan semacam ini.
- Penyuluh pertanian swakarsa bertanggung jawab kepada petani yang mampu menilai kualitas kerjanya yang pada gilirannya akan membuat jasa penyuluhan lebih efisien.
- Pada sejumlah negara, banyak petani ragu apakah pemerintah mampu melayani kepentingan mereka. Dalam keadaan demikian sulit bagi penyuluh pegawai negeri untuk mendapatkan kepercayaan dari petani dan tanpa kepercayaan ini mereka sedikit pengaruhnya pada petani.
- Petani adalah pewaris utama kegiatan-kegiatan jasa penyuluhan dan oleh sebab itu cukup adil bila mereka mengeluarkan biaya.

Penyuluh swakarsa mungkin bisa lebih efektif karena petani dapat memilih seorang penasehat yang paling mampu membantu. Peranan pemerintah dalam hal ini memberikan fasilitas terhadap hal-hal yang tidak mampu disediakan di luar kemampuan masyarakat seperti kebijaksanaan tentang modal, pajak serta referensi lainnya. Dengan pendekatan Penyuluhan Pertanian yang berorientasi kepada paradigma baru, diharapkan Penyuluhan Pertanian mampu mengembangkan sumberdaya manusia (Petani) dan kelembagaannya sehingga mempunyai daya saing yang tinggi serta posisi tawar (*Bargaining Position* Petani), baik dalam aspek usaha maupun peranannya dalam menentukan *Public Policy*. Hal ini seiring dengan arah baru pembangunan nasional, yaitu (1) Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, (2) Pemantapan otonomi dan desentralisasi melalui pendelegasian wewenang kepada masyarakat dan aparat daerah untuk melaksanakan program pembangunan, serta (3) Pemantapan perubahan struktur masyarakat melalui penetapan teknologi baru yang dilakukan melalui peningkatan kegiatan sosial ekonomi produktif yang berorientasi kepada pembangunan yang berkelanjutan. Berkaitan dengan arah baru tersebut, pembangunan pertanian dimasa mendatang harus lebih diarahkan pada upaya menciptakan sektor pertanian yang mandiri dan berdaulat, menggantikan sektor pertanian yang rapuh dan terpuruk dalam berbagai sub-sektor yang masing-masing berdiri sendiri (Daniel, 2006: 59-67).

2.3 Standar Kompetensi Kerja (SKK)

2.3.1 Pengertian Standard Kompetensi

Pendidikan (diklat) berbasis kompetensi menitikberatkan pada kemampuan untuk melakukan kemampuan (kompetensi) tugas-tugas tertentu yang sesuai dengan standar performansi (penampilan) yang telah ditetapkan.

Rumusan ini menunjukkan bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu agar mampu melakukan perangkat kompetensi standar yang diperlukan. Suatu program pendidikan masyarakat berbasis kompetensi harus mengandung empat unsur pokok, yaitu:

- 1) Pemilihan kompetensi yang sesuai.
- 2) Spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi.
- 3) Pengembangan sistem pengajaran/diklat
- 4) Penilaian/evaluasi.

Kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Kegiatan pembelajaran mengembangkan kemampuan untuk mengetahui, memahami, melakukan sesuatu, hidup dalam kebersamaan dan mengaktualisasikan diri. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran perlu: 1) berpusat pada peserta didik; 2) mengembangkan kreatifitas peserta didik; 3) menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang; 4) bermuatan, nilai, etika, estetika, logika, dan 5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam.

Dalam kerangka itu, pengembangan program dilakukan berdasarkan pendekatan kompetensi. Penggunaan pendekatan ini memungkinkan desain program dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat. Hasil-hasil pembelajaran dinilai dan dijadikan umpan balik untuk mengadakan perubahan terhadap tujuan pembelajaran dan prosedur pembelajaran yang dilaksanakan sebelumnya (Majid, 2007: 24).

2.3.2 Standard Kompetensi Kerja (SKK) dalam Konsep CBT

Kompetensi-kompetensi kerja yang dituntut oleh jabatan yang ada di dalam unit kerja suatu organisasi disebut Standar Kompetensi Kerja (SKK). SKK

adalah jenis-jenis kompetensi kerja yang harus dikuasai oleh seorang pejabat atau petugas yang menduduki jabatan atau diberi tugas melaksanakan pekerjaan tertentu agar ia dapat berprestasi baik dalam jabatannya atau pelaksanaan tugasnya. Program diklat yang dikembangkan dengan maksud untuk mempersiapkan pejabat atau petugas agar memiliki SKK yang dipersyaratkan oleh jabatannya atau tugas pekerjaannya disebut program Diklat Berbasis Kompetensi Kerja (CBT) (Anonymous, 2003). Dalam hal ini diharapkan SKK yang dimiliki oleh gabungan Kelompok tani dapat ditingkatkan sehingga kinerja anggota kelompok tani sudah sesuai dengan analisis kebutuhannya.

Diklat Gabungan KPK adalah proses belajar mengajar bagi calon wirausahawan bidang pertanian yang dilaksanakan untuk mencapai kualifikasi dan persyaratan kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK), agar dapat dilaksanakan peran dan fungsinya dengan baik.

Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan gabungan KPK adalah suatu kemampuan kerja untuk membentuk sebuah wadah organisasi yang lebih besar sebagai persyaratan untuk mendapatkan akses yang lebih besar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama-tama mengetahui Analisis Kebutuhan Latihan (AKL). Analisis Kebutuhan Latihan (AKL) adalah kegiatan yang meliputi Analisis Pekerjaan (AP) dan Identifikasi Kebutuhan Latihan (IKL). Identifikasi Kebutuhan Latihan (IKL) yaitu kegiatan memilih kekurangmampuan kerja yang bisa ditingkatkan melalui diklat.

Ada 3 kondisi dimana seseorang memerlukan diklat yaitu:

1. Bila seseorang tidak dapat mengerjakan pekerjaan atau tugasnya sehari-hari dengan baik, baik seluruhnya maupun sebagian.
2. Bila seseorang mendapat tambahan tugas baru yang sebagian atau sama sekali asing baginya.
3. Bila seseorang ditempatkan dalam jabatan yang baru yang memerlukan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang baru.

Tiga kondisi tersebut diatas dikatakan bahwa seseorang mungkin memerlukan diklat. Dikatakan mungkin karena ada kalanya tidak memerlukan diklat. Sebenarnya mereka sudah tahu cara mengerjakan pekerjaan tersebut, hanya saja ada faktor lain yang menghambat untuk menunjukkan kompetensinya, yaitu

faktor yang sering disebut : sarana manajemen yang terdiri dari 5 M (*Man, Money, Material, Machine, and Method*).

Aspek perilaku yang dapat dikembangkan melalui diklat yaitu: aspek perilaku kognitif yaitu aspek perilaku yang terutama berhubungan dengan kemampuan mengingat sesuatu yang telah dipelajari dan kemampuan mengembangkan intelegensia. Aspek perilaku afektif yaitu aspek perilaku yang terutama berhubungan dengan sikap kejiwaan seperti kecenderungan, nilai, dan minat. Aspek perilaku psikomotor, yaitu aspek perilaku yang terutama berhubungan dengan ketrampilan gerak fisik. Hasil belajar, dalam garis besarnya dapat pula dibagi menjadi tiga bagian yaitu: hasil belajar kognitif, hasil belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor.

Kompetensi kerja seseorang ditentukan oleh interaksi antara ke tiga aspek perilaku tersebut di atas. Agar perubahan kompetensi kerja seseorang dapat dicapai dengan memuaskan, maka pengembangan program diklat seyogyanya mencakup pengembangan kompetensi yang ke tiga aspek tersebut. Ini adalah standar dari suatu pengembangan program diklat berbasis kompetensi kerja atau CBT (*Competency Based Training*).

Program Diklat berbasis kompetensi kerja (CBT) dikembangkan melalui enam tahap, yaitu:

Tahap I Analisis jabatan dan identifikasi DKK (Diskrepansi Kompetensi Kerja), Pada tahap ini ada proses IKL dan AKL, pada tahap IKL dilakukan oleh TPW (Team Pembina Wilayah) dalam struktur organisasi dilakukan oleh Tim Widyaiswara menggunakan metode questionnaire untuk memperoleh data riil tentang jumlah KPK yang telah siap menjadi gabungan KPK/LKM. Dari jumlah sekitar 14.000 KPK diperoleh 90 orang pengurus/anggota KPK yang akan dilatih menjadi persiapan gabungan KPK. Pada proses AKL, merupakan hasil dari IKL, yakni layak tidaknya hasil IKL dengan hasil ini akan berguna untuk menyusun materi sesuai kebutuhan misal 90 orang.

Tahap II Menetapkan pendidikan dan latihan (diklat). Pada proses penetapan latihan ini, diidentifikasi dari 90 orang membutuhkan materi apa saja

untuk dikembangkan, misalnya pembukuan. Dilakukan oleh Tim Widyaiswara yang berkonsultasi dengan Lembaga Keuangan Mikro.

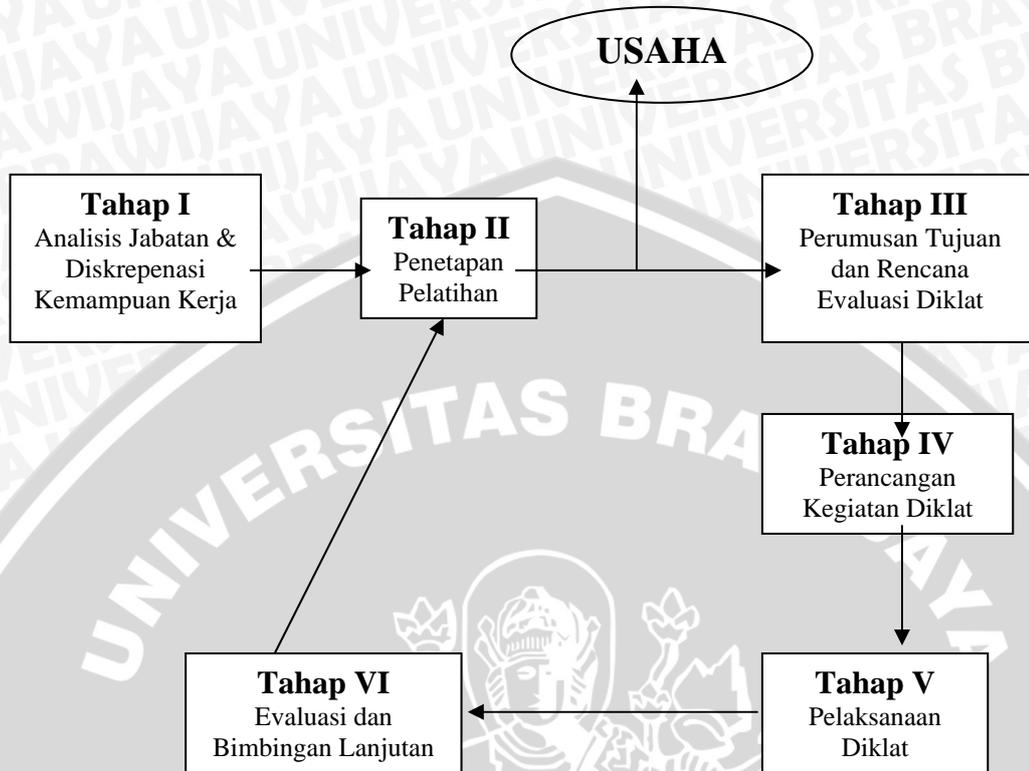
Tahap III Merumuskan Tujuan dan Rencana Evaluasi Diklat. Perumusan tujuan diperlukan untuk sebagai indikator untuk melihat kemajuan peserta didik. Sedangkan Rencana Evaluasi Diklat, merupakan alat untuk melihat kemajuan jalannya evaluasi Diklat. Pada tahap ini dilakukan/direncanakan oleh team Monev (Monitoring dan Evaluasi). Tim ini membuat evaluasi berupa *pre test* dan *post test*.

Tahap IV Merancang kegiatan belajar diklat. Pada tahap ini Tim Widyaiswara menentukan lamanya pelaksanaan diklat dan materi apa saja yang diperlukan dalam diklat. Implementasi pada tahap ini adalah membuat jadwal dan kurikulum Diklat.

Tahap V Melaksanakan Diklat. Pada tahap pelaksanaan diklat ini merupakan inti semua kegiatan diklat diantaranya mulai dari pembukaan, penyajian materi hingga penutupan maupun RTL, pada tahap ini dilakukan oleh team Widyaiswara dan team LKM yang ditunjuk.

Tahap VI Melaksanakan bimbingan lanjutan dan evaluasi lapangan diklat. Pada tahap Binjut merupakan tahap akhir dari pelaksanaan diklat, dimana setelah dievaluasi oleh team monev maupun LKM, maka diperoleh indikator KPK mana saja yang sudah dapat melaksanakan/mengerti materi yang telah diajarkan maupun yang belum, bagi yang belum maka diperlukan DKK untuk dilakukan IKL maupun AKL mengenai materi apa saja yang perlu didiklat lagi.

Ke enam tahapan tersebut dapat digambarkan dalam suatu model sebagai berikut:



Gambar 1: Model Pengembangan Diklat Berbasis Kompetensi Kerja
(Competence Based Training)

Analisis jabatan adalah langkah paling awal dari pengembangan program diklat berbasis kompetensi kerja (CBT). Analisis jabatan berada di dalam tahap I dari model pengembangan program diklat berbasis kompetensi kerja (CBT). Identifikasi DKK adalah langkah berikutnya setelah analisis jabatan. Langkah ini masih berada di dalam tahap I dari model pengembangan program Diklat Berbasis Kompetensi Kerja (CBT). DKK adalah selisih antara kompetensi kerja yang dimiliki pejabat atau petugas saat ini dengan kompetensi kerja yang dituntut oleh jabatan atau tugas pekerjaan yang ada di dalam unit organisasi.

Kompetensi-kompetensi kerja yang dimiliki pejabat atau petugas pada saat ini ditunjukkan oleh hasil-hasil kerjanya. Hasil kerja seseorang pejabat atau petugas pada saat ini merupakan indikator dari kompetensi kerja yang dimiliki pejabat atau petugas saat ini disebut Aktual Kompetensi Kerja yang disingkat dengan AKK.

Kompetensi-kompetensi kerja yang dituntut oleh jabatan yang ada di dalam unit kerja suatu organisasi disebut Standar Kompetensi Kerja (SKK). SKK adalah jenis-jenis kompetensi kerja yang harus dikuasai oleh seorang pejabat atau petugas yang menduduki jabatan atau diberi tugas melaksanakan pekerjaan tertentu agar ia dapat berprestasi baik dalam jabatannya atau pelaksanaan tugasnya. Program diklat yang dikembangkan dengan maksud untuk mempersiapkan pejabat atau petugas agar memiliki SKK yang dipersyaratkan oleh jabatannya atau tugas pekerjaannya disebut program Diklat Berbasis Kompetensi Kerja (CBT) (Anonymous, 2003).

2.4 Dinamika Gabungan Kelompok Petani Nelayan Kecil (KPK)

2.4.1 Pengertian Gabungan KPK

- Gabungan KPK merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan (integral) dalam sistem pemberdayaan KPK, khususnya untuk menjamin keberlanjutan manfaat yang diterima oleh anggota KPK.
- Gabungan KPK adalah kelompok lanjutan yang dibentuk dari beberapa KPK yang layak di tingkat perdesaan, bersifat informal, sukarela dan swadaya atas dasar kesepakatan dan kepentingan bersama.
- Gabungan KPK berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi dan jasa dalam rangka memberikan pelayanan dan manfaat bagi anggotanya.

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Pembentukan Gabungan KPK

1. Tujuan

Pembentukan Gabungan KPK bertujuan untuk memberikan pelayanan dan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan bagi anggota KPK dalam meningkatkan kesejahteraannya, yang meliputi :

- a. Peningkatan modal usaha
- b. Peningkatan skala usaha dan pemasaran produk
- c. Peningkatan dinamika antar anggota
- d. Peningkatan fasilitasi kegiatan belajar mengajar.

2. Manfaat

- a. Memberi kemudahan bagi anggota KPK untuk:
 - 1) Memperoleh sarana produksi
 - 2) Memperoleh modal yang lebih besar
 - 3) Memperbesar skala usaha secara efisien
 - 4) Memperlancar dan memperluas pemasaran produknya
 - 5) Memperoleh informasi yang dibutuhkan
 - 6) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- b. Sebagai wahana belajar bagi anggota KPK dalam pengembangan kelembagaan petani yang lebih dinamis, demokratis dan partisipatif.
- c. Memberi kemudahan bagi masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

2.4.3 Keorganisasian

1. Perangkat Organisasi

e. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi pada Gabungan KPK, diantaranya memilih dan memberhentikan Pengurus, Pengawas, penambahan anggota, pengesahan program dan evaluasi pengembangan pengelolaan Gabungan KPK dan hal lain yang perlu kesepakatan anggota. Rapat Anggota merupakan forum pertemuan yang dihadiri oleh seluruh Anggota, dan setiap Anggota memiliki hak suara yang sama.

f. Tim Manajemen Gabungan KPK

Tim Manajemen Gabungan KPK terdiri atas Pengurus dan Pengawas

1. Pengurus

Pengurus Gabungan KPK minimal terdiri dari: (a) Ketua, (b) Sekretaris, dan (c) Bendahara. Apabila diperlukan, dapat

ditambah wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara, dan seksi-seksi pelayanan yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis-jenis pelayanan yang diperlukan oleh anggota. Masa tugas Pengurus ditentukan berdasarkan kesepakatan pada RAT yang dituangkan dalam AD/ART. Pengurus Gabungan KPK tidak boleh dirangkap oleh Pengurus KPK yang bergabung. Pengurus KPK yang terpilih menjadi Pengurus Gabungan KPK diberi kesempatan untuk menyiapkan penggantinya sebagai Pengurus KPK paling lama 6 bulan.

Tugas untuk masing-masing Pengurus tersebut adalah sebagai berikut:

(a) Ketua

Tugas:

Mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Gabungan KPK, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Memimpin rapat pengurus, rapat pengurus dan perwakilan KPK dan rapat anggota tahunan (RAT).
- (2) Menanda tangani surat menyurat dan surat berharga lainnya.
- (3) Mewakili Gabungan KPK dalam pertemuan dengan pihak lain.
- (4) Memimpin pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen Gabungan KPK.

(b) Sekretaris

Tugas:

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi kegiatan non keuangan Gabungan KPK, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Membuat dan memelihara notulen rapat dan berita acara.
- (2) Membuat undangan rapat.
- (3) Menyelenggarakan surat-menyurat dan pengarsipannya.
- (4) Menyelenggarakan administrasi non keuangan Gabungan KPK yang diperlukan.
- (5) Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan kegiatan non keuangan Gabungan KPK.

(c) Bendahara

Tugas :

Bertanggung jawab menangani seluruh kegiatan administrasi keuangan Gabungan KPK, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Menerima pembayaran atas nama Gabungan KPK dan menyimpannya dengan baik.
- (2) Melakukan pembayaran atas persetujuan Ketua Gabungan KPK.
- (3) Menyimpan dan memelihara arsip transaksi keuangan.
- (4) Menyelenggarakan dan memelihara administrasi keuangan Gabungan KPK.
- (5) Menyusun laporan bulanan dan laporan tahunan keuangan Gabungan KPK.

(d) Seksi Pelayanan

Tugas :

Seksi pelayanan bertanggung jawab melayani dan memfasilitasi keperluan anggota sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan. Tugas tersebut meliputi:

- (1) Menyelenggarakan fungsi-fungsi manajemen sesuai bidang pelayanan yang ditangani.
- (2) Membuat dan mempertanggungjawabkan laporan bulanan dan laporan tahunan sesuai bidang pelayanannya pada rapat pengurus.

2. Pengawas

Pengawas Gabungan KPK dibentuk sesuai dengan perkembangan aktivitas Gabungan KPK dan berbentuk tim yang terdiri atas seorang ketua dan dua orang anggota. Pengawas ini dipilih dari dan oleh anggota Gabungan KPK yang bersangkutan dengan pertimbangan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya.

Tugas:

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kehidupan Gabungan KPK mulai dari organisasi, perkembangan usaha, dan kegiatan lainnya.
- b) Memberikan saran perbaikan kepada pengurus apabila ada hal-hal yang ditemukan kurang benar dan kurang baik.
- c) Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya pada RAT.

2. Penasehat

Penasehat Gabungan KPK dibentuk sesuai dengan perkembangan aktivitas dan bukan merupakan bagian dari tim manajemen Gabungan KPK. Penasehat Gabungan KPK berbentuk tim yang terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang. Tim penasehat ini berasal dari luar Gabungan KPK dengan unsur-unsur antara lain: aparat desa, tokoh masyarakat, pembina Gabungan KPK dan lain-lain yang dipilih oleh Gabungan KPK berdasarkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas berikut.

Tugas:

Memberikan saran dan nasehat kepada Pengurus Gabungan KPK baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus.

3. Keanggotaan dan Perwakilan KPK

a) Keanggotaan

Anggota Gabungan KPK adalah KPK beserta seluruh anggotanya yang bersepakat dan memenuhi syarat untuk bergabung. KPK dimaksud adalah KPK yang masih memperoleh pelayanan P4K atau KPK yang sudah graduasi. Jumlah anggota Gabungan KPK berkisar antara 3-20 KPK.

Gabungan KPK dimungkinkan menambah jumlah anggota sepanjang memenuhi persyaratan dan disetujui dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Hak dan kewajiban anggota Gabungan KPK antara lain:

- (1) Setiap anggota Gabungan KPK mempunyai hak:
 - a) Bicara dan menyampaikan usul/saran/pendapat kepada pengurus atau RAT.
 - b) Memilih dan dipilih menjadi pengurus/tim pengawas.
 - c) Memperoleh pelayanan yang sama sesuai bidang kegiatan yang dilakukan Gabungan KPK.
 - d) Memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) dan manfaat lainnya sesuai keputusan rapat anggota.
- (2) Setiap anggota Gabungan KPK mempunyai kewajiban:
 - a) Mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
 - b) Mematuhi keputusan-keputusan rapat Pengurus dan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

- c) Hadir dan aktif pada RAT.
- d) Mentaati kebijakan Gabungan KPK dan peraturan-peraturan khusus lainnya.
- e) Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya yang sudah diputuskan RAT.
- f) Aktif memanfaatkan pelayanan yang diselenggarakan Gabungan KPK.
- g) Tanggung renteng terhadap kewajiban yang berlaku di Gabungan KPK.

b. Perwakilan KPK

Mengingat keanggotaan Gabungan KPK terdiri dari beberapa KPK, maka setiap KPK perlu menunjuk wakilnya yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi/kepentingan anggota KPK
- 2) Mencatat segala keputusan-keputusan penting pada rapat Gabungan KPK yang diikutinya
- 3) Menyampaikan hasil-hasil keputusan di tingkat Gabungan KPK kepada KPK yang diwakilinya
- 4) Menindaklanjuti hasil pembelajaran di Gabungan KPK pada KPKnya

4. Aturan

Sebagai organisasi, Gabungan KPK harus memiliki aturan agar pengelolaannya terarah menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Aturan Gabungan KPK harus dibuat secara lengkap dan tertulis yang diputuskan pada RAT. Aturan yang paling baik berbentuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Aturan tersebut meliputi:

a) **Aturan Dasar**, yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nama, Tempat dan Wilayah Kerja.
- 2) Azas dan Tujuan
- 3) Usaha dan Kegiatan
- 4) Keanggotaan
- 5) Rapat Anggota
- 6) Pengurus
- 7) Modal
- 8) Sisa Hasil Usaha
- 9) Perubahan Anggaran Dasar
- 10) Aturan Tambahan

b) **Aturan Khusus**, yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Nama dan Alamat
- 2) Keanggotaan
- 3) Hak dan Kewajiban Anggota
- 4) Wewenang dan Tugas Pengurus
- 5) Jabatan dan Uraian Tugas Pengurus
- 6) Pertemuan Gabungan
- 7) Perwakilan Kelompok
- 8) Sanksi

5. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan Gabungan KPK ditempuh melalui:

- a. Rapat Pengurus, yaitu pertemuan yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi tertentu (sesuai topik yang dibahas) yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Rapat Pengurus dan Perwakilan KPK, yaitu pertemuan yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi-seksi dan Perwakilan KPK yang dilaksanakan secara periodik (terjadwal) dengan materi yang telah diagendakan.

- c. Rapat Anggota Tahunan (RAT), yaitu pertemuan yang diikuti oleh pengurus, pengawas, penasehat, seluruh anggota, dan pembina Gabungan KPK dalam rangka pertanggungjawaban Pengurus dan pengawas kepada anggota yang dilaksanakan setiap akhir tahun kegiatan.

2.3.4 Pengelolaan Gabungan KPK

1. Prinsip–Prinsip Pengelolaan Gabungan KPK

Agar tujuan dan manfaat Gabungan KPK dapat dicapai, pengelolaan Gabungan KPK harus menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

g. KEPENTINGAN BERSAMA

Gabungan KPK dibentuk atas dasar adanya kepentingan yang sama atau saling melengkapi dan tujuan yang sama dari seluruh anggota KPK yang bergabung.

h. KETERBUKAAN

Seluruh anggota mengetahui setiap perkembangan yang terjadi dalam pengelolaannya.

i. KESWADAYAAN

Gabungan KPK dikelola berdasarkan kemauan dan kemampuan anggota.

j. KEMANDIRIAN

Gabungan KPK dikembangkan ke arah lembaga yang tidak selalu tergantung kepada pihak lain.

k. BERKESINAMBUNGAN

Pelayanan yang diberikan Gabungan KPK kepada anggotanya dilaksanakan secara bertahap dan terus-menerus.

l. KERJASAMA

Gabungan KPK harus menjadi media yang mampu menumbuhkembangkan kegiatan bagi para anggotanya untuk saling menolong dan membantu dalam upaya pengembangan usahanya.

2. Rencana Kerja

Agar Gabungan KPK dapat dikelola dengan baik, perlu disusun Rencana Kerja Gabungan KPK yang mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja tersebut disusun segera setelah Gabungan KPK terbentuk. Apabila diperlukan Pembina Gabungan KPK dapat memfasilitasi proses penyusunannya.

3. Pengorganisasian

Agar pengelolaan Gabungan KPK berjalan dengan baik, perlu ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas dan lengkap untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

4. Kegiatan Gabungan KPK

Kegiatan yang dilakukan oleh Gabungan KPK meliputi :

a. Pelayanan Ekonomi

Pelayanan ekonomi merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Gabungan KPK untuk melayani kebutuhan anggota. Kegiatan usaha ini terdiri dari usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam. Kegiatan non simpan pinjam misalnya pengadaan sarana produksi yang diperlukan oleh anggota dan pemasaran produk anggota.

b. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial merupakan kegiatan Gabungan KPK non usaha yang arahnya untuk meningkatkan dinamika dan rasa kepedulian sosial antar sesama anggota Gabungan KPK maupun terhadap masyarakat sekitar, seperti arisan, pelatihan bagi anggota, pelayanan jasa teknis dan kegiatan sosial masyarakat lainnya.

c. Administrasi

Kegiatan administrasi merupakan kegiatan pendukung dari pelayanan ekonomi dan sosial diatas yang terdiri dari administrasi keuangan dan non keuangan.

5. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan

Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Gabungan KPK, termasuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh anggota, pengurus dan pengawas Gabungan KPK secara partisipatif dan bersifat membangun.

Sedangkan pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengurus Gabungan KPK terhadap pengelolaan Gabungan KPK. Pelaporan ini dibuat secara tertulis, disampaikan pada setiap rapat Pengurus dan Perwakilan KPK serta Rapat Anggota Tahunan (RAT).

2.4.5 Kriteria Gabungan KPK yang Aktif dan Sehat

Kriteria Gabungan KPK yang aktif dan sehat adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai tujuan yang jelas, terukur dan tertulis.
2. Mempunyai Organisasi Gabungan KPK yang baik, dengan ciri:
 - a. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi dan berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
 - b. Ada rotasi kepengurusan.
 - c. Mempunyai Pengawas yang berperan sesuai dengan tupoksinya.
 - d. Mempunyai aturan yang disepakati dan ditaati oleh anggota.
 - e. Melaksanakan rapat rutin dalam rangka pengelolaan organisasi Gabungan KPK.
 - f. Melaksanakan pertemuan secara terjadwal dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan Gabungan KPK.
3. Mempunyai rencana kerja secara tertulis, yang disepakati dan dijalankan.
4. Mempunyai Kegiatan usaha yang berkembang baik, dengan ciri:

- a. Jenis usahanya terdiri dari usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam.
 - b. Pelayanan dilakukan secara harian.
 - c. Semua anggota melaksanakan simpanan wajib secara teratur.
 - d. Jumlah anggota Gabungan KPK yang mempunyai simpanan sukarela lebih dari 50%.
 - e. Simpanan sukarela diberikan jasa yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.
 - f. Jumlah anggota Gabungan KPK yang meminjam lebih dari 50%.
 - g. Jumlah anggota KPK yang menunggak $< 1\%$ dari jumlah anggota yang meminjam.
 - h. Nilai tunggakan maksimal 0,5% dari total pinjaman anggota.
 - i. Sisa Hasil Usaha (SHU) selalu meningkat setiap tahun.
 - j. Minimal 50% dari Sisa Hasil Usaha (SHU) tidak dibagikan kepada anggota.
5. Mempunyai administrasi keuangan dan non keuangan yang baik yaitu lengkap, tertib, teratur dan benar.
 6. Mempunyai kemitraan usaha yang baik, dengan ciri :
 - a. Kemitraan usaha secara tertulis dalam bentuk kontrak.
 - b. Kemitraan usaha memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak.
 - c. Kemitraan usaha terjadi terus menerus.
 7. Membuat laporan kegiatan secara tertulis, lengkap dan benar untuk disampaikan pada rapat Pengurus dan Perwakilan KPK serta Rapat Anggota Tahunan (RAT).
 8. Bermanfaat bagi anggota dan masyarakat setempat.

2.5 Penumbuhan Dan Penguatan Kapasitas Gabungan KPK

2.5.1 Proses Penumbuhan Gabungan KPK

1. Prinsip-Prinsip

a. KEFAHAMAN

Semua anggota dari setiap KPK yang akan bergabung harus terlebih dahulu memahami tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari Gabungan KPK.

b. KESUKARELAAN

Keanggotaan Gabungan KPK bersifat sukarela/atas dasar kesadaran sendiri.

c. PARTISIPATIF

Keputusan KPK yang akan bergabung harus didasarkan pada hasil musyawarah dan mufakat anggota dari setiap KPK.

d. KESWAKARSAAN

Penumbuhan Gabungan KPK harus didasarkan pada kemauan dan inisiatif (karsa) para anggota KPK yang akan bergabung. *P4K hanya memotivasi dan memfasilitasi.*

e. KETERPADUAN

Penumbuhan Gabungan KPK harus didasarkan pada keinginan untuk saling mendukung dan saling melengkapi di antara anggotanya guna memperkuat dan mengembangkan kegiatan usahanya.

2. Langkah Operasional

Proses penumbuhan Gabungan KPK dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. PP/Penyuluh Swakarsa melakukan identifikasi KPK-KPK yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 1. Minimal kelas Madya.
 2. Minimal berusia 3 tahun.

3. Memiliki jenis usaha KPK yang sama atau saling melengkapi.
 4. Berlokasi di desa yang sama.
 5. Surat pernyataan tertulis dari anggota KPK yang sepakat untuk bergabung.
- b. PP/Penyuluh Swakarsa memfasilitasi proses pembelajaran dengan materi Manfaat Gabungan KPK (Modul A1) di masing-masing KPK-KPK yang memenuhi kriteria sesuai dengan jadwal penguatan kapasitas KPK. Apabila semua anggota KPK sepakat membentuk Gabungan KPK, pada pertemuan ini sekaligus dibuat surat pernyataan tertulis tentang kesepakatan membentuk Gabungan KPK.
- c. Bila ada minimal 3 KPK beserta seluruh anggota KPKnya berkeinginan dan sepakat untuk membentuk Gabungan KPK, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) PP/Penyuluh Swakarsa perlu segera memfasilitasi pembelajaran tentang Tata Cara Membentuk Gabungan KPK menggunakan Modul A2 pada pertemuan rutin setiap KPK yang sepakat membentuk Gabungan KPK.
 - 2) PP/Penyuluh Swakarsa memfasilitasi pembelajaran tentang Merumuskan Tujuan Gabungan KPK (Modul A3) pada pertemuan rutin setiap KPK yang sepakat membentuk Gabungan KPK.
 - 3) Hasil pembelajaran Modul A3 di masing-masing KPK dibawa dalam rapat antar pengurus KPK untuk dibahas yang difasilitasi oleh PP/Penyuluh Swakarsa, untuk dirumuskan dan disepakati bersama sebagai Tujuan Gabungan KPK yang akan dibentuk. Pada rapat ini perlu ditetapkan rencana pembentukan Gabungan KPK yang berisi tanggal, tempat, dan peserta yang diundang.

- 4) Masing-masing pengurus KPK mensosialisasikan semua hasil rumusan Tujuan Gabungan KPK yang telah disepakati kepada anggota KPKnya pada pertemuan rutin KPK. Pada pertemuan ini sekaligus dipilih 3 orang calon pengurus Gabungan KPK dan seorang perwakilan KPK untuk diajukan pada rapat pembentukan Gabungan KPK.
- 5) PP memfasilitasi pertemuan pembentukan Gabungan KPK yang dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota KPK yang akan bergabung, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Koordinator PP. Setelah Gabungan KPK disepakati dibentuk, langsung dilakukan pemilihan pengurus secara demokratis. Setelah pengurus Gabungan terpilih, dilakukan peresmian terbentuknya Gabungan KPK. Peresmian pembentukan Gabungan KPK ini dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para Ketua KPK yang bergabung dan diketahui oleh Pembina KPK dan Kepala Desa/Lurah (Lampiran 1).
- 6) PP/Penyuluh Swakarsa harus segera melakukan registrasi Gabungan KPK yang sudah terbentuk dengan mengisi Buku Register Gabungan KPK (Lampiran 2) paling lambat satu minggu setelah Gabungan KPK terbentuk.

Langkah-langkah pembentukan Gabungan KPK tersebut di atas dapat diringkas sebagaimana tertera dalam matrik berikut:

Tabel 1. Matrik Ringkasan: Langkah-Langkah Proses Membentuk Gabungan KPK Secara Partisipatif

MATRIK RINGKASAN : LANGKAH - LANGKAH PROSES MEMBENTUK GABUNGAN KPK SECARA PARTISIPATIF

LANGKAH OPERASIONAL	PELAKU DAN KEGIATAN		OUTPUT
	Pengurus / Anggota KPK	PP/P Swakarsa	
1.	- Minimal 3 KPK yang sepakat membentuk Gab. KPK, pengurus dan anggota setiap KPK mengikuti proses pembelajaran partisipatif	- Memfasilitasi pembelajaran Modul A2 di masing-masing KPK	Minimal 3 KPK yang sepakat membentuk Gabungan KPK memahami tata cara membentuk Gabungan KPK
a.	-	- Identifikasi KPK-KPK yang memenuhi kriteria	Diketahui KPK-KPK yang memenuhi kriteria menjadi anggota Gabungan KPK
b.	- Pengurus dan anggota KPK mengikuti proses pembelajaran partisipatif	- Memfasilitasi pembelajaran Modul A1 di masing-masing KPK	KPK-KPK yg memenuhi kriteria: - Memahami manfaat Gab.KPK - Surat pernyataan tertulis untuk membentuk Gab. KPK setiap KPK.
2.	- Pengurus dan anggota KPK mengikuti proses pembelajaran partisipatif	- Memfasilitasi pembelajaran Modul A3 di masing-masing KPK	Rumusan Tujuan Gabungan KPK yang disepakati dari masing-masing KPK yang akan bergabung
3.	Pengurus KPK hadir dalam rapat antar Pengurus KPK untuk merumuskan dan menyepakati Tujuan Gabungan KPK yang akan dibentuk	- Memfasilitasi rapat perumusan dan kesepakatan Tujuan Gabungan KPK yang akan Dibentuk	1) Rumusan Tujuan Gabungan KPK yang akan dibentuk 2) Rencana Pembentukan Gabungan KPK
4.	Sosialisasi Tujuan Gabungan KPK oleh Pengurus KPK kepada anggota KPKnya	-	1) Anggota KPK memahami Tujuan Gabungan KPK yang akan dibentuk 2) Setiap KPK telah terpilih 3 orang Calon Pengurus Gabungan KPK dan seorang perwakilan KPK
5.	Pengurus dan anggota KPK hadir dalam pertemuan pembentukan Gabungan KPK	- Memfasilitasi pertemuan pembentukan Gabungan KPK	1) Terbentuk Gabungan KPK dan Pengurus Definitif 2) Peresmian Gabungan KPK 3) Berita Acara pembentukan Gabungan KPK
6.	-	Melakukan registrasi Gabungan KPK baru Paling lambat 1 minggu Setelah terbentuk	1) Buku Register Gabungan KPK baru

2.5.2 Proses Penguatan Kapasitas Gabungan KPK

1. Tujuan

Tujuan penguatan kapasitas Gabungan KPK adalah untuk:

- a. Meningkatkan kemampuan pengurus dalam mengoptimalkan pengelolaan organisasi Gabungan KPK menuju kemandirian yang berkelanjutan;
- b. Meningkatkan kapasitas Gabungan KPK dalam pengelolaan modal;
- c. Mengoptimalkan kemampuan Gabungan KPK dalam memberikan pelayanan teknis usaha, ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan kepada seluruh anggota, antara lain:
 - Pemilihan jenis usaha.
 - Penguatan modal.
 - Pengadaan sarana produksi.
 - Informasi teknologi terapan.
 - Pemasaran produk.
 - Kemitraan usaha dengan pihak lain.
 - Pengelolaan dana sosial.

2. Prinsip-Prinsip

a. SESUAI KEBUTUHAN

Materi penguatan kapasitas harus disesuaikan dengan kebutuhan Gabungan KPK.

b. PARTISIPATIF

Dalam proses penguatan kapasitas Gabungan KPK, setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta secara aktif.

c. BELAJAR MENEMUKAN SENDIRI (*Discovery Learning*)

Metode dan pendekatan yang dipakai dalam proses penguatan kapasitas Gabungan KPK harus dapat memotivasi pengurus dan anggota untuk belajar menemukan sendiri potensi yang mereka miliki dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanan Gabungan KPK.

d. BERKELANJUTAN

Proses penguatan kapasitas Gabungan KPK harus mampu membantu terwujudnya pelayanan Gabungan KPK kepada anggota secara terus-menerus. Dengan kata lain, proses penguatan kapasitas Gabungan KPK harus dapat mengantarkan keswadayaan dan kemandirian Gabungan KPK sehingga mampu terus berkembang atas kekuatan sendiri (*self propelling institution*).

3. Langkah Operasional

Penguatan Kapasitas Gabungan KPK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Segera setelah Gabungan KPK tumbuh, Petugas Pembina menyusun Rencana Kegiatan Penguatan Kapasitas Gabungan KPK (format RPKG).
- b. Petugas Pembina melaksanakan pendampingan penguatan kapasitas Gabungan KPK bagi pengurus, perwakilan KPK dan beberapa anggota yang dianggap perlu sesuai dengan Rencana Kegiatan Penguatan yang telah disepakati antara Petugas Pembina dengan Pengurus Gabungan KPK. Materi penguatan kapasitas Gabungan KPK terdiri atas: 7 (tujuh) kelompok, yaitu kelompok Modul B s.d. H, sedangkan kelompok Modul A diberikan kepada KPK-KPK yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Gabungan KPK (Proses Penumbuhan Gabungan KPK). Modul A s.d. H tersebut adalah sebagai berikut:

Materi Bagi KPK yang Memenuhi Syarat untuk Menjadi Anggota Gabungan KPK:

A. Pengenalan Gabungan KPK

1. Manfaat Gabungan KPK.
2. Tata Cara Membentuk Gabungan KPK.
3. Merumuskan Tujuan Gabungan KPK.

Materi Bagi Gabungan KPK

B. Mewujudkan Tujuan Gabungan KPK

1. Menyusun Rencana Kerja Gabungan KPK.
2. Merumuskan Aturan Gabungan KPK.
3. Mengevaluasi Pencapaian Tujuan Gabungan KPK.

C. Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK

1. Organisasi Dan Kelengkapan Gabungan KPK.
2. Menyelenggarakan Pertemuan Gabungan KPK.
3. Membangun Kerjasama.
4. Menyelesaikan Masalah.

D. Administrasi Gabungan KPK

1. Mengelola Administrasi Non Keuangan.
2. Mengelola Administrasi Keuangan.

E. Pengembangan Modal Gabungan KPK

1. Menggali Sumber-Sumber Modal.
2. Mengelola Dana Bersama.

F. Pengembangan Usaha Gabungan KPK

1. Memilih Jenis Usaha.
2. Mengembangkan Kemitraan Usaha.

G. Menilai Kemandirian Gabungan KPK

H. Pengembangan Gabungan KPK Menjadi Koperasi

1. Dasar-Dasar Perkoperasian.
2. Tata Cara Mendirikan Koperasi.

- c. Untuk memperkuat kapasitas Gabungan KPK yang telah terbentuk sebelum tahun 2004 (sebelum Juklak ini diterbitkan),

Petugas Pembina melakukan kegiatan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Kapasitas Gabungan KPK ini dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun dengan menggunakan Instrumen Penilaian Kapasitas Gabungan KPK (Lampiran 3) untuk mengetahui kelas Gabungan KPK yaitu:
 - a) KELAS TUMBUH;
 - b) KELAS MANTAP; atau
 - c) KELAS MANDIRI
- 2) Identifikasi Keberadaan Gabungan KPK untuk mengetahui sesuai tidaknya keadaan Gabungan KPK dengan Juklak dan sekaligus melakukan perbaikan yang mungkin dilakukan, antara lain:
 - a) Tidak boleh adanya rangkap jabatan Pengurus KPK dengan Pengurus Gabungan KPK.
 - b) Adanya perwakilan KPK.
- 3) Registrasi Gabungan KPK ke dalam Buku Register Gabungan KPK.
- 4) Memfasilitasi materi penguatan kapasitas Gabungan KPK disesuaikan dengan kebutuhan Gabungan KPK yang didasarkan pada hasil penilaian kelas Gabungan KPK, yang dilaksanakan pada saat pertemuan Pengurus dan Perwakilan KPK.

2.5.3 Pengembangan Kelembagaan Gabungan KPK

Pengembangan kelembagaan Gabungan KPK adalah proses mempersiapkan Gabungan KPK menjadi koperasi atau lembaga ekonomi formal lainnya. Apabila kelembagaan Gabungan KPK akan dikembangkan menjadi koperasi, tata cara pembentukannya mengacu pada Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Jenis koperasi yang dapat dikembangkan dari Gabungan KPK antara lain:

1. **Koperasi Konsumen** adalah Koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari, agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang layak. Contoh Koperasi Pegawai Negeri.
2. **Koperasi Produsen** adalah Koperasi yang anggotanya terdiri dari orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa. Orang tersebut adalah buruh, pedagang, pengusaha kecil dan menengah. Contoh Koperasi kerajinan, Koperasi batik, koperasi tahu tempe, dan lain-lain.
3. **Koperasi Simpan Pinjam** adalah Koperasi yang memberikan kepercayaan pada Anggotanya dalam bentuk pinjaman uang. Dalam memberikan pinjaman prosedur yang ditempuh tidak boleh berbelit, dan bunga yang dibebankan sesuai dengan kesepakatan.
4. **Koperasi Serba Usaha** adalah Koperasi yang menjalankan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Contohnya adalah KUD, KSU di lingkungan karyawan, ABRI, Pegawai Negeri, dan lain-lain.
5. **Koperasi Jasa** adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah Koperasi Angkutan, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi Perancangan dan Konstruksi Bangunan, Koperasi Pengurusan dokumen seperti SIM, STNK, Pasport, Sertifikat Tanah, dan lain-lain.

Bagi Gabungan KPK yang kegiatannya hanya pelayanan simpan-pinjam, sebaiknya dikembangkan menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Sedangkan Gabungan KPK yang kegiatannya meliputi beberapa jenis pelayanan sebaiknya dikembangkan menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU).

Pengembangan Kelembagaan Gabungan KPK menjadi koperasi sebaiknya dilakukan setelah Gabungan KPK berada pada kelas MANDIRI. Oleh karena itu, pemahaman tentang perkoperasian harus mulai diberikan sebagai materi penguatan kapasitas ketika Gabungan KPK masih berada pada kelas MANTAP (Anonymous, 2004).

2.6 Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil.

2.6.1 Tinjauan P4K

Tujuan P4K fase ketiga (1998-2005) adalah mengembangkan sistem partisipatif yang efektif dan berkelanjutan untuk membantu keluarga miskin di pedesaan sehingga mereka mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Dalam implementasinya, sistem partisipatif yang efektif dan berkelanjutan tersebut diwujudkan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat dan institusi pendukung yang memungkinkan kelompok-kelompok swadaya masyarakat itu berkembang. Dalam terminologi P4K, kelompok swadaya masyarakat dikenal dengan sebutan Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK).

Kelompok yang tergabung dalam binaan P4K adalah petani nelayan beserta keluarganya yang pendapatnya dibawah garis kemiskinan yaitu dibawah 320 kg setara beras per orang per tahun. Warga binaan P4K yaitu warga yang bekerja sebagai petani pemilik pengelola lahan sempit, penggarap/penyakap, buruh tani, buruh nelayan/pandega, nelayan dengan peralatan sederhana, peternak kecil, pengrajin kecil, pedagang usaha kecil (Anonymous Deptan, 1998). Jumlah anggota KPK berkisar antara 8-16 orang dan apabila terdapat anggota KPK yang meninggal dunia, pindah tempat, bekerja di luar negeri maka kedudukannya tidak dapat digantikan.

Sasaran proyek P4K adalah masyarakat miskin di wilayah pedesaan yang mempunyai usaha mikro. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya. Keadaan miskin umumnya diukur dengan tingkat pendapatan yang diperoleh oleh tiap-tiap rumah tangga sedangkan beras yang dipakai sebagai ukuran dalam kemiskinan P4K disebabkan beras merupakan makanan pokok yang selalu dikonsumsi setiap hari oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Pendekatan yang paling mudah melihat kemiskinan dengan mengukur tingkat pendapatan sebab tingkat pendapatan yang kurang dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan berkurang pula (Soekartawi, 1996). Pada proyek P4K klasifikasi garis kemiskinan didasarkan pada tingkat pendapatan setara beras per

orang per tahun atau tepatnya tingkat pengeluaran rumah tangga. Dasar penetapan keluarga miskin menurut P4K dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. 480 kg beras/orang/tahun dikelompokkan pada masyarakat hampir miskin.
2. 320 kg beras/orang/tahun dikelompokkan pada masyarakat miskin.
3. 240 kg beras/orang/tahun dikelompokkan pada masyarakat miskin sekali.

Jenis usaha yang dikerjakan oleh kelompok meliputi usaha di bidang pertanian maupun non pertanian, antara lain bidang pertanian dan perkebunan (6,13 %), bidang industri rumah tangga (36,77 %), bidang usaha jasa dan lain-lain (23,39 %). Kegiatan sosial yang diikuti KPK antara lain jimpitan, simpan pinjam, dana sehat, keagamaan, arisan, kematian, dan lain-lain (Anonymous, 2002).

P4K juga mendukung tumbuh berkembangnya KPK dengan menyediakan pelayanan dalam bentuk fasilitasi proses penumbuhan dan penguatan kapasitas kelompok serta akses kepada pelayanan tabungan dan kredit. Pelayanan tersebut disediakan untuk mengantarkan KPK mencapai kemandiriannya. KPK yang mandiri memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Membantu anggotanya untuk meningkatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Menjangkau pelayanan yang diperlukan tanpa bantuan dari pihak lain.
3. Berperan aktif dalam kegiatan masyarakat.
4. Memperoleh kesetaraan status sosial bagi anggota KPK di masyarakat lingkungannya.

Kelompok KPK mendapat pembinaan dari lembaga atau instansi antara lain: Departemen Pendidikan (Diknas), Departemen Kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Departemen Agama, Departemen Perindustrian, Koperasi, LSM/LPSM, Pengusaha, Tokoh Masyarakat, Pamong Desa, dan Kontak Tani. Pembinaan KPK yang telah dilakukan dalam aspek non ekonomi meliputi aspek rohani, KB, kesehatan, dan pendidikan.

Proyek P4K berlangsung selama tiga fase yang bermula pada tahun 1979/1980 dan pada saat ini fase ketiga telah berakhir. Fasilitasi proyek pada anggota Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK) telah berjalan cukup lama dan banyak kemajuan yang dicapai oleh anggota KPK, secara individu atau

berkelompok. Selain dapat mengadakan pertemuan kelompok untuk penguatan kapasitas kelembagaan KPK menurut jadwal yang telah disepakati, anggota KPK juga difasilitasi oleh penyuluh pembina KPK agar mereka memiliki usaha mikro atau usaha skala kecil seperti bakulan, pracangan, pengrajin kecil, nelayan dengan peralatan sederhana, buruh tani, dan bagi yang belum punya, atau pengembangan bagi yang sudah punya usaha. Pengelolaan usaha mikro ini ada juga yang dilaksanakan secara berkelompok. Untuk keperluan modal usaha, anggota KPK juga dipersyaratkan mengajukan Rencana Usaha Bersama (RUB) kepada BRI untuk memperoleh kredit sesuai aturan yang berlaku.

Fasilitasi dalam bentuk penguatan kapasitas kelembagaan kelompok dan bantuan kredit modal usaha untuk mengembangkan masyarakat miskin merupakan sebagian dari kegiatan P4K untuk mencapai tujuannya, yaitu mengembangkan sistem partisipatif dan berkelanjutan untuk membantu keluarga miskin di pedesaan sehingga mereka mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Dengan aktif berpartisipasi mengikuti usaha mikro yang terus berkembang, maka harapan agar anggota KPK dapat meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya benar-benar menjadi suatu kenyataan.

2.6.2 Pola Pembinaan P4K

Pola pembinaan P4K dilakukan secara sistematis melalui penumbuhan dan pemberdayaan KPK dalam pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri dan berkelanjutan melalui penguatan (*empowering*) masyarakat miskin yaitu:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Petani Nelayan Kecil (PNK) anggota Kelompok Petani-Nelayan Keci (KPK) atas dasar kemauan dan kemampuannya sendiri dapat berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu proaktif, kreatif, disiplin, dan mandiri. Dengan demikian mereka dapat lebih berperan serta dalam pembangunan dan di sisi lain mereka berperan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya sendiri.
2. Pengembangan sumber-sumber permodalan. PNK anggota KPK dengan kemauan dan kemampuannya sendiri dapat mengembangkan kemampuannya

secara bertahap dalam mencari dan menjangkau sumber-sumber permodalan yang tersedia pada lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Mereka menjadi nasabah yang terpercaya, yang berdasarkan hasil analisa usahanya dapat menentukan besarnya modal yang diperlukan dan pada waktunya dapat melunasi angsuran pinjamannya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

3. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan KPK. KPK atas dasar kemauan dan kemampuannya tumbuh dan berkembang menjadi lembaga petani-nelayan yang tangguh (dalam bentuk lembaga ekonomi formal baik koperasi maupun swasta sesuai dengan pilihan dan kebutuhan mereka sendiri). Dengan demikian KPK memiliki posisi tawar yang kuat dan masuk dalam jalur perekonomian normal.
4. Pengembangan pasar dan teknologi tepat guna. PNK anggota KPK atas dasar kemauan dan kemampuannya sendiri mampu mengembangkan usahanya sehingga dapat mencari, menjangkau dan mengembangkan pasar yang tersedia. Mereka mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi usahanya sesuai dengan permintaan pasar.

Prinsip-prinsip dasar P4K adalah sebagai berikut:

1. Prinsip berkelompok

Pendekatan dilakukan agar peserta proyek mau dan mampu bekerjasama dalam kelompok. Dengan berkelompok tumbuh kekuatan gerak dari para Petani-Nelayan Kecil (PNK) itu sendiri. Kelompok tumbuh dari, oleh dan untuk kepentingan para PNK sendiri. Selain dalam kelompok sendiri, bekerjasama juga dikembangkan antar kelompok dengan mitra kerja lainnya, agar usaha mereka berkembang, pendapatan dan kesejahteraannya meningkat serta mampu membentuk kelembagaan ekonomi formal. Prinsip berkelompok dilandasi oleh:

- a. Keserasian. Anggota KPK terdiri dari PNK yang saling mengenal, saling mempercayai dan mempunyai kepentingan yang sama, sehingga tumbuh KPK yang kompak dan serasi.

- b. Kepemimpinan dari mereka sendiri. Ketua dan pengurus kelompok dipilih oleh dan dari anggota kelompok mereka sendiri. Pemimpin yang berasal dari kalangan mereka sendiri lebih memahami keinginan dan masalah yang dihadapi kelompoknya. Pemimpin kelompoknya yang aktif dan kreatif mendorong kelompoknya untuk lebih berkembang dan mandiri.
2. Prinsip pendekatan kemitraan
PNK anggota KPK adalah mitra kerja penyuluh pertanian dalam program pengentasan kemiskinan. Sebagai peserta program, mereka akan lebih menyadari potensinya sendiri untuk menentukan hari depannya. Mereka didekati untuk dapat mengembangkan usaha mereka yang lebih luas dengan menjalin mitra kerja dengan rekan-rekan PNK anggota KPK lainnya, gabungan KPK, petugas/dinas lainnya, LSM, serta para pengusaha terkait.
3. Prinsip keswadayaan
Sejak saat penumbuhan KPK, para PNK sudah dimotivasi dan disadarkan untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri dan tidak selalu tergantung kepada bantuan atau pertolongan dari luar.
4. Prinsip kesatuan keluarga
PNK tumbuh dan berkembang sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh. Kepala keluarga beserta anggota keluarganya merupakan pemacu dan pemicu kemajuan usaha mereka. Untuk itu diperlukan peranan aktif dari para penyuluh pertanian untuk memberdayakan seluruh anggota PNK untuk berperan serta aktif dalam meningkatkan usaha dan kesejahteraannya.
5. Prinsip belajar menemukan sendiri (*discovery learning*).
PNK yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemampuan dan kemauan mereka untuk belajar menemukan sendiri apa yang mereka butuhkan dan apa saja yang akan mereka kembangkan termasuk upaya untuk mengubah kehidupannya.

2.7 Konsep Persepsi

2.7.1 Pengertian Persepsi

Persepsi diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan menggabungkan data indera seseorang untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga orang dapat

menyadari sekelilingnya termasuk sadar akan dirinya (Davidoff, 1988: 232). Pendapat lain mengatakan bahwa persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima organisme atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integral dalam diri individu (Walgito, 2003: 53).

Menurut Mulyana (2004: 171) persepsi menyangkut penafsiran obyek, tanda, orang serta sudut pengalaman yang bersangkutan, serta menyangkut penerimaan stimulus dan menerjemahkan atau menafsirkan stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara yang dapat mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku. Menurutnya, persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan interpretasi (penafsiran) adalah inti dari persepsi, yang identik dengan penyandian balik (*decoding*) dalam proses komunikasi.

Rahmat (2005: 51) mengartikan persepsi sebagai pengalaman-pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dalam menafsirkan pesan. Sementara menurut Effendy (1986: 25) yang dimaksud persepsi adalah penginderaan terhadap suatu kesan yang timbul dalam lingkungannya, di mana penginderaan itu dipengaruhi oleh pengalaman, kebiasaan, dan kebutuhan.

Beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang timbul dari dalam diri seseorang untuk memilih, mengorganisasikan dan menilai rangsangan dari luar. Walaupun rangsangan dari luar itu sama, namun kemampuan seseorang dalam mempersepsi sesuatu antar individu belum tentu sama. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan pengalaman sangat berpengaruh dalam memperkaya benaknya untuk memperkuat daya persepsinya. Demikian juga dalam pembelajaran, apa yang dialami petani akan diorganisasikan, diinterpretasikan dan dinilai sehingga timbul persepsi tertentu dalam diri petani. Kuatnya daya persepsi masing-masing petani berbeda tergantung dari pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.

Uraian dari proses terjadinya persepsi diatas, dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya persepsi dimulai dari proses penginderaan sampai pada proses pembentukan kesimpulan. Setiap tahapan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi bila ingin keadaan dan hasilnya dapat berlangsung baik.

III. KERANGKA PEMIKIRAN

3.1 Kerangka Konsep Pemikiran

Salah satu program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Departemen Pertanian (Deptan) cq. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDM) dengan pola dan metode Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K) bekerjasama dengan badan International Food Agriculture and Development (IFAD), Asian Development Bank dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan kredit tanpa agunan kepada Kelompok Petani Nelayan Kecil (KPK). Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tim Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (PSE) dan badan Litbang Pertanian menunjukkan bahwa proyek P4K ini mempunyai konsep dan perencanaan program penanggulangan kemiskinan cukup baik dan telah membawa dampak positif dalam peningkatan pendapatan petani/buruh tani. P4K juga telah membuktikan bahwa petani kecil jika diberi pembinaan yang tepat dapat melakukan suatu usaha bersama yang dapat didanai oleh pihak bank.

Berdasarkan tingkat kemampuan masyarakatnya yang rendah, maka perlu adanya pemberdayaan dan pembinaan serta pengembangan usaha potensial untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Anggota yang aktif berpartisipasi mengikuti pembelajaran di dalam kelompok diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada dan responsif dengan perubahan.

Berdasarkan hal di atas dikaitkan dengan daerah penelitian yang mempunyai ciri daerah miskin yang memiliki keterbatasan akses dalam menjangkau fasilitas yang tersedia dengan indikator-indikator kemiskinan (BPS, 1998) nampaknya daerah penelitian juga termasuk desa yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Melalui proyek P4K, pemerintah melakukan proses pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat tersebut dengan fasilitas kredit tanpa agunan serta pendampingan. Kemiskinan di daerah penelitian ditandai dengan pendapatan masyarakat yang

dibawah standar. Rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari juga rendah.

Kondisi yang terjadi di masyarakat daerah penelitian menyebabkan pemerintah mengikutsertakan dalam program pengentasan kemiskinan yaitu Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K). Dalam program P4K terdapat pola dan metode yang mempunyai 3 strategi, 7 prinsip, dan 15 langkah. 3 strategi terdiri dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan kemampuan permodalan, dan pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat. Untuk 7 prinsip terdiri dari pendekatan kelompok, keserasian, kepemimpinan dari PNK, pendekatan kemitraan, swadaya, belajar sambil bekerja, dan pendekatan keluarga. Sedangkan 15 Langkah terdiri dari identifikasi lokasi binaan dan potensial sumber daya, identifikasi usaha-usaha ekonomi skala kecil, identifikasi PNK, mendorong dan membimbing PNK membentuk kelompok, survai rumah tangga anggota KPK, bimbingan penyusunan RUB, bimbingan menabung dan mendapatkan kredit, bimbingan pelaksanaan usaha bersama, bimbingan menabung dan pengembalian kredit, bimbingan pencatatan dan pembukuan keuangan kelompok, bimbingan pemasaran, bimbingan pemupukan modal dan penggunaannya, bimbingan penggunaan waktu dan uang secara tepat, bimbingan kerjasama antar kelompok dan perkoperasian, dan bimbingan mendapatkan pembinaan dari lembaga dan institusi lainnya.

Pada dasarnya prinsip pemberdayaan dalam proyek P4K tergolong tidak memberatkan petani atau boleh dikatakan mempunyai bukti keberpihakan kepada petani atau masyarakat yang terkategori miskin. Di sisi lain dengan kemudahan yang akan diberikan P4K berupa paket pembinaan berkelanjutan akan menumbuhkembangkan kelompok miskin ke arah kemandirian kelompok. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya perubahan pendapatan dari beberapa masyarakat miskin yang dibina oleh P4K di daerah penelitian. Terjadinya perubahan diharapkan tidak hanya dari pendapatan saja, akan tetapi terjadi perubahan perilaku setelah adanya pembimbingan secara partisipatif oleh penyuluh.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian KPK yang lebih tinggi diperlukan adanya peran petugas penyuluh pertanian (PPL). Peran penyuluh di sini sebagai pendamping, yang artinya penyuluh hanya mengarahkan saja kegiatan

yang dilakukan oleh anggota KPK. Penyuluh tidak mendikte para anggota KPK untuk melaksanakan semua kegiatannya. Jika para anggota KPK menemui suatu kesulitan tentang kegiatan kelompok, maka para anggota akan memecahkan kesulitan tersebut dengan bantuan dari petugas penyuluh pertanian.

Peran penyuluh sebagai pendamping terdiri dari penasehat kelompok, pelatih, dan penghubung (*link person*). Sebagai penasehat kelompok peran petugas penyuluh pertanian dibutuhkan apabila suatu kelompok mengalami permasalahan dalam kegiatan usahanya ataupun persoalan yang lain yang dialami oleh kelompok. Peran penyuluh pertanian sebagai pelatih dibutuhkan apabila, misalnya ada suatu teknologi baru dari lembaga penelitian, maka penyuluh pertanian harus memberikan pelatihan-pelatihan tentang teknologi baru tersebut kepada para anggota KPK. Sedangkan peran penyuluh sebagai penghubung, dalam hal ini penyuluh sebagai fasilitator antara anggota-anggota KPK dengan pihak lain untuk melakukan suatu bentuk kerjasama dalam hal pengembangan usaha anggota KPK. Bentuk kerjasama yang dilakukan mungkin dapat berupa hubungan dalam penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan, dan wilayah pemasaran.

Peran penyuluh pertanian juga dapat berhubungan langsung dengan kemandirian KPK. Semakin tinggi peran penyuluh pertanian terhadap KPK, maka semakin tinggi pula tingkat kemandiriannya. Begitu pula jika peran penyuluh pertanian terhadap KPK rendah, maka tingkat kemandirian kelompok juga akan rendah. Hal ini dapat dikatakan bahwa antar peran penyuluh pertanian dengan kemandirian KPK terdapat suatu kecenderungan hubungan positif atau negatif. Peran penyuluhan pertanian merupakan salah satu bagian dari proses pemberdayaan KPK. Salah satu hal yang menyebabkan keberhasilan dalam proses pemberdayaan KPK adalah dengan peran penyuluh pertanian yang secara aktif dapat membuat KPK lebih mandiri.

Peran penyuluh dalam penelitian kali ini berkaitan dengan masalah kompetensi kerja para anggota gabungan KPK. Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan gabungan KPK adalah suatu kemampuan kerja untuk membentuk sebuah wadah organisasi yang lebih besar sebagai persyaratan untuk mendapatkan akses yang lebih besar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama-

tama mengetahui Analisis Kebutuhan Latihan (AKL). Analisis Kebutuhan Latihan (AKL) adalah kegiatan yang meliputi Analisis Pekerjaan (AP) dan Identifikasi Kebutuhan Latihan (IKL). Identifikasi Kebutuhan Latihan (IKL) yaitu kegiatan memilih kekuranganmampuan kerja yang bisa ditingkatkan melalui diklat. Diklat Gabungan KPK adalah proses belajar mengajar bagi calon wirausahawan bidang pertanian yang dilaksanakan untuk mencapai kualifikasi dan persyaratan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja (SKK), agar dapat dilaksanakan peran dan fungsinya dengan baik.

Kompetensi-kompetensi kerja yang dituntut oleh jabatan yang ada di dalam unit kerja suatu organisasi disebut Standar Kompetensi Kerja (SKK). SKK adalah jenis-jenis kompetensi kerja yang harus dikuasai oleh seorang pejabat atau petugas yang menduduki jabatan atau diberi tugas melaksanakan pekerjaan tertentu agar ia dapat berprestasi baik dalam jabatannya atau pelaksanaan tugasnya. Program diklat yang dikembangkan dengan maksud untuk mempersiapkan pejabat atau petugas agar memiliki SKK yang dipersyaratkan oleh jabatannya atau tugas pekerjaannya disebut program Diklat Berbasis Kompetensi Kerja (CBT) (Anonymous, 2003). Dalam hal ini diharapkan SKK yang dimiliki oleh gabungan KPK dapat ditingkatkan sehingga kinerja anggota kelompok tani sudah sesuai dengan analisis kebutuhannya.

Ada 3 kondisi dimana seseorang memerlukan diklat yaitu:

1. Bila seseorang tidak dapat mengerjakan pekerjaan atau tugasnya sehari-hari dengan baik, baik seluruhnya maupun sebagian.
2. Bila seseorang mendapat tambahan tugas baru yang sebagian atau sama sekali asing baginya.
3. Bila seseorang ditempatkan dalam jabatan yang baru yang memerlukan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang baru.

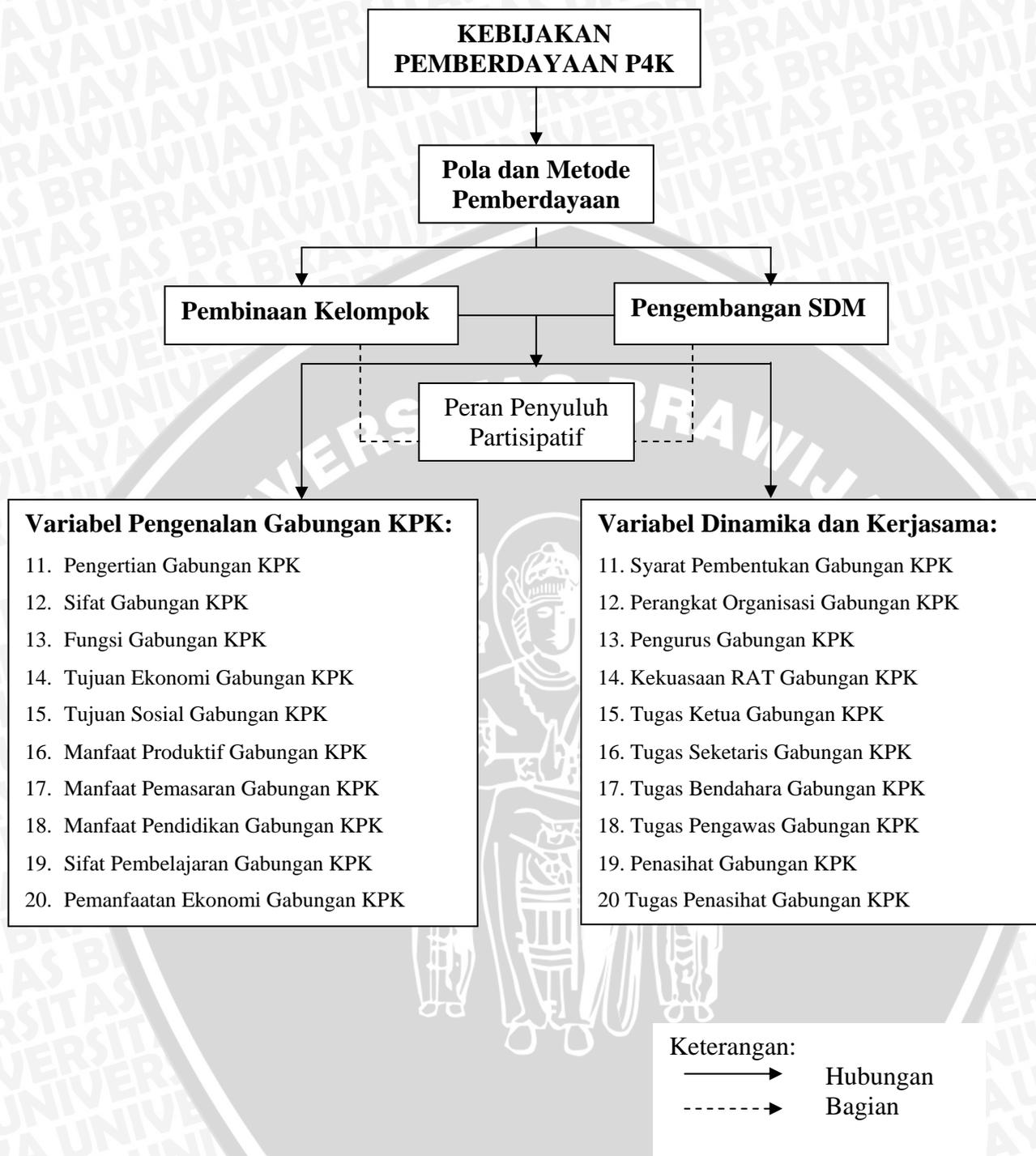
Tiga kondisi tersebut diatas dikatakan bahwa seseorang mungkin memerlukan diklat. Dikatakan mungkin karena ada kalanya tidak memerlukan diklat. Sebenarnya mereka sudah tahu cara mengerjakan pekerjaan tersebut, hanya saja ada faktor lain yang menghambat untuk menunjukkan kompetensinya, yaitu faktor yang sering disebut: sarana manajemen yang terdiri dari 5 M (*Man, Money, Material, Machine, and Method*).

Kegiatan diklat diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Kegiatan pembelajaran mengembangkan kemampuan untuk mengetahui, memahami, melakukan sesuatu, hidup dalam kebersamaan dan mengaktualisasikan diri. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran perlu: 1) berpusat pada peserta didik; 2) mengembangkan kreatifitas peserta didik; 3) menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang; 4) bermuatan, nilai, etika, estetika, logika, dan 5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam.

Dalam kerangka itu, pengembangan program dilakukan berdasarkan pendekatan kompetensi. Penggunaan pendekatan ini memungkinkan desain program dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat. Hasil-hasil pembelajaran dinilai dan dijadikan umpan balik untuk mengadakan perubahan terhadap tujuan pembelajaran dan prosedur pembelajaran yang dilaksanakan sebelumnya (Majid, 2007: 24).

Aspek perilaku yang dapat dikembangkan melalui diklat yaitu: aspek perilaku kognitif yaitu aspek perilaku yang terutama berhubungan dengan kemampuan mengingat sesuatu yang telah dipelajari dan kemampuan mengembangkan intelegensia. Aspek perilaku afektif yaitu aspek perilaku yang terutama berhubungan dengan sikap kejiwaan seperti kecenderungan, nilai, dan minat. Aspek perilaku psikomotor, yaitu aspek perilaku yang terutama berhubungan dengan ketrampilan gerak fisik. Hasil belajar, dalam garis besarnya dapat pula dibagi menjadi tiga bagian yaitu: hasil belajar kognitif, hasil belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor.

Kompetensi kerja seseorang ditentukan oleh interaksi antara ke tiga aspek perilaku tersebut di atas. Agar perubahan kompetensi kerja seseorang dapat dicapai dengan memuaskan, maka pengembangan program diklat seyogyanya mencakup pengembangan kompetensi yang ke tiga aspek tersebut. Ini adalah standar dari suatu pengembangan program diklat berbasis kompetensi kerja atau CBT (*Competency Based Training*). Untuk lebih jelasnya lihat kerangka pemikiran penelitian di bawah ini:



Gambar 2: Kerangka Pemikiran Penelitian

3.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan mengacu pada proyek P4K yang memberdayakan Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK). Kelompok dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota dari KPK Sidodadi dan KPK Kenanga yang ada di daerah penelitian di Kromengan, pengurus yang dimaksud adalah para ketua, sekretaris dan bendahara yang terdapat di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang.

3.3 Definisi Operasional

1. **AKK** adalah jenis kompetensi yang dicapai seseorang anggota KPK dibandingkan dengan standard kompetensi kerja (SKK)nya
2. **SKK** adalah jenis-jenis kompetensi kerja yang harus dikuasai oleh seorang pejabat atau petugas yang menduduki jabatan atau diberi tugas melaksanakan pekerjaan tertentu agar ia dapat berprestasi baik dalam jabatannya atau pelaksanaan tugasnya
3. **DKK** adalah selisih antara SKK dengan AKK
4. **Anggota Gabungan KPK** adalah KPK beserta seluruh anggotanya yang bersepakat dan memenuhi syarat untuk bergabung.
5. **Petani-Nelayan Kecil (PNK)** adalah rumah tangga miskin di perdesaan sebagai penerima manfaat P4K yang ditetapkan melalui proses partisipatif oleh masyarakat. Mereka umumnya adalah para petani pemilik dan pengelola lahan sempit, penggarap/penyapak, buruh, nelayan/pandega dan nelayan dengan peralatan sederhana. Selain itu, rumah tangga lainnya seperti pedagang sayur keliling, pedagang makanan kecil, pedagang bakso keliling dan lain-lain dapat juga menjadi penerima manfaat P4K.
6. **Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK)** adalah lembaga petani-nelayan kecil yang dibentuk atas dasar kemauan, kesepakatan, kesamaan kepentingan dan tujuan anggotanya. Sebelum tahun 2003 jumlah anggota KPK berkisar antara 5 s/d 16 KK, sedangkan mulai tahun 2003 jumlah anggota KPK berkisar 15 s/d 25 KK

7. **P4K** adalah Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil. Program yang bekerjasama dengan badan IFAD (International Food Agriculture and Development, ADB (Asian Development Bank), dan BRI (Bank Rakyat Indonesia) yang memberikan bantuan kepada KPK (Kelompok Petani Kecil).
8. **Gabungan KPK** adalah kelompok lanjutan yang dibentuk dari beberapa KPK di tingkat perdesaan, bersifat informal, sukarela dan swadaya atas dasar kesepakatan dan kepentingan bersama.
9. **Penumbuhan Gabungan KPK** adalah proses pembentukan Gabungan KPK yang meliputi serangkaian kegiatan identifikasi KPK dan fasilitasi penumbuhan Gabungan KPK.

3.4 Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan instrumen angket dengan skala pengukuran menggunakan skala likert, menurut Riduwan (2006: 16) skala likert digunakan untuk mengukur persepsi, sikap, dan pendapat seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Penggunaan skala likert dimasukkan untuk memudahkan dalam mengolah data sehingga dapat ditarik kesimpulan dari data tersebut. Pengukuran dilakukan untuk menjangkau pengetahuan awal anggota dan pengurus KPK. Masalah penelitian ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti dalam variabel penelitian. Variabel yang diteliti merupakan variabel tunggal yang dibagi ke dalam dua sub variabel. Pengukuran variabel pertama mengenai Pengenalan Gabungan KPK adalah mengacu kepada sub variabel materi yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Gabungan KPK dan sub variabel kedua mengacu pada variabel persepsi responden tentang Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK, setiap variabel tersebut memiliki masing-masing 10 indikator sesuai dengan teori yang ada, kemudian dari indikator itulah disusun beberapa item soal yang akan diambil datanya di lapangan, selengkapnya lihat tabel matriks kisi-kisi pengukuran variabel penelitian dan pengukuran variabel penelitian berikut ini:

Tabel 2. Matriks Kisi-kisi Pengukuran Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Aktual Kompetensi Kerja (AKK) KPK	A. Pengenalan Gabungan KPK	1.1 Pengertian Gabungan KPK 1.2 Sifat Gabungan KPK 1.3 Fungsi Gabungan KPK 1.4 Tujuan Ekonomi Gabungan KPK 1.5 Tujuan Sosial Gabungan KPK 1.6 Manfaat Produktif Gabungan KPK 1.7 Manfaat Pemasaran Gabungan KPK 1.8 Manfaat Pendidikan Gabungan KPK 1.9 Sifat Pembelajaran Gabungan KPK 1.10 Pemanfaatan Ekonomi Gabungan KPK
	B. Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK	1.1 Syarat Pembentukan Gabungan KPK 1.2 Perangkat Organisasi Gabungan KPK 1.3 Pengurus Gabungan KPK 1.4 Kekuasaan RAT Gabungan KPK 1.5 Tugas Ketua Gabungan KPK 1.6 Tugas Sekretaris Gabungan KPK 1.7 Tugas Bendahara Gabungan KPK 1.8 Tugas Pengawas Gabungan KPK 1.9 Penasihat Gabungan KPK 1.10 Tugas Penasihat Gabungan KPK

Tabel 3. Pengukuran Variabel Pengenalan serta Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK

A. Sub Variabel Pengenalan Gabungan KPK

No	Indikator Pertanyaan	Nilai
1	Sub Variabel Pengenalan Gabungan KPK	
1.1	Apakah pengertian dari Gabungan KPK dalam memberdayakan masyarakat.	
	a. Menjamin keberlanjutan dan manfaat oleh anggota KPK.	3
	b. Menjamin manfaat oleh anggota saja.	2
	c. Tidak menjamin apa pun.	1
1.2	Gabungan KPK adalah kelompok lanjutan yang dibentuk dari beberapa KPK yang layak di pedesaan mempunyai sifat:	
	a. Informal (tidak resmi), sukarela, dan swadaya (dengan kekuatan sendiri) untuk kepentingan bersama.	3
	b. Sukarela dan swadaya untuk kepentingan bersama.	2
	c. Swadaya untuk kepentingan bersama saja.	1
1.3	Apa fungsi gabungan KPK dalam rangka memberikan pelayanan dan manfaat bagi anggotanya?	
	a. Sebagai kelas belajar, tempat kerjasama, dan unit produksi/jasa.	3
	b. Sebagai tempat belajar dan tempat kerjasama saja.	2
	c. Sebagai tempat unit produksi dan jasa saja.	1
1.4	Tujuan pembentukan gabungan KPK adalah memberikan pelayanan dan manfaat ekonomi serta sosial bagi anggotanya, bentuk pelayanan ekonomi gabungan KPK adalah	
	a. Peningkatan modal usaha, skala usaha, dan pemasaran produk/jasa.	3
	b. Peningkatan modal dan skala usaha saja.	2
	c. Peningkatan/penambahan modal saja.	1
1.5	Tujuan pembentukan gabungan KPK dalam pelayanan sosial bagi anggotanya, bentuk pelayanannya sosial tersebut adalah	

	a. Peningkatan fasilitas kegiatan belajar dan dinamika anggota Gabungan KPK.	3
	b. Peningkatan dinamika anggota Gabungan KPK.	2
	c. Tidak ada pelayanan sosial, hanya pelayanan ekonomi saja.	1
1.6	Manfaat Gabungan KPK dalam bidang produksi adalah memperoleh kemudahan bagi anggota KPK untuk:	
	a. Memperoleh saprodi, modal, dan memperbesar skala usaha.	3
	b. Memperoleh modal dan saprodi saja.	2
	c. Memperoleh modal saja.	1
1.7	Manfaat lain Gabungan KPK dalam bidang pemasaran adalah	
	a. Memperoleh informasi, memperlancar, dan memperluas pemasaran produk.	3
	b. Memperlancar dan memperluas pemasaran produk anggotanya.	2
	c. Memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh anggota KPK.	1
1.8	Manfaat Gabungan KPK adalah memberi kemudahan dalam bidang pendidikan dan latihan bagi anggotanya untuk:	
	a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.	3
	b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saja.	2
	c. Meningkatkan keterampilan anggota saja.	1
1.9	Gabungan KPK merupakan sarana belajar bagi anggota KPK dalam pengembangan kelembagaan Gabungan KPK yang bersifat:	
	a. Dinamis, Demokratis, dan Berpartisipasi.	3
	b. Dinamis dan Demokratis.	2
	c. Demokratis saja.	1
1.10	Gabungan KPK juga memberi kemudahan bagi masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, siapa saja yang dapat merasakan pemenuhan kebutuhan tersebut	
	a. Masyarakat sekitar, saudara, dan anggota keluarga.	3
	b. Anggota keluarga dan saudara saja.	2
	c. Masyarakat sekitar saja.	1

B. Sub Variabel Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK

No	Indikator Pertanyaan	Nilai
2	Sub variabel Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK	
2.1	Dalam pembentukan Gabungan KPK, hal apa saja yang diperlukan dalam membentuknya?	
	a. Perangkat organisasi, Penasihat, dan Keanggotaan.	3
	b. Perangkat organisasi (ketua dan sekretaris), dan anggota saja.	2
	c. Perangkat organisasi saja.	1
2.2	Gabungan KPK adalah gabungan minimal dari 2 KPK atau lebih yang bergabung, gabungan ini tentu saja memerlukan perangkat organisasi, apa saja perangkat organisasi tersebut?	
	a. Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Tim Manajemen.	3
	b. Tim Manajemen saja yakni pengurus dan pengawas.	2
	c. Pengurus saja.	1
2.3	Dalam mendirikan gabungan KPK, tentu saja perlu sebuah pengurus, pengurus gabungan KPK minimal terdiri dari?	
	a. Ketua, sekretaris, dan bendahara.	3
	b. Ketua dan bendahara saja.	2
	c. Ketua saja.	1
2.4	Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi pada gabungan KPK, kekuasaan itu antara lain:	
	a. Memilih, menilai, dan memberhentikan pengurus gabungan KPK.	3
	b. Memilih dan memberhentikan pengurus gabungan KPK.	2
	c. Menmilih pengurus gabungan KPK.	1
2.5	Dalam gabungan KPK, salah seorang pengurusnya adalah ketua gabungan KPK, apa sajakah tugas ketua dalam kegiatan Gabungan KPK?	
	a. Mengkoordinasi, mengorganisir, dan bertanggungjawab seluruh kegiatan Gabungan KPK.	3
	b. Mengkoordinasi, dan mengorganisir seluruh kegiatan Gabungan KPK.	2
	c. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Gabungan KPK.	1
2.6	Untuk memperlancar kegiatan administrasi, pengurus gabungan KPK tentu memerlukan seorang sekretaris yang bertugas:	

	a. Membuat catatan rapat, berita acara, dan surat menyurat.	3
	b. Membuat catatan rapat dan surat menyurat saja.	2
	c. Membuat berita acara saja.	1
2.7	Untuk memperlancar administrasi keuangan, diperlukan seorang bendahara yang bertanggungjawab meangani seluruh adminitrasi keuangan, tugas bendahara adalah?	
	a. Menerima dan melakukan pembayaran atas persetujuan ketua serta memelihara arsip transaksi keuangan.	3
	b. Menerima dan melakukan pembayaran atas persetujuan ketua.	2
	c. Memelihara/menyimpan transaksi keuangan saja.	1
2.8	Dalam Gabungan KPK, pengurus dan kegiatannya perlu diawasi agar kegiatannya berjalan lancar, Tugas pengawas antara lain adalah:	
	a. Melakukan pemeiksaan organisasi, perkembangan usaha, dan membuat laporan.	3
	b. Melakukan pemeriksaan dan membuat laporan.	2
	c. Membuat laporan saja.	1
2.9	Penasihat Gabungan KPK dibentuk bukan dari tim manajemen Gabungan KPK, Penasihat Gabungan KPK bisa saja diantaranya:	
	a. Aparat desa, tokoh masyarakat, dan pembina Gabungan KPK.	3
	b. Tokoh masyarakat dan pembina Gabungan KPK.	2
	c. Pembina gabungan KPK.	1
2.10	Tugas Penasihat Gabungan KPK antara lain	
	a. Memberi saran, masukan, dan nasihat kepada pengurus.	3
	b. Memberi saran dan nasihat kepada pengurus saja.	2
	c. Memberi masukan kepada pengurus saja.	1
	SKOR MAKSIMAL	60
	SKOR MINIMAL	20

IV. METODE PENELITIAN

4.1 Jenis dan Penentuan Lokasi Penelitian

4.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Nawawi (1983: 32) data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif berupa angka atau jumlah dengan berbagai klasifikasi yang antara lain berbentuk frekuensi, nilai rata-rata, penyimpangan dari nilai baku, persentase, nilai maksimum, dan lain-lain. Pengolahan datanya dilakukan secara matematis dengan mempergunakan berbagai rumus statistika yang sesuai dengan sifat dan jenis data. Sedangkan Arikunto (2006: 12) menyatakan bahwa dalam penelitian kuantitatif, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya banyak dituntut menggunakan angka.

Sedangkan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Penelitian deskriptif memiliki ciri-ciri memusatkan masalah pada masa sekarang dan data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa (Surakhmad, 2004: 140). Nazir (1988: 63) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Peneliti menggunakan metode studi kasus di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang.

Studi kasus (*case study*) adalah penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subyek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter yang khas dari kasus, atau pun status dari individu, yang kemudian, dari sifat-sifat yang khas tadi akan dijadikan suatu hal

yang bersifat umum (Nazir, 1988: 66). Penelitian deskriptif dipilih dengan harapan dapat mendeskripsikan satu variabel atau lebih. Masalah yang dikaji menggunakan jenis penelitian deskriptif biasanya berkenaan dengan kondisi, proses, karakteristik, dan hasil suatu variabel (Sudjana, 2001: 52).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal, yaitu Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK), kemudian dijabarkan lagi menjadi dua sub variabel yakni sub variabel Pengenalan Gabungan KPK dan sub variabel Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK. Karena variabelnya tunggal, maka hubungan antar variabel tidak ada, akan tetapi hanya mendeskripsikan seberapa baik Aktual Kompetensi Kerja (AKK) dan Persepsinya tentang Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK.

4.1.2 Penentuan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan salah satu kecamatan yang masuk dalam proyek pengembangan P4K di Jawa Timur.

4.2 Teknik Pengambilan dan Jumlah Sampel

Penjelasan yang akurat tentang karakteristik populasi penelitian perlu diberikan agar besarnya sampel dan cara pengambilannya dapat ditentukan secara tepat. Tujuannya adalah agar sampel yang dipilih benar-benar representatif, dalam arti dapat mencerminkan keadaan populasinya secara cermat. Kerepresentatifan sampel merupakan kriteria terpenting dalam pemilihan sampel dalam kaitannya dengan maksud menggeneralisasikan hasil-hasil penelitian sampel terhadap populasinya. Jika keadaan sampel semakin berbeda dengan karakteristik populasinya, maka semakin besar kemungkinan kekeliruan dalam generalisasinya (Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2000: 15-16).

Penentuan sample KPK secara *purposive* yakni 2 KPK, sedangkan penentuan responden dengan teknik *Probability Sampling*, yakni memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan *probability sampling* yang dipilih adalah *Simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara yang demikian dilakukan karena anggota populasi bersifat homogen, yakni rata-rata tingkat pendidikannya adalah sama.

Penentuan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu 2 KPK (Kenanga dan Sidodadi) yang ada di daerah tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- KPK sampel tersebut memenuhi kriteria yang perlu dilakukan pembinaan, yakni dari segi SDM perlu peningkatan dengan pelatihan bagi anggota KPK.
- KPK sampel tersebut merupakan KPK yang relatif aktif dalam melakukan kegiatannya dibandingkan dengan KPK lainnya yang ada di daerah itu.
- KPK sampel tersebut telah mempunyai pengalaman yang memadai sehingga dianggap memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian.

Populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah anggota dan pengurus 2 KPK (Kenanga dan Sidodadi) yang ada di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Jumlah anggota KPK yang ada sebanyak 40 orang, yang rata-rata berpendidikan sama, maka prosedur pengambilan sampelnya adalah dengan menggunakan teknik *Simple random sampling*, yakni pengambilan sampel penelitian yang dilakukan menggunakan cara acak, dengan memperhatikan responden sampel penelitian yang homogen (memiliki rata-rata pendidikan yang sama) yang tersebar di dua KPK dimana tidak ada perbedaan yang nyata dalam kehidupan sehari-harinya, baik dilihat dari tingkat pendidikan yang dicapai maupun mata pencaharian sehari-harinya. Adapun prosedur penentuan jumlah sampel minimum anggota KPK dilakukan menggunakan rumus Parel, *et al* (1973: 13) sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2S^2}{Nd^2 + Z^2S^2}$$

Dimana:

- n = jumlah sampel minimal yang harus diambil
- N= jumlah populasi
- S = variance dari populasi
- d = kesalahan maksimum yang dapat di terima
- Z = nilai z pada tingkat kepercayaan tertentu

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, ukuran sampel minimum sebesar 11,49 (perhitungan lihat lampiran 3). Namun pada penelitian ini peneliti akan mengambil sampel secara proposional dari jumlah keseluruhan populasi yang didistribusikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Distribusi Perhitungan Jumlah Sampel

KPK Sampel	Populasi	Sampel
KPK Kenanga	20	10
KPK Sidodadi	20	10
Jumlah	40	20

4.3 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa questionnaire dengan skala likert untuk menjawab pernyataan, setiap jawaban dari pernyataan disediakan tiga opsi jawaban beserta nilai secara berturut-turut: mengetahui (A)= 3, cukup mengetahui (B) = 2, dan kurang mengetahui (C)= 1.

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK). Variabel tersebut akan dijabarkan dalam dua sub variabel sebagai alat pengumpul data yakni sub variabel Pengenalan Gabungan KPK dan sub variabel Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK. Akan tetapi pada praksisnya item-item instrumen disatukan saja untuk memudahkan perhitungan.

Penyusunan questionnaire dikembangkan sendiri oleh peneliti berdasarkan referensi yang ada. Kedua questionnaire tersebut dikonstruksi berdasarkan teori yang ada dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan questionnaire

Penyusunan questionnaire dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Menyusun *lay out* questionnaire

Membuat kisi-kisi questionnaire yang di dalamnya menguraikan variabel menjadi sub variabel dan beberapa indikator sebagaimana terlampir dalam tabel 2 matriks kisi-kisi pengukuran variabel.

b. Menyusun kerangka pernyataan

Berdasarkan kisi-kisi tersebut kemudian disusun butir-butir item pernyataan sebagaimana dalam tabel 4 pengukuran variabel penelitian yang dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pembimbing.

c. Menyusun urutan pernyataan

Langkah ini dilakukan dengan maksud agar antara satu pernyataan dengan yang lain memiliki kesinambungan.

d. Menyusun format questionnaire

Format questionnaire disusun untuk memudahkan responden mengisinya, format angket ini adalah sebagai berikut:

1) Kata Pengantar

Di dalam penelitian ini peneliti memberikan uraian yang ditujukan kepada responden yang berisi: (a) maksud dan tujuan penelitian; (b) kerahasiaan data responden yang diberikan; (c) motivasi kepada responden agar menjawab dengan sebenarnya; (d) ucapan terima kasih atas bantuan responden

2) Petunjuk Mengerjakan

Bagian ini berisikan petunjuk cara pengisian questionnaire, yang dalam penyusunannya, peneliti memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) petunjuk disusun secara singkat dan lengkap; (b) jelas; (c) bagian-bagian yang penting dicetak tebal (bold); dan (d) memberikan contoh pengerjaan

3) Butir-butir pernyataan

Questionnaire ini terdiri atas 20 butir pernyataan. Butir 1 sampai 10 adalah butir yang merekam data mengenai pengenalan gabungan KPK, butir 11 sampai 20 adalah butir yang merekam data persepsi tentang dinamika dan kerjasama gabungan KPK, selengkapnya lihat tabel lampiran 9.

2. Uji coba Instrumen

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk pengisian angket, serta tanggapan responden terhadap instrumen penelitian. Tujuan dari ujicoba ini adalah untuk menyempurnakan angket, sehingga apabila angket ini diaplikasikan kepada responden sesungguhnya menghasilkan angket yang memenuhi syarat dan

responden tidak mengalami kesulitan dalam menjawab pernyataan. Uji coba instrumen ini dilaksanakan pada awal bulan Desember 2007 kepada 10 anggota KPK. Pengisian angket membutuhkan waktu 20 menit untuk menjawab 20 pernyataan uji coba.

3. Hasil uji coba Instrumen

Hasil uji coba instrumen kemudian dianalisis dengan melakukan verifikasi data, hal ini dilakukan untuk menyeleksi atau memilih data yang memadai untuk diolah. Proses seleksi ditempuh dengan cara memeriksa dan menyeleksi kelengkapan pengisian yang dilakukan oleh responden baik identitas maupun jawabannya. Kemudian melakukan penyekoran, data yang ditetapkan untuk diolah kemudian diberi skor untuk setiap jawaban. Dari skor tersebut peneliti mengolah data untuk mengetahui validitas dan realibilitas alat pengumpul data tersebut.

a. Validitas Instrumen

Berkaitan dengan pengujian validitas instrumen, Azwar (2006: 5) menyatakan bahwa validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu test atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, sebaliknya tes yang menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas yang rendah.

Uji validitas yang digunakan adalah validitas konstruk (*construct validity*), dalam hal ini instrumen terlebih dahulu dikonstruksi berdasarkan aspek-aspek yang akan diukur berlandaskan teori yang ada, selanjutnya dikonstruksi dengan para ahli atau pembimbing. Pengujian validitas konstruk dilakukan dengan analisis faktor, yaitu mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Menghitungnya menggunakan rumus Pearson Product Moment sebagaimana yang kami kutip dari Sugiyono (2006: 213) berikut:

$$R_{\text{hitung}} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana:

n = Jumlah Sampel

X= Skor setiap pertanyaan

Y= Jumlah skor total

R= Koefisien korelasi

Hasil korelasi setiap butir alat ukur dengan skor total tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus T hitung sebagaimana yang kami kutip dari Sugiyono (2006: 181) berikut:

$$T_{\text{hitung}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Dimana

n = Jumlah sampel

r = Koefisien korelasi

Hasil T hitung setiap butir alat ukur tersebut kemudian dibandingkan dengan T tabel, yaitu apabila T hitung lebih besar dari T tabel untuk taraf signifikansi 0,05 dengan dk (derajat kebebasan) 10-2, maka item tersebut dinyatakan valid. Langkah-langkah untuk menentukan uji validitas terlampir dalam lampiran 5.

b. Reliabilitas Instrumen

Berkaitan dengan pengujian reliabilitas instrumen, Azwar (2006: 4) menyatakan bahwa reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata *reliability* yang mempunyai asal kata *rely* dan *ability* yang konsep pokoknya adalah sejauhmana hasil pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas mempunyai berbagai istilah lain seperti keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya. Pengukuran yang reliabel adalah pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi.

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan *internal consistency* dengan Teknik Belah Dua (*split half*) yang dianalisis dengan rumus Spearman Brown. Untuk keperluan tersebut, maka butir-butir instrumen dibelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok instrumen genap. Skor data tiap kelompok tersebut kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan skor

total tiap kelompok. Selanjutnya skor total antara kelompok ganjil dan kelompok genap dicari koefisien korelasinya menggunakan rumus Korelasi Produk Moment. Hasil yang didapat dari koefisien korelasi dari teknik belah dua ini baru setengah tes skor reliabel, untuk mendapatkan skor penuh reliabel, hasil tersebut harus dimasukkan ke dalam rumus Spearman Brown sebagaimana yang kami kutip dari Sugiyono (2006: 186) berikut:

$$r_1 = \frac{2rb}{1 + r_b}$$

Dimana:

r_1 = Reliabilitas internal seluruh instrumen

r_b = Korelasi produk moment antara belahan pertama dan kedua

Hasil r_1 atau r_{xy} tersebut kemudian dibandingkan dengan r tabel untuk taraf signifikansi 0,05 dengan dk (derajat kebebasan) 10-2 adalah 0,707. jika r_1 atau r_{xy} lebih besar dari r tabel, maka reliabel. Jadi reliabilitas instrumen adalah karena berdasarkan uji coba instrumen ini sudah valid dan reliabel seluruh butirnya, maka instrumen dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. (Sugiyono. 2006: 190). Langkah-langkah untuk menentukan uji reliabilitas terlampir dalam lampiran 6.

4.4 Jenis Data, Langkah-langkah dan Teknik Pengumpulan Data

4.4.1 Jenis Data Penelitian

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data atau informasi yang dikumpulkan secara langsung dari responden yang menggunakan instrumen questionnaire. Data ini adalah data tentang standar kompetensi kerja gabungan KPK pada proyek P4K di Kecamatan Kromengan Malang. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung atau pelengkap data primer.

Dalam penelitian ini, instrumen data penelitian yang digunakan adalah :

1. Data Primer yaitu suatu data yang diperoleh dari pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang akan dibahas yakni kegiatan KPK dan pengetahuan anggota KPK. Data primer dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Questionnaire yaitu memberikan angket yang berisi instrumen pertanyaan. Questionnaire dalam penelitian ini digunakan sebagai alat utama dalam pengumpulan data yang disusun secara terperinci dan lengkap. Tujuan utama dari pembuatan questionnaire ini adalah untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian serta memperoleh informasi yang valid dan reliabel.
 - b. Wawancara, dalam penelitian ini wawancara hanya untuk melengkapi data questionnaire. Wawancara ini dilakukan dengan cara mendatangi setiap anggota kelompok baik itu pengurus maupun anggotanya. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada petugas penyuluh pertanian sebagai informan kunci yang memberikan informasi tentang KPK.
 - c. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung kepada obyek penelitian untuk melengkapi data yang ada sekaligus untuk mendapatkan gambaran mengenai obyek yang diteliti. Observasi ini dilakukan untuk mengamati tentang berapa jumlah anggota dalam kelompok, kegiatan apa saja yang dilakukan kelompok, dan bagaimana keaktifan setiap anggota dalam setiap pertemuan kelompok.
2. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti profil desa dan modul P4K serta dokumentasi lainnya.

4.4.2 Langkah-langkah Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

- a. Melakukan observasi ke Kecamatan Kromengan untuk mengetahui keadaan responden serta menemui penyuluh dan para pengurus KPK desa setempat.
- b. Menentukan jumlah responden yang dijadikan sampel penelitian, yakni KPK yang terdiri dari 2 KPK masing-masing diambil 10 responden.
- c. Responden yang terjaring sebagai sampel penelitian sebanyak 20 responden.

- d. Memberikan informasi berkaitan dengan kepentingan penelitian dan memberikan petunjuk pengisian alat pengumpul data.
- e. Membagikan alat pengumpul data/questionnaire kepada responden yang menjadi sampel penelitian.
- f. Mengumpulkan lembar jawaban hasil kerja responden dan melakukan cek ulang untuk memeriksa kelengkapan identitas dan jawaban responden pada setiap lembar jawaban.
- g. Menghitung hasil pekerjaan responden pada setiap lembar jawaban dan memberikan skor.
- h. Melakukan tabulasi data untuk kemudian dianalisis oleh peneliti.

4.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang lazim dilakukan menurut Sugiyono (2006: 194) adalah questionnaire (angket), interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya menggunakan questionnaire (angket), secara teknis langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Verifikasi data
Verifikasi data dilakukan untuk menyeleksi atau memilih data yang memadai untuk diolah. Proses seleksi ditempuh dengan cara memeriksa dan menyeleksi kelengkapan pengisian yang dilakukan oleh responden baik identitas maupun jawabannya
- b. Penyekoran
Data yang ditetapkan untuk diolah kemudian diberi skor untuk setiap jawaban. Instrumen pengumpul data tentang Analisis Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Gabungan KPK menggunakan skala likert yang menyediakan tiga alternatif jawaban dengan skor sebagai berikut:
Skor 3 diberikan kepada responden yang menjawab A
Skor 2 diberikan kepada responden yang menjawab B
Skor 1 diberikan kepada responden yang menjawab C

Contoh penyekoran butir pertanyaan terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Kriteria Penyebaran Instrumen Pengumpul Data

No. Item Soal	Jawaban Responden		
	A	B	C
1	3	2	1

Pelaksanaan pengumpulan data tentang Analisis Aktual Kompetensi Kerja Gabungan KPK di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang ini dilakukan oleh peneliti sendiri pada bulan Januari Tahun 2007 dengan dibantu penyuluh.

4.5 Metode Analisis Data

Penelitian deskriptif ini analisis datanya diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara melakukan perhitungan, sehingga setiap rumusan masalah dapat ditemukan jawabannya secara kuantitatif. Data utama dari penelitian akan dapat diketahui dengan jelas dari hasil analisis deskriptif ini. Data hasil analisis deskriptif dapat disajikan dalam bentuk tabulasi silang, grafik batang, dan pie chart (Sugiyono, 2006: 246). Adapun langkah-langkah untuk menjawab rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjawab rumusan masalah deskriptif pertama, mengenai seberapa baik Aktual Kompetensi Kerja (AKK) tentang pengenalan gabungan KPK yang dicapai di Kromengan didapatkan melalui pemaparan dari hasil data primer di lapangan kemudian diolah peneliti dengan rumus prosentase.
2. Untuk dapat menjawab rumusan masalah deskriptif kedua, mengenai pengetahuan persepsi yang dicapai anggota KPK tentang dinamika dan Kerjasama gabungan KPK juga dengan cara menghitung hasil data primer di lapangan dengan rumus persentase sebagai berikut

$$P = \frac{S_h}{S_i} \times 100\%$$

Dimana:

P = Persentase

Sh = Skor hasil penelitian

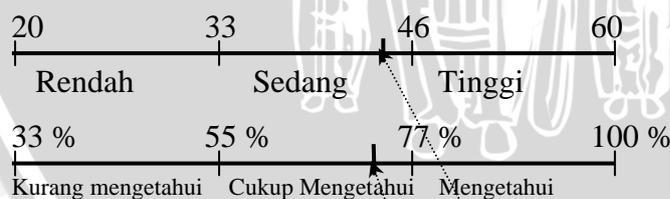
Si = Skor ideal

Adapun langkah-langkahnya menurut Sugiyono (2006: 246) adalah:

- a. Pertama-tama ditentukan skor ideal. Skor ideal adalah skor yang ditetapkan dengan asumsi bahwa setiap responden pada setiap pernyataan

- memberi jawaban dengan skor tertinggi. Skor tertinggi jawaban adalah 3×20 soal = 60.
- Kemudian menghitung skor hasil penelitian berdasarkan jumlah dari distribusi frekuensi jawaban responden.
 - Selanjutnya membagi skor hasil penelitian dengan skor ideal dikalikan dengan 100 %.
 - Rentangan jawaban responden tersebut dalam penelitian ini digambarkan dalam analisis skala likert dengan merekapitulasi data dari 20 responden. Patokan kategorisasi didasarkan pada interval yang diperoleh dari skor terendah sebesar 1×20 responden = 20 dan skor tertinggi $3 \times 20 = 60$, sehingga kita dapat membuat 3 kelas interval.
 - Ketiga kelas interval tersebut adalah
 - untuk jawaban yang bernilai 20-33 tergolong rendah
 - untuk jawaban yang bernilai >33-46 tergolong sedang, dan
 - untuk jawaban yang bernilai >46-60 tergolong tinggi,
 - Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan dengan skala kualifikasi sebagaimana dikutip dari Riduan (2006: 18) sebagai berikut:
 - Angka 33 % - 55 % = dianggap kurang mengetahui
 - Angka >55 % - 77 % = dianggap cukup mengetahui
 - Angka >77 % - 100 % = dianggap mengetahui

Secara grafis dapat digambarkan intervalnya sebagai berikut:



- Contoh perhitungan data hasil penelitian ini dalam bentuk tabel sebagai berikut:

DATA PILIHAN JAWABAN	A	B	C	Σ
FREKUENSI JAWABAN	8	9	3	20
SKOR HASIL / AKK	24	18	3	●45
SKOR IDEAL (SKOR MAX. x Σ F)	60			
PERSENTASE ($\text{Sh/Si} \times 100\%$)	●75.00			

Hasil analisis data tersebut disajikan dan dibahas dalam bab enam.

V. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

5.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Desa Karangrejo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang. Seperti daerah-daerah lain yang letaknya sebelah selatan Kota Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan memiliki topografi tanah yang bergunung atau berbukit-bukit. Dengan kondisi tanah di daerah dataran tinggi maka pertanian di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan mendukung penduduk untuk bekerja di sektor pertanian.

Secara geografis Desa Karangrejo mempunyai bentangan wilayah yang datar dengan ketinggian 425 m di atas permukaan laut (dpl) pada kisaran antara 350- 450 dpl, dengan suhu rata-rata 28° C dan curah hujan rata-rata sekitar 1900 mm/tahun.

Rata-rata curah hujan terbesar terjadi pada bulan Januari hingga Maret sebesar 25 mm dan rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Oktober sebesar 3 mm, dengan demikian Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan selalu mengalami kekeringan setiap tahunnya. Dengan curah hujan yang relatif kecil setiap tahunnya ini maka sangat berdampak kepada keadaan pertanian dan tingkat penerimaan masyarakat Desa Karangrejo yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Jarak Desa Karangrejo dengan pusat pemerintahan Kecamatan Kromengan sejauh ± 2,5 Km dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor, jarak ke pusat pemerintahan Kabupaten Malang sejauh 30 Km, jarak ke pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur sejauh 115 Km. Berjarak ± 40 km dari Kota Malang, Desa Karangrejo memiliki luas wilayah 12,40 km² atau sekitar 10,24% dari luas wilayah Kecamatan Kromengan. Dengan luas wilayah ini, Desa Karangrejo memiliki batas-batas wilayah administrasi yang jelas, batas-batas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barat berbatasan dengan Desa Peniwen Kecamatan Kromengan.
2. Utara berbatasan dengan Desa Bangelan Kecamatan Wonosari.
3. Timur berbatasan dengan Desa Kluwut Kecamatan Wonosari.
4. Selatan berbatasan dengan Desa Kromengan Kecamatan Kromengan.

5.2 Keadaan Penduduk Daerah Penelitian

5.2.1 Komposisi Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin

Penduduk Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan berjumlah 5.560 jiwa dengan komposisi 2.720 jiwa laki-laki dan 2.836 jiwa adalah perempuan. Berkaitan dengan komposisi penduduk Desa Karangrejo menurut umur dan jenis kelamin, maka dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Karangrejo (Monografi Desa).

Tabel 6. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Tahun 2008.

Tingkat Umur (Thn)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
0-5	311	348	659	11,86
6-14	434	455	889	16,00
15-20	187	214	401	7,21
21-30	510	537	1047	18,84
31-40	548	589	1137	20,46
41-55	376	405	780	14,03
> 55	354	289	643	11,57
Total	2.720	2.836	5.556	100

Sumber: Data Primer Diolah 2008.

Pada tabel 6 di atas menjelaskan bahwa penduduk Desa Karangrejo merupakan usia produktif, ini dibuktikan bahwa jumlah penduduk usia angkatan kerja (15-55 tahun) berjumlah 60,54% dari total penduduk Desa Karangrejo. Dengan demikian usia produktif ini merupakan sebuah potensi SDM yang layak untuk diberdayakan agar dapat meningkatkan pengetahuan pertanian maupun pendapatan rumah tangga anggota masyarakat melalui kegiatan pendidikan maupun latihan.

5.2.2. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata pencapaian merupakan salah satu variabel penting dalam kehidupan suatu masyarakat, khususnya dalam melihat tingkat pendapatan atau ekonomi suatu masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat dipaparkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Karangrejo bermata pencapaian sebagai buruh tani dan petani. Komposisi penduduk menurut mata pencapaian dapat dilihat dalam tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencapaian di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Tahun 2008.

Mata Pencapaian	Jumlah	Persentase (%)
TNI/POLRI	19	0,90
PNS/Guru	40	1,89
Karyawan Swasta	200	9,48
Wiraswasta/Pedagang/Pengusaha	20	0,94
Petani	687	32,59
Buruh Tani	830	39,37
Pertukangan	195	9,25
Pengrajin/Penjahit	56	2,65
Montir/Sopir	61	2,89
Total	2.108	100

Sumber: Data Primer Diolah 2008.

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan bermata pencapaian sebagai buruh tani (39,37%) dan petani (32,59%) dan lainnya sebagai tukang, PNS, pedagang, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Karangrejo didominasi oleh penduduk yang menggantungkan hidup pada lahan pertanian.

5.2.3. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Pendidikan juga merupakan variabel terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, secara sosial tingkat pendidikan seseorang dapat menunjukkan status sosial masyarakat. Untuk mengetahui komposisi penduduk Desa Karangrejo dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Tahun 2008.

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
Tidak Sekolah	819	29,08
Tidak Tamat SD	315	11,18
Sekolah Dasar	675	23,97
Tamat SLTP	525	18,64
Tamat SLTA	427	15,16
Tamat Akademik	31	1,10
Tamat Perguruan Tinggi	24	0,85
Total	2.816	100

Sumber: Data Primer Diolah 2008.

Berdasarkan data tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa responden yang tidak sekolah (29,08%), responden yang tidak tamat SD (11,18%), responden yang tamat Sekolah Dasar (23,97%), dan responden yang tamat SLTP (18,64%) masih mendominasi dalam tingkatan pendidikan penduduk Desa Karangrejo, dengan demikian kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih tergolong rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat akan aspek pendidikan sebagai penentu arah perubahan agaknya perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam keberlanjutan proses pembangunan.

5.3 Keadaan Pertanian Daerah Penelitian

Letak geografis Desa Karangrejo dan desa-desa lain dalam wilayah Kecamatan Kromengan berada pada daerah topografi berbukit-bukit, maka sebagian lahan pertanian adalah lahan kering sehingga lahan perkebunan relatif lebih sempit jika dibandingkan dengan lahan kering dan persawahan tadah hujan. Desa Karangrejo memiliki luas wilayah 484, 575 Ha, yang terdistribusi ke dalam berbagai jenis penggunaannya di Desa Karangrejo penggunaan lahan pertanian oleh penduduk dapat dilihat pada tabel 9 distribusi penggunaan lahan di bawah ini.

Tabel 9. Distribusi Lahan Penduduk di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Tahun 2008.

Penggunaan Lahan	Jumlah (ha)	Persentase (%)
Lahan kering dan pemukiman	234,7	48,43
Persawahan	230,4	47,54
Tanah perkebunan	10	2,06
Tanah fasilitas negara	9,475	1,95
Total	484,575	100

Sumber : Data Primer Diolah 2008.

Berdasarkan data tabel 9 di atas terlihat lahan kering dan persawahan mempunyai luasan yang paling besar yakni 48,43% atau sekitar 234,7 ha dan persawahan tadah hujan sekitar 47,54% atau sekitar 230,3 ha. Ini menunjukkan bahwa iklim kering dengan intensitas hujan yang relatif kecil mengakibatkan masyarakat Desa Karangrejo lebih memilih jenis usahatani tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ubi kayu dan lain sebagainya. Berkaitan dengan jenis usaha tani tersebut maka dapat dilihat dalam tabel distribusi luas lahan tanaman bahan makanan di bawah ini.

Tabel 10. Distribusi Lahan Tanaman Pangan Penduduk Menurut Komoditas di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Tahun 2008.

Penggunaan Lahan	Jumlah (ha)	Persentase (%)
Jagung	230	70,55
Kacang kedelai, Kacang tanah	12	3,68
Padi ladang dan padi sawah	35	10,73
Sayur-sayuran	11	3,37
Ubi kayu, ubi jalar	28	8,58
Lain-lain	10	3,06
Total	326	100

Sumber : Data Primer Diolah 2008.

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa luas panen tanaman bahan pangan menunjukkan jagung menduduki produksi tertinggi yaitu sebesar 70,55%, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Karangrejo

menanam jagung pada musim hujan sedangkan padi menempati urutan kedua sebanyak 10,73%, dimana ditanam di sawah atau di ladang. Sedangkan 3,06% meliputi kentang, buncis, cabe, mentimun dan tanaman-tanaman apotik hidup lainnya seperti kunyit dan lain sebagainya. Desa Karangrejo merupakan daerah pegunungan dan dipengaruhi oleh keadaan geografisnya, maka dalam proses pengairan lahan sawah sangat tergantung pada air hujan, sehingga sawah tersebut hanya dapat ditanami padi satu kali dalam setahun.

5.4 Keadaan Sosial Budaya Daerah Penelitian

Pada umumnya masyarakat Desa Karangrejo beragama Islam, ini terlihat dari jumlah penduduk yakni 5.517 jiwa beragama Islam, sedangkan 48 jiwa beragama Kristen, jumlah rumah ibadah seperti mesjid berjumlah empat buah dan gereja berjumlah satu buah. Pada umumnya masyarakat senantiasa menjaga kerukunan hidup beragama sehingga terbina sikap toleransi antar umat beragama.

Sarana dan prasarana pendidikan yang tersebar di Desa Karangrejo terdiri dari TKK berjumlah tiga unit dengan jumlah guru enam orang dan murid berjumlah 65 orang, Sekolah Dasar (SD) dan sederajat memiliki jumlah bangunan sebanyak dua unit dengan jumlah guru 16 orang, dengan jumlah murid 310 orang, sedangkan SLTP memiliki satu bangunan dengan jumlah murid 124 orang dengan jumlah guru sebanyak 23 orang. Desa Karangrejo juga memiliki empat lembaga pendidikan keagamaan dengan jumlah peserta didik sebanyak 256 orang dengan tenaga pengajar sebanyak sepuluh orang.

Kegiatan budaya dan keagamaan yang ada di Desa Karangrejo meliputi perkumpulan ludruk sebanyak tiga group, karawitan dua group, jaranan delapan group, 13 group jedor dan empat group samprohan. Kegiatan yang paling menonjol dalam hal keagamaan adalah pembacaan Surat Yasin yang dilakukan seminggu sekali. Hal ini didukung dengan jumlah pemeluk agama Islam yang mayoritas di Desa Karangrejo.

5.5 Karakteristik Rumah Tangga Petani Anggota Kelompok Petani Kecil (KPK) Secara Keseluruhan di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan.

Responden dalam penelitian ini adalah Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK) yang menjadi anggota P4K di Kelompok Kenanga dan Sidodadi di Desa

Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Petani yang menjadi anggota KPK dapat dilihat dari karakteristik yang terdiri dari jenis kelamin petani, umur petani, jumlah keluarga petani, tingkat pendidikan petani, pekerjaan petani, dan luas penguasaan lahan petani.

5.5.1 Jenis Kelamin Petani Anggota Kelompok Petani Kecil (KPK).

Berdasarkan hasil olahan data primer di dua kelompok yaitu Kenanga dan Sidodadi dapat diketahui bahwa petani yang terdaftar dalam daftar anggota KPK adalah berjenis kelamin perempuan. Hal ini dilatar belakangi karena usaha jamu gendong rata-rata didominasi oleh kaum perempuan. Tabel 11 di bawah ini menggambarkan petani di Kelompok Kenanga dan Sidodadi.

Tabel 11. Jenis Kelamin Petani Anggota Kelompok Petani Kecil (KPK) di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Tahun 2008.

No	Uraian Jenis Kelamin	Kelompok Petani Kecil			
		Kenanga	%	Sidodadi	%
1.	Laki-laki	3	15	-	-
2.	Perempuan	17	85	20	100
Total		20	100	20	100

Sumber : Data Primer Diolah 2008.

Jenis kelamin dari petani di kelompok Kenanga diketahui bahwa petani responden dalam penelitian ini adalah perempuan yaitu sebanyak 17 orang atau sebesar 17%, sedangkan untuk laki-laki hanya sebanyak tiga orang atau sebesar 15%. Untuk kelompok Sidodadi diketahui bahwa semua petani responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 20 orang atau sebesar 100%. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa petani yang terbesar berjenis kelamin perempuan karena usaha jual jamu gendong ini digunakan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

5.5.2 Umur Petani Anggota Kelompok Petani Kecil (KPK)

Umur disini berhubungan dengan kematangan dan pengalaman petani dalam berorganisasi di KPK mengikuti program P4K, selain itu umur berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan sebagai pedoman untuk mengetahui tingkat kemudahan petani dalam menerima atau mengadopsi pengetahuan baru serta tingkat kemampuan petani dalam bertukar pengalaman dan keterampilan dalam

usaha pengolahan jamu gendong. Umur petani dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu kurang dari 36 tahun, antara 36-40 tahun, dan lebih dari 40 tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang paling dominan adalah umur antara 36-40 tahun dapat dilihat tabel tiga belas, hal ini menunjukkan bahwa anggota KPK mayoritas berada pada umur dan kondisi yang matang untuk memutuskan menjadi anggota gabungan KPK.

Tabel 12. Umur Petani Anggota Kelompok Petani Kecil (KPK) di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Tahun 2008.

No	Uraian Umur	Kelompok Petani Kecil			
		Kenanga	%	Sidodadi	%
1.	< 36	6	30	7	35
2.	36 – 40	10	50	8	40
3.	> 40	4	20	5	25
Total		20	100	20	100

Sumber : Data Primer Diolah 2008.

Pada tabel 12 di atas petani kelompok Kenanga yang berumur rata-rata 36-40 tahun sebanyak sepuluh orang atau sebesar 50%, kurang dari 36 tahun sebanyak enam orang atau sebesar 30% dan yang lebih dari 40 tahun sebanyak empat orang atau sebesar 20%. Sedangkan pada kelompok Sidodadi petani yang berumur antara 36-40 tahun sebanyak delapan orang atau sebesar 40%, petani yang berumur kurang dari 36 tahun sebanyak tujuh orang atau sebesar 35% dan lebih dari 40 tahun sebanyak lima orang atau sebesar 25%. Menurut Soekartawi (1996), umur petani yang matang mempunyai pertimbangan dan pengambilan keputusan relatif lebih matang dibandingkan petani yang masih muda.

5.5.3 Jumlah Keluarga Petani Anggota Kelompok Petani Kecil (KPK).

Jumlah keluarga dapat mempengaruhi keputusan petani dalam dalam organisasi KPK. Ini disebabkan karena desakan kebutuhan hidup keluarga dan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan petani tersebut. Untuk melihat jumlah tanggungan keluarga inti dan keluarga di luar keluarga inti petani dapat dilihat pada tabel 13 dan 14 di bawah ini menjelaskan jumlah keluarga inti petani responden.

Tabel 13. Jumlah Keluarga Inti Petani Anggota Kelompok Petani Kecil (KPK) di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Tahun 2008.

No	Uraian Jumlah Keluarga Inti	Kelompok Petani Kecil			
		Kenanga	%	Sidodadi	%
1.	3-4	4	20	7	35
2.	5-6	12	60	9	45
3.	>7	4	20	4	20
Total		20	100	20	100

Sumber : Data Primer Diolah 2008.

Pada tabel 13 di atas jumlah keluarga inti petani pada kelompok Kenanga yang memiliki tanggungan keluarga inti berjumlah 5-6 orang sebanyak 12 orang atau sebesar 60%, yang memiliki tanggungan keluarga 3-4 orang sebanyak empat orang atau sebesar 20%, sedangkan yang memiliki tanggungan keluarga lebih dari 7 orang sebanyak empat orang atau sebesar 20%. Untuk kelompok Sidodadi yang mempunyai jumlah tanggungan keluarga inti 5-6 orang sebanyak sembilan orang atau sebesar 45%, yang memiliki tanggungan keluarga 3-4 sebanyak tujuh orang atau sebesar 35% sedangkan yang memiliki tanggungan keluarga lebih dari 7 sebanyak empat orang atau sebesar 20%. Keluarga inti petani terdiri dari istri, suami, dan juga anak kandung.

Untuk keluarga petani yang berada diluar keluarga inti rumah tangga yang berada dalam satu rumah yaitu terdiri dari orang tua atau mertua laki-laki, orang tua atau mertua perempuan, menantu dan cucu, serta saudara atau keponakan. Keluarga yang diluar keluarga inti petani tetapi ikut berada dalam satu rumah dengan petani dapat dilihat pada tabel 14 di bawah ini:

Tabel 14. Jumlah Keluarga Diluar Keluarga Inti Petani Anggota Kelompok Petani Kecil (KPK) di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Tahun 2008.

No	Uraian Keluarga Diluar Inti	Kelompok Petani Kecil			
		Kenanga	%	Sidodadi	%
1.	Orang tua/Mertua	4	50	4	44,44
2.	Saudara/Keponakan	4	50	2	22,22
3.	Menantu dan cucu	-	-	3	33,33
Total		8	100	9	100

Sumber : Data Primer Diolah 2008.

Berkaitan dengan tabel 14 di atas menunjukkan bahwa di dalam kelompok Kenanga dan Sidodadi pada umumnya mempunyai tanggungan keluarga baik orang tua atau mertua, menantu dan cucu, saudara atau keponakan. Untuk kelompok Kenanga ada 50% atau sebanyak empat orang yang mempunyai tanggungan keluarga orang tua/mertua, sedangkan sebanyak empat orang atau sebesar 50% yang mempunyai tanggungan saudara atau keponakan dan kelompok Sidodadi sebanyak empat orang atau sebesar 44,44% tanggungan terhadap orang tua atau mertua. Tanggungan terhadap saudara atau keponakan dari sebanyak dua orang atau sebesar 22,22% dan yang memiliki tanggungan terhadap menantu dan cucu sebanyak tiga orang atau sebesar 33,33%. Pada umumnya keluarga inti dan atau saudara yang menumpang belum memiliki pekerjaan tetap, masih berada di bangku sekolah, atau sudah lanjut usia.

5.5.4 Pekerjaan Petani Anggota Kelompok Petani Kecil (KPK)

Pekerjaan petani akan mempengaruhi dalam mengambil kredit karena penerimaan dan pengeluaran akan berbeda. Dalam penelitian ini jenis pekerjaan petani akan dibagi menjadi pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sampingan dari anggota KPK di Desa Karangrejo sebagai penjual jamu gendong. Pada tabel 15 di bawah ini diketahui pekerjaan petani anggota KPK di Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan.

Tabel 15. Pekerjaan Petani Anggota Kelompok Petani Kecil (KPK) di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Tahun 2008.

No	Nama Kelompok	Pekerjaan Anggota Kelompok Petani Kecil (KPK)						
		Pokok	Rmh Tangga	%	Sampingan	Rmh Tangga	%	
1.	Kenanga	Buruh Tani	8	40	Jamu Gendong	2	10	
			Jamu Gendong, Pedagang	2	10			
			Jamu Gendong, Peternak	2	10			
			Jamu Gendong, Tukang	1	5			
			Ojek	1	5			
		Tukang Ojek	Jamu Gendong, Kuli Bangunan					
			Jamu Gendong	3	15			
			Jamu Gendong, Peternak	1	5			
			Pedagang	2	10			
			Kuli	2	10			
			Jamu Gendong, Peternak	1	5			
			Bangunan	1	5			
			Jamu Gendong, Tukang Ojek	1	5			
Kuli Pasar	1	5						
Tukang Pijat	1	5						
Sopir	1	5						
Tukang	1	5						
Bangunan	1	5						
Total			20	100		20	100	
No	Nama Kelompok	Pekerjaan Anggota Kelompok Petani Kecil (KPK)						
		Pokok	Rmh Tangga	%	Sampingan	Rmh Tangga	%	
2.	Sidodadi	Buruh Tani	10	50	Jamu Gendong, Pedagang	4	20	
			Jamu Gendong, Peternak	3	15			
			Jamu Gendong, Tukang	1	5			
			Ojek	1	5			
			Jamu Gendong, Kuli Bangunan					
		Pedagang	Jamu Gendong	1	5			
			Jamu Gendong, Sopir	1	5			
			Jamu Gendong, Peternak	3	15			
		Tukang Bangunan	Jamu Gendong	1	5			
			Jamu Gendong, Tukang Ojek	1	5			
		Montir	2	10				
		Kuli	1	5				
		Bangunan						
Kuli Pasar	1	5						
Jamu Gendong, Tukang Pijat	1	5						
Total			20	100		20	100	

Sumber: Data Primer Diolah 2008

Berkaitan tabel 15 di atas dapat dilihat bahwa umumnya pekerjaan pokok petani pada kelompok Kenanga dan kelompok Sidodadi adalah buruh tani, tukang ojek, pedagang, montir, kuli bangunan, kuli pasar, tukang pijat, sopir, dan tukang bangunan akan tetapi pekerjaan sampingan yang ditekuni oleh anggota masing-masing kelompok berbeda-beda dan bervariasi sesuai dengan kemampuan dan tingkat kesibukan para anggota yang bersangkutan.

Pekerjaan sampingan untuk anggota KPK pada umumnya sebagai penjual jamu gendong sudah sejak lama, tetapi ada beberapa petani juga menekuni pekerjaan sampingan di luar jamu gendong (lihat pada tabel 16). Pekerjaan pokok petani yang paling banyak ditekuni sebagai buruh tani dengan usaha sampingan jamu gendong sebesar 10%, jamu gendong dan pedagang sebesar 10%, jamu gendong dengan peternak 10%, jamu gendong dengan tukang ojek 5%, jamu gendong dan kuli bangunan 5%, Pekerjaan pokok sebagai tukang ojek (20%) dengan sampingan usaha jamu gendong sebesar (15%) dan jamu gendong dan peternak (5%). Sedangkan pada kelompok Sidodadi pekerjaan yang banyak ditekuni anggota KPK sebagai buruh tani juga dengan memiliki usaha sampingan jamu gendong dan pedagang sebesar 20%, jamu gendong dan peternak 15%, jamu gendong dan tukang ojek 5%, jamu gendong dan kuli bangunan 5%. Petani yang mempunyai pekerjaan pokok pedagang sebesar 20% dengan mempunyai usaha sampingan jamu gendong sebesar 5%, jamu gendong dan sopir 5%, jamu gendong dan peternak 10%. Pada kelompok Sidodadi sebagian besar memiliki pekerjaan sampingan ganda daripada kelompok Kenanga sehingga pendapatan yang diperoleh rumah tangga petani tersebut dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

5.5.5 Luas Penguasaan Lahan Petani Anggota Kelompok Petani Kecil (KPK).

Luas lahan pertanian yang dikuasai oleh petani anggota Kelompok Petani Kecil (KPK) yang mengikuti proyek P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil) di Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 16 yang dipaparkan di bawah ini.

Tabel 16. Luas Penguasaan Lahan Petani Anggota Kelompok Petani Kecil (KPK) di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Tahun 2008.

No	Uraian Luas Penguasaan Lahan	Kelompok P4K			
		Kenanga	%	Sidodadi	%
1.	< 250 m ²	10	50	8	40
2.	250 – 400 m ²	8	40	8	40
3.	> 400 m ²	2	10	4	20
Total		20	100	20	100

Sumber : Data Primer Diolah 2008.

Berdasarkan data pada tabel 16 di atas dapat dilihat bahwa kelompok Kenanga 50% atau sebanyak sepuluh orang petani memiliki aset penguasaan lahan kurang dari 250 m², yang memiliki luas lahan antara 250-400 m² dikuasai oleh 40% atau sebanyak delapan orang petani dan 10% dikuasai oleh dua orang petani saja yang memiliki aset penguasaan lahan yang lebih dari 500m². Sedangkan kelompok Sidodadi, petani yang memiliki lahan seluas kurang dari 250 m² sebanyak delapan orang atau sebesar 40%, yang memiliki lahan 250-400 m² sebanyak delapan orang atau sebesar 40% sedangkan yang memiliki lahan lebih dari 400 m² sebanyak empat orang atau sebesar 20%. Data tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar petani hanya memiliki lahan pekarangan yang meliputi pekarangan rumah semata dan lahan disamping atau dibelakang rumah yang hanya ditanami tanaman-tanaman berumur pendek dan tanaman obat-obatan. Pada umumnya mereka hanya menjadi buruh tani di desa mereka atau menekuni pekerjaan-pekerjaan lain seperti tukang ojek, penjual jamu gendong, usaha warung dan pekerjaan serabutan lainnya.

VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

6.1 Gambaran Umum P4K Daerah Penelitian

Pertengahan fase keempat atau tahun 2005, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan masuk dalam daftar proyek P4K. Bergabungnya Desa Karangrejo dalam proyek P4K setelah diperoleh data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai daerah-daerah yang terkategori miskin karena tujuan daripada proyek P4K ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani-nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan meliputi petani pemilik pengelola lahan sempit, petani penggarap/penyakap, buruh tani, nelayan dengan peralatan sederhana, pengrajin, pedagang dan kelompok masyarakat miskin di pedesaan lainnya melalui usaha bersama dalam bentuk Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK) yang terdiri dari 8-16 orang. P4K sendiri merupakan salah satu proyek di Departemen Pertanian (Deptan) yang bekerjasama dengan BRI dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayah pedesaan melalui pengembangan sumber daya manusia dan penyediaan pelayanan kredit mikro bagi pengembangan usaha mikro di perdesaan.

Sosialisasi tentang proyek P4K di daerah yang masuk dalam daftar masyarakat miskin yang akan dibina dengan menunjuk Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang sudah ditetapkan dan dibantu aparat desa setempat. Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh PPL dalam membimbing masyarakat di pedesaan yaitu dengan melakukan observasi lapangan untuk mengetahui lokasi yang paling banyak penduduk miskinnya dan mempunyai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh Petani-Nelayan Kecil (PNK). Untuk identifikasi PNK dengan melakukan wawancara agar mengetahui pendapatan per kapita per tahun, anggota yang pendapatannya < 320 kg beras/orang/tahun yang akan menjadi binaan proyek P4K, saling mengenai satu sama lain, mempunyai tujuan yang

sama, bertempat tinggal berdekatan sehingga mudah berkumpul dan melaksanakan kegiatan, mentaati keputusan bersama, bersedia tanggung renteng.

Pembentukan Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK) dilakukan dengan bimbingan PPL melalui musyawarah untuk mufakat dengan keputusan diambil oleh para calon anggota, jenis usaha KPK satu jenis atau lebih jika terdapat kaitannya satu sama lain agar terdapat kerjasama yang efektif, Pengurus KPK (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh seluruh anggota untuk jangka waktu yang ditetapkan bersama atau secara bergiliran, nama KPK ditetapkan secara musyawarah dan mufakat para anggota, berdirinya KPK baru syah jika sudah disahkan oleh Kepala Desa. Wawancara dilakukan lagi untuk mengetahui lebih mendalam tentang kondisi sosial ekonomi, persepsi, dan aspirasi tentang kehidupan anggota KPK yang akan digunakan untuk bahan perencanaan pembinaan.

PPL membimbing para anggota KPK dalam mengadakan musyawarah untuk menetapkan jenis usaha bersama dan menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB) secara tertulis agar mendapatkan kredit. Selain RUB syarat mendapatkan kredit P4K adalah mempunyai tabungan di bank. PPL bekerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam memberikan pelatihan dan pembinaan dengan mengikutsertakan dalam kursus kewirausahaan, magang, temu usaha dan pameran. Dalam KPK anggota diajarkan untuk bekerjasama dalam organisasi lebih besar melalui kerjasama antar KPK dan perkoperasian, sehingga usaha bersama mereka lebih efektif dan efisien serta wawasan usaha menjadi luas. Pelayanan dan kemudahan yang tersedia dari proyek P4K ini seperti kemudahan kredit dari proyek P4K, kursus bagi kelompok, latihan bagi petugas pembina lapangan, ikut serta dalam berbagai kegiatan lain.

Desa Karangrejo masuk dalam daftar proyek P4K dengan usaha ekonomi skala kecil yang potensial yaitu jamu gendong. Usaha jamu gendong ini rata-rata dilakukan oleh ibu-ibu untuk membantu suami menambah pendapatan yang dirasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena mayoritas pekerjaan pokok suami mereka sebagai buruh tani dengan pendapatan rendah. Pekerjaan jamu gendong ini sudah lama ditekuni oleh sebagian ibu-ibu yang tergabung

dalam kelompok P4K dengan mengajak ibu-ibu bahkan bapak-bapak yang ingin bergabung berjualan jamu.

Dalam seleksi rekrutmen, anggota KPK terbagi dalam kelompok Kenanga 1 dan 2, Sidodadi 1 dan 2. masing-masing kelompok terdiri dari 20 orang anggota yang terdiri dari 3 orang pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama dan 7 orang anggota. Di dalam proses rekrutmen terkesan ada unsur nepotisme, hal ini disebabkan karena pada saat seleksi calon anggota, PPL menawarkan secara terbuka siapa-siapa yang mau bergabung dan sebagian ada yang dipilih berdasarkan kedekatan dengan PPL atau aparat desa dengan mengajak saudara atau orang-orang yang dekat untuk bergabung.

Syarat anggota KPK adalah masyarakat miskin dengan pendapatan < 320 kg setara beras/orang/tahun dan mempunyai usaha, tetapi pada khusus Sidodadi pemilihan anggota tidak tepat sasaran karena umumnya ekonomi keluarganya lebih baik daripada Kenanga. Beberapa anggota tidak mempunyai usaha, baru setelah bergabung dengan KPK menjalankan usaha jamu gendong, seharusnya dengan bergabungnya dalam KPK anggota sudah mempunyai usaha yang nantinya akan diberi pembinaan agar usahanya berkembang dengan adanya bantuan kredit P4K.

Minimnya pertemuan yang diadakan yaitu sebulan sekali menyebabkan kurang efektifnya pembinaan, semakin sering pertemuan dilakukan maka tujuan proyek P4K ini dapat tercapai. Setiap kali pertemuan, PPL akan memberi materi-materi yang berkaitan aspek peningkatan kesadaran diri seperti psikologi, budaya; aspek peningkatan pendapatan seperti sumberdaya, modal, pasar, teknologi; aspek peningkatan kesejahteraan seperti ekonomi, rohani, kesehatan, KB, pendidikan, hukum, lingkungan hidup; aspek peningkatan sosial-politik dan budaya seperti kesejahteraan ekonomi dan sosial, politik, kebangsaan. Minimnya pertemuan pada KPK di Desa Karangrejo mencakup materi pembinaan yang masih mendasar pada aspek pengelolaan usaha, kredit dan tabungan. Selain minim pertemuan, pelatihan yang diadakan juga terbatas kalau ada tetapi tidak ditindaklanjuti sehingga sebatas pengetahuan bagi anggota KPK.

6.2 Aktual Kompetensi Kerja (AKK) anggota KPK Terhadap Pengenalan Gabungan KPK

Pada sub bab ini akan disajikan paparan data hasil penelitian tentang aktual kompetensi kerja (AKK) responden pada anggota KPK Kenanga dan Sidodadi yang ada di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Januari 2008, setelah sebelumnya dilakukan ujicoba questionnaire pada 10 responden pada bulan Desember 2007. Aktual kompetensi kerja (AKK) anggota KPK dalam penelitian ini diukur melalui 10 indikator dari sub variabel pengenalan Gabungan KPK, yang meliputi pengetahuan tentang: (1) Pengertian Gabungan KPK, (2) Sifat gabungan KPK, (3) Fungsi gabungan KPK, (4) Tujuan Ekonomi Gabungan KPK, (5) Tujuan Sosial Gabungan KPK, (6) Manfaat produktif Gabungan KPK, (7) Manfaat pemasaran Gabungan KPK, (8) Manfaat Pendidikan Gabungan KPK, (9) Sifat pembelajaran Gabungan KPK, dan (10) Pemanfaatan Ekonomi Gabungan KPK.

Skala pengukuran AKK responden dilakukan dengan tiga kategori nilai yaitu, (1) AKK responden terhadap pengenalan gabungan KPK tinggi, (2) AKK responden terhadap pengenalan gabungan KPK sedang, dan (3) AKK responden terhadap pengenalan gabungan KPK rendah

Data questionnaire tersebut kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif persentase yang disajikan dalam bentuk tabel yang diinterpretasikan berdasarkan kategori persentase yakni mengetahui, cukup mengetahui, dan kurang mengetahui. Hasil perolehan dalam penelitian ini akan dipaparkan sekaligus dibahas berdasarkan interpretasi data yang dihitung berdasarkan kualifikasi masing-masing.

Tabel 17. Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Pengertian Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil (AKK*)	Skor Ideal (SKK**)	%
A. Mengetahui	9	27		
B. Cukup Mengetahui	8	16		
C. Kurang Mengetahui	3	3		
Total	20	46	60	76.67 %

Catatan:

*)AKK: Aktual Kompetensi Kerja (Kemampuan yang dicapai responden)

**)SKK : Standard Kompetensi Kerja (Kompetensi yang dituntut dalam diklat)

Berdasarkan tabel 17 di atas, temuan penelitian menunjukkan bahwa frekuensi jawaban responden yakni sebanyak 9 responden menjawab A (mengetahui), 8 responden menjawab B (cukup mengetahui), dan 3 responden menjawab C (kurang mengetahui). Kemudian dari hasil frekuensi jawaban tersebut dikalikan berdasarkan kriteria jawaban untuk mendapatkan skor hasil/AKK yakni sebesar 46. Skor hasil tersebut kemudian dibagi dengan SKK yakni 60 kemudian dikalikan 100 % sehingga diperoleh hasil 76.67 %. Hasil persentase tersebut kemudian diinterpretasikan berdasarkan kualifikasi yang telah ditetapkan yakni cukup mengetahui.

Perolehan hasil sebanyak 76.67 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan tentang pengertian Gabungan KPK minimal satu unsur dari dua unsur. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 76,67 % responden memiliki kompetensi cukup mengetahui bahwa pengertian gabungan KPK merupakan gabungan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan (integral) dalam sistem pemberdayaan KPK, khususnya untuk menjamin keberlanjutan dan manfaat yang diterima oleh anggota KPK (Anonimous, 2004: 4) (Juklak Penumbuhan dan Penguatan kapasitas Gabungan KPK Departemen Pertanian, untuk selanjutnya disebut Anonimos Deptan).

Tabel 18. Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Sifat Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil (AKK)	Skor Ideal (SKK)	%
A. Mengetahui	8	24		
B. Cukup Mengetahui	8	16		
C. Kurang Mengetahui	4	4		
Total	20	44	60	73.33 %

Perolehan hasil sebanyak 73.33 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan minimal dua unsur dari tiga unsur sifat Gabungan KPK yakni bersifat informal, sukarela dan swadaya. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 73, 33 % responden memiliki kompetensi cukup mengetahui bahwa sifat gabungan KPK adalah kelompok lanjutan yang dibentuk dari beberapa KPK yang layak ditingkat pedesaan, bersifat informal, sukarela, dan swadaya atas dasar kesepakatan dan kepentingan bersama (Anonimous Deptan, 2004: 4).

Tabel 19. Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Fungsi Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil (AKK)	Skor Ideal (SKK)	%
A. Mengetahui	8	24		
B. Cukup Mengetahui	9	18		
C. Kurang Mengetahui	3	3		
Total	20	45	60	75.00 %

Perolehan hasil sebanyak 75.00 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan minimal dua unsur dari tiga unsur fungsi Gabungan KPK yakni berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, dan tempat unit produksi atau jasa. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 75, 00 % responden memiliki kompetensi cukup mengetahui bahwa fungsi gabungan KPK adalah sebagai kelas belajar, wahan kerjasama dan unit produksi dan jasa dalam rangka memberikan pelayanan dan manfaat bagi anggotanya (Anonimous Deptan, 2004: 4).

Tabel 20. Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Responden Terhadap Pengetahuannya tentang Tujuan Ekonomi Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil (AKK)	Skor Ideal (SKK)	%
A. Mengetahui	8	24		
B. Cukup Mengetahui	9	18		
C. Kurang Mengetahui	3	3		
Total	20	45	60	75.00 %

Perolehan hasil sebanyak 75.00 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan minimal dua unsur dari tiga unsur tujuan ekonomi Gabungan KPK yakni bertujuan peningkatan modal usaha, skala usaha, dan pemasaran produk atau jasa. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 75, 00 % responden memiliki kompetensi cukup mengetahui bahwa pembentukan gabungan KPK bertujuan memberikan pelayanan dan manfaat ekonomi yang meliputi peningkatan modal usaha, peningkatan skala usaha, dan peningkatan pemasaran produk. (Anonimous Deptan, 2004: 4).

Tabel 21. Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Tujuan Sosial Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil (AKK)	Skor Ideal (SKK)	%
A. Mengetahui	5	15		
B. Cukup Mengetahui	8	16		
C. Kurang Mengetahui	7	7		
Total	20	38	60	63.33 %

Perolehan hasil sebanyak 63.33 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan minimal satu unsur dari dua unsur tujuan sosial Gabungan KPK yakni peningkatan dinamika antar anggota dan peningkatan fasilitas kegiatan belajar mengajar. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 63, 33 % responden memiliki kompetensi cukup mengetahui bahwa pembentukan gabungan KPK bertujuan memberikan pelayanan dan manfaat sosial yang meliputi dinamika antar anggota dan peningkatan fasilitas kegiatan belajar mengajar (Anonymous Deptan, 2004: 4).

Tabel 22. Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Manfaat Produktif Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil (AKK)	Skor Ideal (SKK)	%
A. Mengetahui	8	24		
B. Cukup Mengetahui	8	16		
C. Kurang Mengetahui	4	4		
Total	20	44	60	73.33 %

Perolehan hasil sebanyak 73.33 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan minimal dua unsur dari tiga unsur manfaat produktif Gabungan KPK yakni memperoleh saprodi, modal dan memperbesar skala usaha. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 73, 33 % responden memiliki kompetensi cukup mengetahui bahwa pembentukan gabungan KPK bermanfaat dalam bidang produksi sehingga memperoleh kemudahan bagi anggota KPK untuk memperoleh sarana produksi, modal dan memperbesar skala usaha (Anonymous Deptan, 2004:5).

Tabel 23. Kompetensi Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Manfaat Pemasaran Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil (AKK)	Skor Ideal (SKK)	%
A. Mengetahui	8	24		
B. Cukup Mengetahui	9	18		
C. Kurang Mengetahui	3	3		
Total	20	45	60	75.00 %

Perolehan hasil sebanyak 75.00 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan minimal dua unsur dari tiga unsur manfaat pemasaran dari Gabungan KPK yakni memperoleh informasi, memperlancar dan memperluas pemasaran produk anggota KPK. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 75, 00 % responden memiliki kompetensi cukup mengetahui bahwa pembentukan gabungan KPK bermanfaat dalam bidang pemasaran sehingga memperoleh informasi pasar, memperlancar dan memperluas pemasaran produk anggota gabungan KPK (Anonimous Deptan, 2004:5).

Tabel 24. Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Manfaat Pendidikan Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil (AKK)	Skor Ideal (SKK)	%
A. Mengetahui	8	24		
B. Cukup Mengetahui	9	18		
C. Kurang Mengetahui	3	3		
Total	20	45	60	75.00 %

Perolehan hasil sebanyak 75.00 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan minimal satu unsur dari dua unsur tentang manfaat pendidikan gabungan KPK. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 75, 00 % responden memiliki kompetensi cukup mengetahui bahwa manfaat pendidikan gabungan KPK memberi kemudahan bagi anggota KPK untuk meningkatkan pengetahuan (kognitif), keterampilan (afektif), dan sikap (psikomotorik) (Anonimous, 2004: 5).

Tabel 25. Aktual Kompetensi Kerja (AKK) Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Sifat Pembelajaran Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil (AKK)	Skor Ideal (SKK)	%
A. Mengetahui	8	24		
B. Cukup Mengetahui	8	16		
C. Kurang Mengetahui	4	4		
Total	20	44	60	73.33 %

Perolehan hasil sebanyak 73.33 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan minimal dua unsur dari tiga unsur tentang sifat pembelajaran gabungan KPK. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 73, 33 % responden memiliki kompetensi cukup mengetahui bahwa sifat pembelajaran gabungan KPK sebagai wahana belajar dalam pengembangan kelembagaan petani yang lebih dinamis, demokratis, dan partisipatif (Anonimous, 2004: 5).

Tabel 26. Kompetensi Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Pemanfaatan Ekonomi Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor hasil (AKK)	Skor Ideal (SKK)	%
A. Mengetahui	4	12		
B. Cukup Mengetahui	8	16		
C. Kurang Mengetahui	8	8		
Total	20	36	60	60.00 %

Perolehan hasil sebanyak 60.00 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan minimal dua unsur dari tiga unsur tentang pemanfaatan ekonomi gabungan KPK. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 60,00 % responden memiliki kompetensi cukup mengetahui pemanfaatan ekonomi gabungan KPK memberi kemudahan bagi masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya yaitu saudara, anggota keluarga, dan masyarakat sekitarnya (Anonimous, 2004: 5).

Hasil penelitian yang dipaparkan pada masing-masing indikator di atas dapat disederhanakan dengan dengan melihat tabel dan grafik rekapitulasi Aktual Kompetensi Kerja anggota KPK tentang pengenalan Gabungan KPK berikut ini:

Tabel 27. Rekapitulasi Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Pengenalan Gabungan KPK

INDIKATOR VARIABEL PENGENALAN GABUNGAN	SKOR			%	KATEGORI
	AKK	DKK	SKK		
1. Pengertian Gabungan KPK	46	14	60	76.67	Cukup mengetahui
2. Sifat Gabungan KPK	44	16	60	73.33	Cukup mengetahui
3. Fungsi Gabungan KPK	45	15	60	75.00	Cukup mengetahui
4. Tujuan Ekonomi Gab KPK	45	15	60	75.00	Cukup mengetahui
5. Tujuan Sosial Gab KPK	38	22	60	63.33	Cukup mengetahui
6. Manfaat Produktif Gab KPK	44	16	60	73.33	Cukup mengetahui
7. Manfaat Pemasaran Gab KPK	45	15	60	75.00	Cukup mengetahui
8. Manfaat Pendidikan Gab KPK	45	15	60	75.00	Cukup mengetahui
9. Sifat Pembelajaran Gab KPK	44	16	60	73.33	Cukup mengetahui
10. Pemanfaatan Ekonomi Gab KPK	36	24	60	60.00	Cukup mengetahui

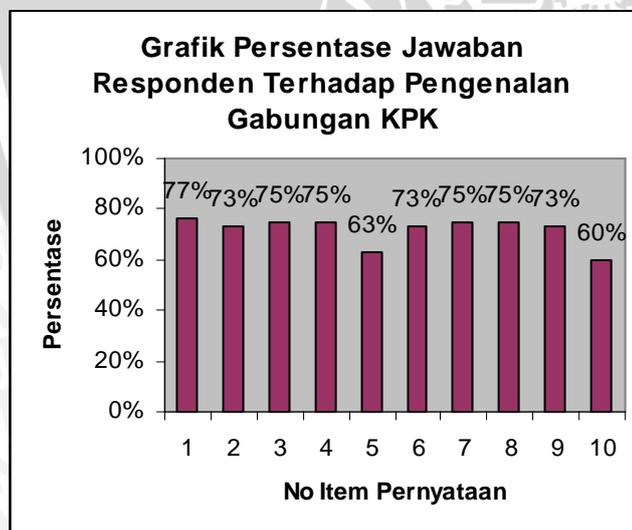
Keterangan:

AKK: Aktual Kompetensi Kerja (Kemampuan yang dicapai responden)

DKK: Diskrepansi Kompetensi Kerja (Selisih antara SKK-AKK)

SKK : Standard Kompetensi Kerja (Kompetensi yang dituntut dalam diklat)

Grafik 1. Rekapitulasi AKK responden terhadap pengetahuannya tentang Pengenalan Gabungan KPK



Keterangan:

1. Pengertian Gabungan KPK
2. Sifat Gabungan KPK
3. Fungsi Gabungan KPK
4. Tujuan Ekonomi Gabungan KPK
5. Tujuan Sosial Gabungan KPK
6. Manfaat Produktif Gabungan KPK
7. Manfaat Pemasaran Gabungan KPK
8. Manfaat Pendidikan Gabungan KPK
9. Sifat Pembelajaran Gabungan KPK
10. Pemanfaatan Ekonomi Gabungan KPK

Berdasarkan Grafik di atas dapat kita ketahui bahwa AKK yang dikuasai oleh anggota tentang pengenalan Gabungan KPK untuk item pengertian Gabungan KPK diperoleh 77 %, sifat gabungan KPK 73 %, Fungsi Gabungan KPK 75 %, Tujuan Ekonomi Gabungan KPK 75 %, Tujuan Sosial Gabungan KPK 63 %, Manfaat Produktif Gabungan KPK 73 %, Manfaat Pemasaran

Gabungan KPK 75 %, Manfaat pendidikan Gabungan KPK 75 %, Sifat Pembelajaran Gabungan KPK 73 %, dan Pemanfaatan Ekonomi Gabungan KPK 60 %. Untuk perolehan tertinggi pada item pengertian Gabungan KPK yakni sebesar 77 % sedangkan perolehan terendah adalah pada item pemanfaatan ekonomi gabungan KPK. Secara rata-rata perolehan ke sepuluh unsur pengenalan gabungan KPK di atas adalah 72 %, artinya perolehan tersebut diinterpretasikan bahwa seluruh anggota KPK baik Kenanga dan Sidodadi cukup mengetahui mengenai pengenalan Gabungan KPK. Dengan diketahui persentase AKK maka kedua KPK tersebut sudah layak untuk menjadi gabungan yang lebih besar.

6.3 Persepsi Responden Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK

Persepsi responden terhadap pengetahuannya tentang Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK dalam penelitian ini diukur melalui 10 indikator yang merupakan komponen sub variabelnya, yang meliputi pengetahuan tentang: (1) Syarat pembentukan Gabungan KPK, (2) Perangkat organisasi Gabungan KPK, (3) Pengurus gabungan KPK, (4) Kekuasaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) Gabungan KPK, (5) Tugas Ketua Gabungan KPK, (6) Tugas sekretaris Gabungan KPK, (7) Tugas bendahara Gabungan KPK, (8) Tugas pengawas Gabungan KPK, (9) Penasihat Gabungan KPK, dan (10) Tugas penasihat Gabungan KPK.

Skala pengukuran persepsi responden dilakukan dengan menggunakan tiga kategori nilai, (1) Persepsi responden terhadap Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK tinggi, (2) Persepsi responden terhadap Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK sedang, dan (3) Persepsi responden terhadap Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK rendah. Hasil perolehan dalam penelitian ini akan dipaparkan sekaligus dibahas berdasarkan interpretasi data yang dihitung berdasarkan kualifikasi masing-masing.

Tabel 28. Persepsi Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Syarat Pembentukan Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil	Skor Ideal	%
A. Mengetahui	6	18	60	68.33 %
B. Cukup Mengetahui	9	18		
C. Kurang Mengetahui	5	5		
Total	20	41		

Perolehan hasil sebanyak 68.33 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan minimal dua unsur dari tiga unsur tentang syarat pembentukan gabungan KPK. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 68, 33 % responden memiliki persepsi cukup mengetahui syarat pembentukan gabungan KPK adalah perangkat organisasi (ketua dan sekretaris serta bendahara), Penasihat dan keanggotaanya (Anonimous, 2004: 5).

Tabel 29. Persepsi Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Perangkat Organisasi Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil	Skor Ideal	%
A. Mengetahui	8	24		
B. Cukup Mengetahui	7	14		
C. Kurang Mengetahui	5	5		
Total	20	43	60	71.67 %

Perolehan hasil sebanyak 71.67 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan minimal satu unsur dari dua unsur tentang perangkat organisasi gabungan KPK. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 71, 67 % responden memiliki persepsi cukup mengetahui perangkat organisasi gabungan KPK adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Tim Manajemen (Anonimous, 2004: 5).

Tabel 30. Persepsi Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Pengurus Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil	Skor Ideal	%
A. Mengetahui	15	45		
B. Cukup Mengetahui	5	10		
C. Kurang Mengetahui	0	0		
Total	20	43	60	71.67 %

Perolehan hasil sebanyak 91.67 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan semua unsur pengurus gabungan KPK. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 91,67 % responden memiliki persepsi mengetahui pengurus organisasi gabungan KPK adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (Anonimous, 2004: 5).

Tabel 31. Persepsi Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Kekuasaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil	Skor Ideal	%
A. Mengetahui	17	51		
B. Cukup Mengetahui	3	6		
C. Kurang Mengetahui	0	0		
Total	20	57	60	95.00 %

Perolehan hasil sebanyak 95.00 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan semua unsur kekuasaan Rapat Anggota Tahunan Gabungan KPK. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 95 % responden memiliki persepsi mengetahui kekuasaan Rapat Anggota Tahunan Gabungan KPK adalah memilih, menilai, dan memberhentikan pengurus gabungan KPK (Anonimous, 2004: 6).

Tabel 32. Persepsi Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Tugas Ketua Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil	Skor Ideal	%
A. Mengetahui	15	45		
B. Cukup Mengetahui	5	10		
C. Kurang Mengetahui	0	0		
Total	20	55	60	91.67 %

Perolehan hasil sebanyak 91.67 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan semua unsur tentang tugas ketua gabungan KPK. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 91, 67 % responden memiliki persepsi mengetahui semua tugas ketua gabungan KPK adalah mengkoordinasi, mengorganisir, dan bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan gabungan KPK (Anonimous, 2004).

Tabel 33. Persepsi Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Tugas Sekretaris Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil	Skor Ideal	%
A. Mengetahui	6	18		
B. Cukup Mengetahui	9	18		
C. Kurang Mengetahui	5	5		
Total	20	41	60	68.33%

Perolehan hasil sebanyak 68,33 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan minimal dua unsur dari tiga unsur tentang tugas sekretaris gabungan KPK. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 68,33 % responden memiliki persepsi cukup mengetahui tugas seorang sekretaris gabungan KPK adalah membuat dan memelihara catatan rapat, membuat berita acara, dan surat menyurat (Anonimous, 2004).

Tabel 34. Persepsi Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Tugas Bendahara Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil	Skor Ideal	%
A. Mengetahui	8	24		
B. Cukup Mengetahui	7	14		
C. Kurang Mengetahui	5	5		
Total	20	43	60	71.67%

Perolehan hasil sebanyak 71.67 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan minimal dua unsur dari tiga unsur tentang tugas bendahara gabungan KPK. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 71, 67 % responden memiliki persepsi cukup mengetahui tugas seorang bendahara gabungan KPK adalah menerima dan melakukan pembayaran atas persetujuan ketua dan memelihara arsip transaksi keuangan (Anonimous, 2004).

Tabel 35. Persepsi Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Tugas Pengawas Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil	Skor Ideal	%
A. Mengetahui	15	45		
B. Cukup Mengetahui	5	10		
C. Kurang Mengetahui	0	0		
Total	20	55	60	91.67%

Perolehan hasil sebanyak 91.67 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan semua unsur tentang tugas pengawas gabungan KPK. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 91,67 % responden memiliki persepsi mengetahui semua tugas seorang pengawas gabungan KPK adalah melakukan pemeriksaan organisasi, melakukan pemeriksaan perkembangan usaha, dan membuat laporan (Anonimous, 2004).

Tabel 36. Persepsi Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Penasihat Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil	Skor Ideal	%
A. Mengetahui	17	51		
B. Cukup Mengetahui	3	6		
C. Kurang Mengetahui	0	0		
Total	20	57	60	95.67%

Perolehan hasil sebanyak 95.00 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan semua unsur penasihat gabungan KPK. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 95 % responden memiliki persepsi mengetahui bahwa unsur penasihat gabungan KPK adalah aparat desa, tokoh masyarakat, dan pembina gabungan KPK (Anonimous, 2004).

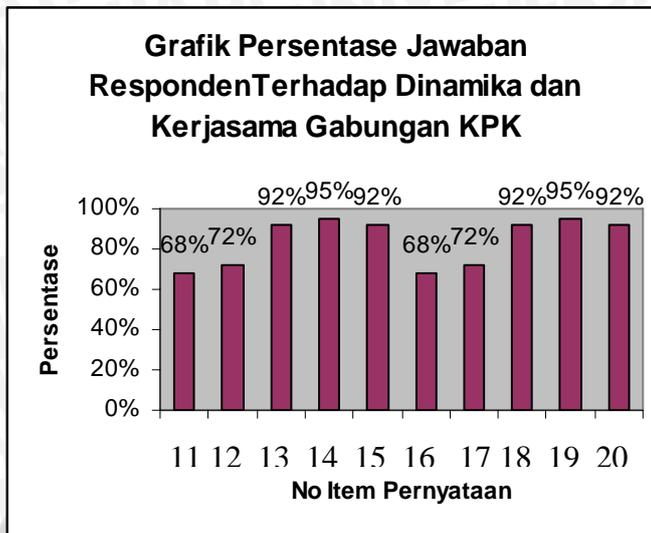
Tabel 37. Persepsi Responden Terhadap Pengetahuannya Tentang Tugas Penasihat Gabungan KPK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Skor Hasil	Skor Ideal	%
A. Mengetahui	15	45		
B. Cukup Mengetahui	5	10		
C. Kurang Mengetahui	0	0		
Total	20	55	60	91.67%

Perolehan hasil sebanyak 91.67 % menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan semua unsur tentang tugas penasihat gabungan KPK. Hal ini diinterpretasikan bahwa sebanyak 91,67 % responden memiliki persepsi cukup mengetahui bahwa tugas seorang penasihat gabungan KPK adalah memberi saran, masukan, dan nasihat kepada pengurus Gabungan KPK (Anonimous, 2004).

Hasil penelitian yang dipaparkan pada masing-masing indikator di atas dapat disederhanakan dengan melihat grafik rekapitulasi persepsi responden terhadap pengetahuannya tentang Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK sebagai berikut:

Grafik 2. Rekapitulasi Persepsi Responden Terhadap Pengetahuannya tentang Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK



Keterangan:

11. Syarat Pembentukan Gabungan KPK
12. Perangkat Organisasi Gabungan KPK
13. Pengurus Gabungan KPK
14. Kekuasaan RAT Gabungan KPK
15. Tugas Ketua Gabungan KPK
16. Tugas Sekretaris Gabungan KPK
17. Tugas Bendahara Gabungan KPK
18. Tugas Pengawas Gabungan KPK
19. Penasihat Gabungan KPK
20. Tugas Penasihat Gabungan KPK

Berdasarkan Grafik di atas dapat kita ketahui bahwa persepsi yang dimiliki oleh anggota KPK tentang Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK untuk item syarat pembentukan gabungan KPK diperoleh 68 %, perangkat organisasi gabungan KPK 72 %, pengurus gabungan KPK 92 %, kekuasaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Gabungan KPK 95 %, tugas ketua Gabungan KPK 92 %, tugas sekretaris Gabungan KPK 68 %, tugas bendahara Gabungan KPK 72 %, tugas pengawas Gabungan KPK 92 %, Penasihat Gabungan KPK 95 %, dan Tugas penasihat Gabungan KPK 92 %. Untuk perolehan tertinggi pada item kekuasaan Rapat Anggota Tahunan Gabungan KPK yakni sebesar 95 % dan Penasihat Gabungan KPK, sedangkan perolehan terendah adalah pada item tugas sekretaris gabungan KPK. Secara rata-rata perolehan ke sepuluh unsur dinamika dan kerjasama gabungan KPK di atas adalah 85 %, artinya perolehan tersebut diinterpretasikan bahwa seluruh anggota KPK baik Kenanga dan Sidodadi memiliki persepsi cukup mengetahui tentang Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK artinya dengan persepsi tersebut kedua KPK baik Kenanga maupun Sidodadi sudah memiliki persepsi yang cukup mengetahui dan siap menjadi gabungan KPK yang lebih besar.

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat kita ketahui bahwa Aktual Kompetensi Kerja (AKK) yang dicapai oleh anggota KPK Sidodadi dan Kenanga tentang Pengenalan Gabungan KPK untuk perolehan tertinggi pada item pengertian Gabungan KPK yakni sebesar 77 % sedangkan perolehan terendah adalah pada item pemanfaatan ekonomi gabungan KPK 60 %. Secara rata-rata perolehan ke sepuluh unsur pengenalan gabungan KPK di atas adalah 72 %, artinya perolehan tersebut diinterpretasikan bahwa seluruh anggota KPK baik Kenanga dan Sidodadi cukup mengetahui mengenai pengenalan Gabungan KPK.
2. Berdasarkan hasil pembahasan dapat kita ketahui bahwa persepsi yang anggota KPK tentang Dinamika dan Kerjasama Gabungan untuk perolehan tertinggi pada item kekuasaan Rapat Anggota Tahunan Gabungan KPK dan Penasihat Gabungan KPK yakni sebesar 95 % sedangkan perolehan terendah adalah pada item tugas sekretaris dan syarat pembentukan gabungan KPK yakni sebesar 68 %. Secara rata-rata persepsi ke sepuluh unsur dinamika dan kerjasama gabungan KPK di atas adalah 85 %, artinya perolehan tersebut diinterpretasikan bahwa persepsi seluruh anggota KPK baik Kenanga dan Sidodadi cukup mengetahui mengenai Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK artinya dengan persepsi tersebut kedua KPK baik Kenanga maupun Sidodadi sudah mengetahui dan siap menjadi gabungan KPK yang lebih besar.

7.2 Implikasi Penelitian

Dengan diperolehnya hasil penelitian bahwa Aktual Kompetensi Kerja (AKK) anggota KPK baik Kenanga dan Sidodadi tentang pengenalan Gabungan KPK yakni sebesar 72 % dan Persepsi anggota KPK Kenanga dan Sidodadi tentang Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK sebesar 85 %, maka kedua KPK sudah layak untuk menjadi gabungan KPK untuk mendapat akses yang lebih besar.

7.3 Saran

Dari kesimpulan di atas dapat disarankan bahwa seluruh anggota KPK baik Kenanga dan Sidodadi diinterpretasikan cukup mengetahui mengenai pengenalan Gabungan KPK dan dipersepsikan cukup mengetahui Dinamika dan Kerjasama Gabungan KPK sehingga perlu dibentuk gabungan KPK yang dapat mewadahi semua kepentingan anggota KPK baik Kenanga dan Sidodadi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, tanpa perlu diadakan diklat Gabungan KPK baik yang diselenggarakan oleh lembaga diklat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous (Deptan). 1998. *Metodologi Pembinaan Petani-Nelayan Kecil di Indonesia*. Badan Diklat Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta, Oktober.
- _____. 2002. *Selayang Pandang P4K*. Proyek P4K T.A 2002, Badan Pengembangan SDM Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta Desember.
- _____. 2004a. *Modul Penguatan Kapasitas Gabungan KPK*. Proyek P4K, Badan Pengembangan SDM Pertanian, Jakarta.
- _____. 2004b. *Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penumbuhan dan Penguatan Kapasitas Gabungan KPK*. Proyek P4K, Badan Pengembangan SDM Pertanian, Jakarta.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Azwar, S. 2006. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Bayu Krisnamurthi. 2006. *Revitalisasi Pertanian: Sebuah Konsekuensi Sejarah dan Tuntutan Masa Depan*. Dalam Krisnamurthi, B (Eds.), *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*: (hal 4-7, 27). Jakarta: Penerbit Kompas.
- Daniel, M. 2006. *PRA (Participatory Rural Appraisal): Pendekatan Efektif Mendukung Penyuluhan Pertanian Partisipatif dalam upaya Percepatan Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Davidoff, L. Linda. 1988. *Psikologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Effendy, U. U. 1986. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Terapannya*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya
- Hanani, N. Ibrahim, J.T. dan Purnomo, M.. 2003. *Strategi Pembangunan Pertanian: Sebuah Pemikiran Baru*. Yogyakarta: Penerbit Lappera Pustaka Utama.
- Kurniasari, Y. D. 2007. *Analisis Tingkat Kemampuan Ekonomi Anggota Kelompok Petani Nelayan Kecil (KPK) pada Proyek Peningkatan Pendapatan Petani nelayan Kecil (P4K)*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Agribisnis, Universitas Brawijaya Malang.
- Majid, A. 2007. *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya
- Mubyarto. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta: Penerbit P3PK UGM Aditya Media.

_____. 2005. *A Development Manifesto: The Resilience of Indonesian Ekonomi Rakyat During Monetary Crisis*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Mulyana, D. 2004. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya

Nawawi, H. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Noetjahyo, J.A. 2005. *Dari Ladang Sampai Kabinet: Menggugat Nasib Petani*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Parel, Cristina P, Gloria C Caldito, Pillar L, Ferer.1973. *Sampling Design and Procedures*. Philippines: Philippine Social Science Council.

Rahmat, J. 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya

Riduwan. 2006. *Rumus dan Data Dalam Aplikasi Statistika*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.

Scott, James. 1981. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: Penerbit LP3ES.

Setiyowati, R.U. 2006. *Hubungan Peran Penyuluh Pertanian Dengan Kemandirian Kelompok Petani Kecil (KPK) dalam Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K)" Studi Kasus di Desa Bacem dan Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang.

Soedarmanto. 2003. *Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (Teori dan Terapannya)*. Malang: Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

Soekanto, S. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Radja Grafindo Persada.

Soekartawi. 1996. *Pembangunan Pertanian Untuk Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sudjana, N. 2001. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, dan Desertasi*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.

Surakhmad, W. 2004. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metoda dan Teknik*. Bandung: Penerbit Tarsito.

Suyono, H. 2003. *Memotong Rantai Kemiskinan: Seri Mewujudkan Kemandirian Keluarga Kurang Mampu*. Jakarta: Penerbit Yayasan Dana Sejahtera Mandiri.

Todaro, M. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Negara Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Van den Ban, A.W. dan Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Walgito, B. 2003. *Psikologi Sosial: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset

